

Transnasional

Jurnal Ilmu Hubungan Internasional

- **Reorientasi Politik Luar Negeri Indonesia pada Pemerintahan Joko Widodo, 2014 - 2019**
Ludiro Madu
- **Tinjauan Teoritis mengenai Konsep Sekuritisasi**
Denik Iswardani Witarti, Budi Hartono
- **Analisis Keunggulan Kompetitif dan Komparatif Minyak Sawit Mentah (CPO) Indonesia di Pasar Global**
Denada Faraswacyen L. Gaol, Tulus Yuniasih
- **Asimetri Struktural Penyebab Perang Kekuatan Besar dalam Konteks Asia Pasifik**
Andrea Abdul Rahman A.
- **Pengungsi dan Tanggung Jawab Internasional**
Tubagus E. Faturahman
- **Faktor Sosial-Budaya sebagai Pendorong Krimea Melakukan Referendum**
Arin Fithriana, Elistania



Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Budi Luhur

Transnasional

Jurnal Ilmu Hubungan Internasional

**Pemimpin Redaksi:
Dekan FISIP**

**Redaktur Pelaksana:
Ketua Program Studi Ilmu Hubungan Internasional**

**Dewan Redaksi:
Arin Fithriana
Denada Faraswacyen L. Gaol**

**Sekretaris Redaksi
Samsinar**

**Pemasaran
Anggun Puspitasari**

**Alamat Redaksi:
Jurusan Ilmu Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Budi Luhur
Jln. Raya Ciledug, Petukangan Utara, Jakarta Selatan 12260
Telp. (021) 5853753 Ext. 252**

**Email
Transnasional_bl@yahoo.co.id**

PENGANTAR REDAKSI

Pembaca yang budiman,

Sebelumnya, kami sangat menyesal dengan keterlambatan penerbitan jurnal ini. Ada beberapa kendala yang harus kami hadapi sehingga kami akhirnya bisa menerbitkan kembali jurnal ini. Banyak hal yang harus kami perbaiki berkaitan penyuntingan dan manajemen serta sirkulasinya. Kami sangat menyadari masih banyak kekurangan dalam jurnal ini. Kritik dan saran untuk perbaikan sangat kami harapkan.

Semoga tulisan-tulisan ini bermanfaat bagi para pembaca.

Kemanfaatan ini sangat tergantung pada kontribusi tulisan-tulisan yang masuk pada redaksi. Selamat membaca

Jakarta, Desember 2014

Salam kami,

Dewan Redaksi

DAFTAR ISI

<i>Ludiro Madu</i>	Reorientasi Politik Luar Negeri Indonesia pada Pemerintahan Joko Widodo, 2014 – 2019	104 – 117
<i>Denik Iswardani Witarti Budi Hartono</i>	Tinjauan Teoritis mengenai Konsep Sekuritisasi	118 – 132
<i>Denada Faraswacyen L. Gaol Tulus Yuniasih</i>	Analisis Keunggulan Kompetitif dan Komparatif Minyak Sawit Mentah (CPO) Indonesia di Pasar Global	133 – 152
<i>Andrea Abdul Rahman A.</i>	Asimetri Struktural Penyebab Perang Kekuatan Besar dalam Konteks Asia Pasifik	153 – 166
<i>Tubagus E. Faturahman</i>	Pengungsi dan Tanggung Jawab Internasional	167 – 180
<i>Arin Fithriana Elistania</i>	Faktor Sosial-Budaya sebagai Pendorong Krimea Melakukan Referendum	181 – 197

REORIENTASI POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA PADA PEMERINTAHAN JOKO WIDODO, 2014 – 2019

Ludiro Madu¹
ludiro@gmail.com

Abstract

Reorientation of Indonesia's foreign policy obtained its momentum when Joko Widodo popularly called Jokowi took Indonesia's presidential office. Although democratization has increased the role of non-state actors in the formulation and implementation of foreign policy, the role of president in foreign policy has continued to be importance. Under President Jokowi, Indonesia seeks to become global maritime axis by giving priority on developing maritime-linked issues, including foreign policy. Some of its characteristics including domestic-orientation with strong emphasize on the real advantage of foreign policy toward people and priority on bilateral rather than multilateral relations. These orientation and characteristics obviously left Susilo Bambang Yudhoyono's 'million friends, zero enemies' that Indonesia had demonstrated for 10 years (2004-2009 and 2009-2014). This paper aims at discussing the changing orientation of Indonesia's foreign policy by tracing back to the period of presidential campaign during the 2014 presidential election until the end of 2014. It also seeks to give factual examples on the way President Jokowi practiced Indonesia's foreign policy in his first three months in power.

Keywords: foreign policy, Joko Widodo, diplomacy

Pendahuluan

Terpilihnya Presiden Jokowi menjadi Presiden ke-7 Indonesia diyakini akan mengubah karakteristik dan gaya diplomasi Indonesia yang berbeda dari praktik diplomasi selama 10 tahun terakhir di era Presiden SBY.² Faktor-faktor domestik yang mempengaruhi Polugri memang tidak berubah secara signifikan. Demokrasi tetap menjadi landasan utama faktor domestik dalam menentukan praktik Polugri di era Jokowi. Struktur memang tidak berubah, namun konfigurasi politik domestik sangat berbeda. Salah satu faktor domestik utama yang berubah itu adalah pemerintahan atau eksekutif sebagai

¹ Staf pengajar pada Prodi Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta, dan pemimpin redaksi Jurnal Studi Diplomasi dan Keamanan (JSDK) pada prodi tersebut. Penulis pernah mengikuti pelatihan mengenai Nasionalisme di *Central European University*, Budapes (Hungaria, 2009) dan pelatihan mengenai studi-studi Keamanan dan Perdamaian (*Training On Peace and Security Studies/TOPS*) di Uppsala University (Swedia, 2010). Penulis menerbitkan buku, yaitu *Keajaiban Thailand: Analisis Deskriptif tentang Asal-Usul dan Pemulihan Krisis Ekonomi* (JP Press, Surabaya, 2003) dan menjadi editor bersama buku *Mengelola Perbatasan Indonesia di Dunia Tanpa Batas: Isu, Permasalahan, dan Pilihan Kebijakan* (Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010) dan *Isu Bencana dalam Hubungan Internasional* (Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013). Spesialisasi akademik penulis adalah studi-studi Asia Tenggara, ASEAN, dan Politik Luar Negeri Indonesia. Pada saat ini, penulis sedang menyelesaikan S3 di Institute of Asian Studies, Universitas Melbourne, Australia.

² Ludiro Madu, *Indonesia dalam Dinamika Hubungan Internasional*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2015 (dalam proses penerbitan).

pelaku utama baik dalam merumuskan dan melaksanakan Polugri selama lima tahun ke depan.

Reorientasi Polugri pada pemerintahan Presiden Jokowi juga didorong oleh pengalaman polugri selama 10 tahun pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada 2004 – 2009 dan 2009 – 2014. Karakteristik Polugri pemerintahan SBY cenderung berorientasi global dan regional.³ Dengan orientasi itu, SBY membawa Indonesia menjadi sangat aktif dalam berbagai forum regional di *Association of South East Asia Nations (ASEAN)* dan kerjasama multilateral, seperti di G20, Asia Pasific Economic Cooperation (*APEC*), *World Trade Organization (WTO)*, dan forum *Millennium Development Goals (MDGs)*. Sejak 2003, Indonesia mengambil inisiatif polugri dalam mengupayakan perdamaian di antara negara-negara yang berkonflik, seperti konflik klaim di Laut Tiongkok Selatan, Korea Utara-Korea Selatan, Israel-Palestina, Thailand dan pemberontak di Thailand Selatan. Orientasi Polugri itu mendorong pemerintahan SBY cenderung bertindak akomodatif dan fasilitatif terhadap berbagai aturan main global-regional.⁴

Pelantikan Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kala (JK) sebagai Presiden dan Wakil Presiden Indonesia pada 20 Oktober 2014 menjadi momentum paling penting bagi reorientasi politik luar negeri Indonesia (Polugri). Reorientasi tersebut perlu dilakukan mengingat Jokowi-JK memiliki desain visi dan misi Polugri yang berciri khusus, yaitu menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Gagasan poros maritim mencoba mengangkat kembali identitas bangsa sebagai suatu kekuatan maritim di antara Samudera India dan Samudera Pasifik. Melalui gagasan ini, bangsa Indonesia akan secara optimal memanfaatkan potensi geografis, geostrategis, dan geoekonomi yang merupakan faktor penting bagi dinamika hubungan internasional di kedua samudera.⁵ Reorientasi tersebut tentu saja dilakukan tanpa perlu mengubah doktrin Polugri bebas dan aktif, sebagaimana telah ditegaskan Presiden Jokowi pada pidato pelantikannya.

Tulisan ini akan menjelaskan sejauh mana perubahan faktor domestik yaitu, perubahan pemerintahan menentukan politik luar negeri Indonesia. Faktor Jokowi dan visi-misinya dalam politik luar negeri akan menjadi bahasan penting untuk melihat perubahan dan kontinuitas polugri. Konteks bahasan meliputi dinamika pemilihan umum (pemilu), khususnya pemilihan presiden (pilpres) 2014, hingga akhir 2014. Dalam beberapa hal, tulisan ini mungkin terlalu dini untuk mengklaim perubahan atau reorientasi

³ Yanyan Muhammad Yani, "Change and Continuity in Indonesian Foreign Policy," http://pustaka.unpad.ac.id/wp-content/uploads/2010/01/change_and_continuity_in_indonesian_foreign_policy.pdf, diakses 10 Agustus 2014.

⁴ Ludiro Madu, "Diplomasi Demokrasi SBY", harian Kedaulatan Rakyat, 14 Oktober 2014.

⁵ Retno LP Marsudi, "Diplomasi Poros Maritim Indonesia", harian Kompas, 19 September 2014.

Polugri, namun kecenderungan reorientasi tersebut cukup kuat berdasarkan beberapa praktik Polugri Presiden Jokowi pada masa awal pemerintahannya.

Pemilu 2014 dan Diplomasi Indonesia

Realitas politik di Indonesia menunjukkan bahwa peran presiden dalam merumuskan, mengarahkan, dan menjalankan orientasi politik luar negeri tetaplah penting.⁶ Presiden baru yang terpilih melalui pemilihan presiden (pilpres) pada 9 Juli mempengaruhi orientasi politik luar negeri Indonesia. Presiden baru memiliki *platform* politik, terutama politik luar negeri, yang berbeda dalam menentukan sikap negara terhadap negara lain, baik di tingkat bilateral, regional, maupun multilateral. Menteri Luar Negeri Indonesia pada saat itu, Marty Natalegawa, menegaskan bahwa perubahan politik pada pemerintahan baru 2014 menentukan komitmen Indonesia terhadap berbagai upaya internasional yang telah dirintis selama ini.⁷ Kenyataan ini menyebabkan kemunculan calon-calon presiden (capres) yang lebih dari satu dan terpilihnya presiden baru termasuk pemerintahan baru menjadi menarik untuk diperhatikan berkaitan dengan kontinuitas dan perubahan orientasi politik luar negeri Indonesia pada periode lima tahun mendatang, yaitu 2014 – 2019.⁸

Pemilihan Umum (pemilu) 2014 menjadi salah satu determinan penting bagi Polugri. Pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) I dan II, anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan pemilihan presiden (pilpres) menentukan wajah diplomasi negara ini di tingkat internasional. Pemilu yang berlangsung jujur, adil, dan damai dapat memberikan impresi positif bagi postur Polugri. Demikian juga, anggota DPRD I dan II, DPR, DPD, dan Presiden terpilih dapat menentukan peran dan posisi Indonesia dalam berbagai isu internasional, baik dalam hubungan bilateral, regional, maupun multilateral.

Sejak instalasi demokrasi 1998, demokrasi telah menjadi salah satu faktor domestik penting dalam bagi postur PLNI.⁹ Adagium klasik dalam Hubungan Internasional bahwa “politik luar negeri merupakan kepanjangan tangan dari politik domestik” tampaknya tetap relevan. Di masa demokrasi, tiap pemilu dianggap memberikan arti penting berbeda bagi posisi Indonesia di tingkat internasional. Sejak reformasi 1998, pemilu telah berlangsung pada 1999, 2004, dan 2009. Pemilu 1999 merupakan pemilu demokratis pertama bagi negara ini. Untuk pertama kalinya, pemilihan presiden diselenggarakan secara langsung

⁶lis Gandarsih, “Indonesia’s Democratic Politics and Foreign Policy-Making: A Case Study of Iranian Nuclear Issue, 2007-2008”, *the Rajaratnam School of International Studies (RSIS) Working Paper*, No. 236, NTU, Singapore, 2012, hal.3.

⁷ “Politik luar negeri: Kontinuitas tak terganggu”, harian *Kompas*, 8 Januari 2014.

⁸ Ludiro Madu, “Pemilu dan Diplomasi Indonesia”, harian *Kedaulatan Rakyat*, 25 Maret 2014.

⁹ Rizal Sukma, “Indonesia Finds A New Voice”, *Journal of Democracy*, Vol. 22, No. 4, 2011

pada 2004. Sejak itu Indonesia menikmati masa-masa normal dalam kehidupan politik dan demokrasi 5 tahunan. Demikian pula, pemilu 2014 merupakan pilar penting bagi demokrasi sebagai modalitas politik luar negeri Indonesia ketika demokrasi Indonesia memilih presiden baru tanpa kekerasan politik.

Hubungan antara demokrasi dan politik luar negeri memperlihatkan bahwa pengaruh proses demokrasi tidak hanya berhenti pada struktur politik domestik. Demokrasi juga mempengaruhi perilaku politik luar negeri Indonesia, baik di tingkat perumusan atau pembuatan maupun di tingkat pelaksanaannya. Kaitan antara kedua variabel itu dijelaskan oleh Jorn Dosch bahwa

“The influence of non-governmental actors in the foreign policy arena is prominently related to the way in which regime accountability constraints the government’s latitude of decision-making in foreign affairs. In an authoritarian state regime, accountability tends to be low because the procedures for power transfer are not institutionalized. The continuity of a regime is not linked to the legislative process, elections, judicial decision, or even the regime’s performance. Hence, accountability does not impose a significant limitation on foreign policy making in authoritarian polities. In contrast, democratization increases regime accountability and, as a result, restricts the regime’s leeway in determining and implementing foreign policy goals.”¹⁰

Berdasarkan penjelasan Dosch itu, Polugri tidak hanya merupakan domain dari negara atau pemerintah. Polugri telah membuka ruang bagi peran berbagai kelompok masyarakat dalam upaya pemerintah Indonesia menanggapi isu-isu eksternal, baik di tingkat global maupun regional. Aktor-aktor nonnegara ini telah memaksa pemerintah Indonesia *“...to pay more attention to issues such as human rights and environmental matters in foreign affairs and blocked or significantly re-shaped governmental initiatives toward other countries”*.¹¹ Fenomena ini telah berlangsung semakin menonjol pada dua masa pemerintahan Presiden SBY.

Dibandingkan dengan para pendahulunya, pemerintahan SBY memang telah menikmati situasi dan kondisi sosial, ekonomi, dan politik yang lebih baik dan stabil. Struktur politik domestik yang lebih terbuka bahkan telah memberikan semacam jaminan politik tanpa ada ancaman potensial yang berkaitan dengan upaya politik untuk menjatuhkan pemerintahan SBY. Realitas politik domestik juga memperlihatkan bahwa demokrasi juga telah memberi peluang kepada berbagai aktor baru nonnegara. Aktor negara dan aktor nonnegara merupakan dua entitas politik penting yang selalu mewarnai dinamika perubahan dan kesinambungan struktur hubungan internasional selama ini.

¹⁰ Jorn Dosch, “The Impact of Democratization on the Making of Foreign Policy in Indonesia, Thailand and the Philippines,” *Südostasien Aktuell* No. 5, 2006, p. 42.

¹¹ *Ibid.* hal. 46

Selama 16 tahun praktik demokrasi, Indonesia sangat jelas menjadikan demokrasi sebagai bagian dari kuasa lunak (*soft power*) dalam diplomasi global di antara bangsa-bangsa di dunia. Bagi Joseph Nye, seorang pakar Ilmu Hubungan Internasional, kuasa lunak adalah kekuasaan yang bisa berbentuk atau bersifat kultural (dan juga politik). Kekuasaan semacam ini digunakan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu tanpa menggunakan kekerasan atau nir-militer.¹² Melalui pemilu-pemilu paska-1998, Indonesia telah mempraktikkan nilai-nilai demokrasi tanpa disertai konflik atau kekerasan berkelanjutan. Prestasi itu menjadi kuasa lunak bagi Indonesia dalam diplomasi global. Indonesia juga berkepentingan “mengekspor” keberhasilan demokrasi di tingkat domestik ke berbagai forum internasional. Upaya mengeksport demokrasi ini tentu saja tidak mengabaikan praktik-praktik demokrasi yang masih berjalan dengan segala kelemahannya di tingkat domestik selama ini.

Pemilihan umum 2014, termasuk pilpres 9 Juli 2014, merupakan pilar penting bagi demokrasi sebagai modalitas politik luar negeri Indonesia. Terpilihnya calon presiden (capres) Jokowi sebagai Presiden ke-7 Indonesia melalui Pilpres 2014 menunjukkan kepada masyarakat internasional bahwa demokrasi Indonesia memberikan peluang politik kepada rakyat Indonesia untuk memilih presiden baru tanpa kekerasan politik.¹³ Persaingan capres Prabowo Subianto dan capres Jokowi dalam pilpres 2014 memperlihatkan sejauh mana *platform* politik luar negeri mereka mampu menempatkan posisi, peran, dan pengaruh Indonesia dalam hubungan dengan negara-negara lain dan menanggapi berbagai persoalan eksternal. Dengan terpilihnya Jokowi sebagai Presiden RI, *platform* Polugri presiden terpilih menjadi faktor mendasar dalam menentukan kontinuitas dan perubahan politik luar negeri Indonesia.

Calon Presiden dan Isu Internasional

Capres perlu memiliki platform politik luar negeri sebagai sarana awal bagi masyarakat domestik dan internasional dalam memprediksi arah kebijakan luar negeri ketika salah satu dari mereka menjadi Presiden Indonesia mulai 20 Oktober 2014 mendatang. Melalui *platform* itu, masyarakat dapat memproyeksikan prioritas, peran, dan posisi Indonesia dalam 5 tahun ke depan.¹⁴ Sayangnya, para calon presiden (capres) tidak memberikan tanggapan memadai. Capres Joko Widodo dan Capres Prabowo Subianto ternyata juga tidak menyampaikan pandangan mereka mengenai isu-isu internasional lainnya berkaitan dengan posisi dan peran yang sebaiknya dijalankan

¹² Joseph Nye, “Soft Power”, *Foreign Policy*, No. 80, fall 1990, hal. 153–171

¹³ Ludiro Madu, “Democratization: Changes of Foreign Policy Agenda in Indonesia,” paper dipresentasikan pada Seminar Internasional antara UPN “Veteran” Yogyakarta dengan the Institute of International Affairs Praha mengenai *Democracy, Gender, and Islam in Indonesia*, di Praha, 2011.

¹⁴ Ludiro Madu, “Uji Politik Luar Negeri Presiden”, *harian Suara Merdeka*, 31 Juli 2014.

Indonesia dalam lingkungan internasional yang semakin dinamis. Kedua capres masih menghindari memberikan pendapat kritis terhadap kebijakan luar negeri pemerintahan Presiden SBY.¹⁵

Presiden memang bukan lagi satu-satunya aktor dalam politik luar negeri Indonesia. Demokratisasi pasca 1998 telah mendorong diversifikasi aktor-aktor domestik yang mempengaruhi perumusan kebijakan luar negeri Indonesia, seperti kelompok LSM, akademisi, pusat-pusat studi (*think tanks*), media, dan korporasi. Demokrasi juga memberi peran diplomasi bagi lembaga legislatif dan yudikatif. Namun demikian, presiden sebagai bagian terpenting dari eksekutif tetap merupakan aktor utama dalam perumusan dan pelaksanaan politik luar negeri, termasuk di Indonesia. Meski aktor-aktor lain juga memiliki peran yang meningkat dalam diplomasi, namun peran dan pengaruh itu tidak sedominan presiden melalui kementerian luar negeri.¹⁶

Siapapun yang terpilih menjadi Presiden RI harus memperhitungkan beberapa isu mendesak ini. *Pertama*, persaingan antara AS dan Cina di Asia Tenggara telah menimbulkan ketidakamanan di kawasan. Setiap negara memiliki respon berbeda terhadap kedua negara besar itu. Kehadiran kembali AS melalui kebijakan US *rebalance* atau *pivot* Asia telah memberikan sekaligus perlindungan dan potensi ancaman. Tiongkok merasa kehadiran kembali AS di kawasan Asia (Tenggara) merupakan bukti rivalitas di antara mereka untuk memperoleh pengaruh di antara negara-negara di kawasan.¹⁷

Dalam situasi itu, Indonesia harus menegaskan sikapnya terhadap AS tanpa menghiraukan peningkatan kekuatan ekonomi-militer Tiongkok. Kedekatan Indonesia terhadap AS harus memberikan pengaruh positif bagi diplomasi Indonesia di kawasan ini dan Tiongkok. Indonesia tidak bisa mengabaikan Tiongkok tanpa mempertimbangkan kepemimpinan Indonesia di ASEAN. Peran itu menuntut Indonesia menjalankan strategi *constructive engagement* terhadap Tiongkok. Alih-alih mengasingkan Tiongkok, Indonesia harus mendorong partisipasi Tiongkok dalam berbagai kerjasama regional.¹⁸

Isu *kedua* adalah kesiapan Indonesia menghadapi Komunitas ASEAN 2015, khususnya liberalisasi ekonomi ASEAN (*ASEAN Economic Community*/Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA). Presiden baru harus memiliki peta jalan (*road map*) menuju MEA itu.¹⁹ Salah satu tujuan peta jalan itu adalah supaya liberalisasi itu memberi manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat Indonesia. Dengan jumlah penduduk mencapai 625 juta,

¹⁵ Debat ke-3 Calon Presiden tentang Politik Internasional dan Ketahanan Nasional, 23 Juni 2014.

¹⁶ Ganewati Wuryandari, "Enam Dekade Politik Luar Negeri Indonesia: Sebuah Catatan yang Terlewat", dalam Ganewati Wuryandari (eds.), *Politik Luar Negeri Indonesia di Tengah Pusaran Politik Domestik*, P2P LIPI dan Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2008.

¹⁷ Ludiro Madu, "Peran Baru AS", *harian Kedaulatan Rakyat*, 16 November 2012.

¹⁸ Rizal Sukma, *Indonesia and the Emerging Sino-US Rivalry in Southeast Asia*, LSE, London, 2013.

¹⁹ Yudho Winarto, Saat MEA, "Pengusaha RI punya pasar 625 juta orang", *Koran Kontan*, 16 Desember 2014.

capres harus memiliki *road map* yang jelas untuk menjadikan Indonesia sebagai subyek dari MEA dalam bentuk kemandirian ekonomi.

Isu *ketiga* berkaitan dengan respon Indonesia terhadap ancaman keamanan non-tradisional, seperti narkoba, isu kesehatan (H5N1 dan penyakit ebola), terorisme, asap, dan *human trafficking*. Karakteristik ancaman yang bersifat melintas batas negara, non-militer, dan mengancam keamanan manusia (*human security*) memerlukan strategi politik luar negeri yang khusus.²⁰ Kemampuan capres dalam melakukan koordinasi dan kerjasama dengan negara lain atau lembaga internasional sangat diperlukan untuk mencegah dan menanggulangi ancaman keamanan ini.

Masih banyak isu internasional lain yang memerlukan perhatian para capres dalam platform politik luar negeri mereka, termasuk hubungan bilateral antara Indonesia dengan negara-negara tetangga.²¹ Beberapa isu internasional memerlukan respon cepat dengan mempertimbangkan risiko terukur. Sedangkan isu-isu internasional lainnya relatif bisa didelegasikan kepada kementerian terkait, tanpa keterlibatan langsung presiden sebagai pimpinan eksekutif. Dinamika internasional memberi pengaruh signifikan terhadap kebijakan Indonesia dalam upaya meningkatkan diplomasi globalnya.

Dalam konteks ini, *platform* politik luar negeri capres dapat menjadi sarana komunikasi dengan negara-negara lain. *Platform* tersebut dapat memberi sinyal positif mengenai arah kebijakan dan program-program pembangunan Indonesia. Kelanjutan kerja sama yang telah ada, potensi kerjasama baru dan, bahkan, konflik dengan negara-negara tertentu dapat diprediksi melalui *platform* itu. Komitmen Indonesia dalam hubungan bilateral dan multilateral juga dapat dibaca dari *platform* politik luar negeri. Oleh karena itu, kemampuan capres dalam merumuskan platform politik luar negeri Indonesia akan menentukan kontinuitas dan perubahan peran global Indonesia di lima tahun mendatang.

Polugri Pemerintahan Jokowi

Pemerintahan Jokowi akan menempatkan diplomasi ekonomi sebagai intisari dari diplomasi Indonesia 2014 – 2019. Diplomasi ekonomi sebagai dasar bagi upaya sistematis pemerintahan Jokowi untuk menegaskan manfaat diplomasi bagi masyarakat Indonesia. Jika SBY menerjemahkan praktik Polugri dalam *million friends and zero enemy*, bahwa Polugri Jokowi didasarkan pada poros maritim dunia.²² Pemerintahan

²⁰ Ludiro Madu, "Diplomasi Global Melawan Ebola", harian *Suara Merdeka*, 12 Desember 2014.

²¹ Lihat Baiq Wardhani dan Asrudin, "Tantangan Politik Luar Negeri Jokowi", harian *Sinar Harapan*, 23 Oktober 2014.

²² Rene L Pattiradjawane, "Maritim Dunia Presiden Jokowi", harian *Kompas*, 23 Oktober 2014.

Jokowi berusaha mewujudkan kedaulatan maritim Indonesia melalui diplomasi ekonomi yang memberi manfaat nyata kepada rakyat.

Orientasi poros maritim dunia akan menggeser arena polugri tidak sekedar di tingkat global dan regional, namun juga di tingkat domestik. Pemerintahan Jokowi akan meneruskan aktivisme global dan regional melalui diplomasi di berbagai forum multilateral dan ASEAN, seperti telah dilakukan pemerintahan SBY selama ini. Melalui poros maritim dunia, Jokowi akan lebih menegaskan manfaat diplomasi global dan regional dapat dirasakan masyarakat Indonesia, khususnya dalam peningkatan pembangunan dan pemanfaatan sumber daya maritim di Indonesia.

Diplomasi tidak sekedar bertujuan meningkatkan citra Indonesia, namun yang lebih penting adalah manfaat nyata diplomasi bagi rakyat. Pemerintahan Jokowi akan menugaskan para diplomat sebagai ujung tombak diplomasi ekonomi sebagaimana salesman bagi negara Indonesia. Di setiap perwakilan, para diplomat perlu meninjau kembali kinerja diplomasi ekonomi bilateral tanpa perlu meniadakan diplomasi publik melalui berbagai kegiatan budaya atau kemasyarakatan lain.²³

Identifikasi diplomasi multilateral dan regional perlu mempertimbangkan manfaat ekonomi bagi pembangunan domestik. Pembangunan domestik memberikan perhatian pada sumber daya maritim Indonesia, misalnya dalam rangka merespon Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) di akhir 2015. Pembangunan poros maritim itu sejalan dengan program konektivitas ASEAN. Salah satunya adalah pembangunan atau peningkatan kualitas pelabuhan-pelabuhan laut di wilayah Indonesia Tengah dan Timur.

Partisipasi masyarakat yang semakin meningkat dalam diplomasi Indonesia juga diharapkan dapat bersinergi mendukung diplomasi ekonomi pemerintahan Jokowi. Masyarakat bukan lagi obyek, namun subyek dalam pembangunan dan bagi manfaat diplomasi Indonesia. Melalui orientasi polugri Indonesia sebagai poros maritim dunia, pemerintahan Jokowi dapat mengeksplorasi keunggulan maritim yang selama ini kurang diperhatikan dalam diplomasi Indonesia. Oleh karena itu, Pemerintahan Jokowi-JK diyakini dapat memberikan harapan baru bagi optimisme diplomasi Indonesia dalam 5 tahun mendatang.

Penunjukan Retno Priansari Lestari Marsudi sebagai Menteri Luar Negeri (Menlu) Indonesia memberikan harapan baru atas berbagai persoalan maritim selama ini. Persoalan itu menjadi tantangan tersendiri yang perlu segera ditindaklanjuti. Urgensi persoalan batas maritim itu langsung dialami oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) sendiri. Sore hari setelah pelantikannya (20/10/2014), Presiden Jokowi menerima beberapa tamu negara sahabat, di antaranya Perdana Menteri (PM) Singapura Lee Hsien Loong, PM

²³ Ludiro Madu, "Diplomasi *Blusukan* di Mancanegara", detiknews.com, 17 Desember 2014.

Malaysia Najib Razak, dan PM Australia Tony Abbot. Bukan sebuah kebetulan bahwa ketiga tamu penting itu berasal dari negara-negara tetangga yang berbatasan langsung dengan Indonesia secara maritim.

Di satu sisi, pertemuan itu merupakan sebuah upaya untuk saling kenal dan, yang lebih penting, saling mendukung kelanjutan kerjasama bilateral yang telah berjalan selama ini.²⁴ Bagi Presiden Jokowi, pertemuan itu menjadi pengakuan politik dari pemerintah negara lain terhadap pemerintahan baru Indonesia. Sebaliknya, ketiga PM itu ingin mengetahui program kerja pemerintahan Jokowi dalam 5 tahun mendatang. Mereka juga secara langsung menawarkan beberapa program kerja sama untuk mendorong pembangunan di Indonesia, khususnya yang berfokus pada pembangunan maritim. Di sisi lain, pertemuan itu sebenarnya juga menjelaskan kompleksitas persoalan hubungan bilateral Indonesia dengan ketiga negara tetangga itu. Dari berbagai persoalan bilateral yang ada, Indonesia dihadapkan pada satu persoalan yang sama dengan ketiga negara itu, yaitu perbatasan laut yang masih konflikual.

Persoalan mengenai batas maritim atau laut dengan negara-negara tetangga ini harus segera diselesaikan oleh pemerintahan Jokowi. Visi dan misi Jokowi menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia harus diwujudkan dan ditegakkan dalam konteks hukum internasional melalui batas-batas negara yang jelas. Selain menegaskan kedaulatan wilayah, kejelasan batas negara Indonesia dengan negara tetangga juga memperkuat otoritas pemerintah atas berbagai sumber daya alam dan manusia di wilayah perbatasan itu.

Hubungan bilateral mengenai batas maritim antara Indonesia dan Singapura termasuk yang paling sukses dibandingkan dengan Malaysia dan Australia. Kedua negara telah menandatangani perjanjian delimitasi batas maritim di Selat Singapura bagian timur atau segmen satu yang mencakup wilayah Pulau Batam hingga Changi pada awal September 2014. Perjanjian itu merupakan kelanjutan dari perjanjian pada 2009, yaitu kesepakatan Indonesia dan Singapura mengenai batas wilayah laut di Selat Singapura bagian barat yang mencakup Pulau Nipa hingga Tuas. Sedangkan, perundingan bilateral mengenai Selat Singapura bagian timur batas wilayah tersebut baru dapat disepakati sebagian saja karena sebagian lainnya melibatkan wilayah milik Malaysia. Wilayah ini disebut segmen dua, meliputi wilayah Pulau Bintan-South Ledge/Middle Rock/Pedra Branca. Segmen dua ini merupakan 'pekerjaan rumah' bagi pemerintahan Jokowi.

Berbeda dengan Singapura, perundingan bilateral batas maritim antara Indonesia dan Malaysia cenderung sulit dan bertele-tele. Walaupun telah dilakukan lebih dari 20 kali, perundingan itu belum menunjukkan titik temu. Hingga saat ini, kedua negara masih

²⁴ Dinna Wisnu, "Tamu Negara dan Prioritas", Koran *SINDO*, 22 Oktober 2014.

memiliki lima masalah perbatasan laut, meliputi dua di Selat Malaka, dan masing-masing satu di Selat Singapura, Laut China Selatan dan Laut Sulawesi. Menjelang pemerintahannya berakhir, Presiden SBY malah menganggap Malaysia tidak serius bekerja sama dengan Indonesia.

Pernyataan keras presiden SBY menjelang berakhir kekuasaannya dan perubahan pemerintahan di Indonesia tampaknya memaksa pemerintahan PM Najib untuk menunjukkan itikad baiknya. Pemerintah Malaysia membongkar tiang mercusuarinya di Tanjung Datu (Kalimantan Barat) pada 19 Oktober lalu. Kebijakan itu perlu diapresiasi sebagai bentuk pengakuan Malaysia terhadap kedaulatan Indonesia di wilayah itu.

Tindakan itu seperti sebuah “kado” bagi pemerintahan Jokowi, walaupun masih banyak isu perbatasan laut (dan darat) yang perlu dibicarakan. Bahkan pada pertemuan itu, PM Najib menyampaikan masalah batas maritim yang mendesak diselesaikan adalah wilayah Ambalat. Pada kenyataannya, kedua negara ini masih bersengketa di empat titik perbatasan, yaitu di Selat Malaka, Malaka Selatan, Laut Tiongkok Selatan, dan Laut Sulawesi.

Sedangkan masalah batas maritim antara Indonesia – Australia lebih pada isu “manusia perahu” atau pengungsi. Walaupun sudah bersepakat pada perjanjian multilateral *Bali Process*, Pemerintahan PM Abbot menerapkan kebijakan keras dan unilateral *turn boat back policy*. Kebijakan itu menghalau pendatang ilegal transit di wilayah-wilayah Indonesia dan menggunakan kapal laut atau perahu kembali ke perairan Indonesia. Persoalan utamanya adalah dalam melaksanakan kebijakan itu Angkatan Laut Australia cenderung melanggar batas maritim Indonesia.

Persoalan batas maritim ini menjadi tantangan berat bagi diplomasi maritim pemerintahan Jokowi, khususnya Menlu Retno Marsudi. Bentuk-bentuk penyelesaian delimitasi batas maritim melalui perundingan antara Indonesia-Singapura dapat menjadi contoh sukses bagi perundingan dengan negara-negara lain. Perjanjian itu diharapkan semakin meningkatkan hubungan bilateral Indonesia dengan negara-negara tetangga. Janji kampanye Presiden Jokowi menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia perlu ditunjukkan dengan kebijakan dan tindakan nyata untuk menjaga kedaulatan wilayah maritim Indonesia.

Menuju Reorientasi Polugri

Riuh-rendah pelantikan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (20/10) perlu segera dibarengi dengan rencana/program kerja selama 5 tahun ke depan, 2014-2019. Salah satunya terkait dengan diplomasi maritim sebagai 'sokoguru' politik luar negeri Indonesia. Melalui diplomasi maritim, kebijakan luar negeri perlu diabdikan dan

ditujukan untuk mencapai kepentingan nasional, yakni mencapai dan mewujudkan Indonesia yang berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan. Diplomasi tetap dijalankan berdasarkan politik luar negeri bebas dan aktif.

Jokowi menegaskan arti penting diplomasi maritim dalam pidato pelantikannya. Tujuan utama diplomasi maritim adalah *Jalesveva Jayamahe*, yaitu *"...untuk mengembalikan Indonesia sebagai negara maritim. Samudera, laut, selat dan teluk adalah masa depan peradaban kita."*²⁵ Selain itu, Presiden Jokowi mengajak kita mengingat himbauan *"...Presiden Pertama Republik Indonesia, Bung Karno, bahwa untuk membangun Indonesia menjadi negara besar, negara kuat, negara makmur, negara damai, kita harus memiliki jiwa cakrawarti samudera; jiwa pelaut yang berani mengarungi gelombang dan hempasan ombak yang menggulung."*²⁶

Dalam pelaksanaannya, kebijakan luar negeri Jokowi perlu mempertimbangkan kesinambungan dan perubahan/reorientasi dari 10 tahun kebijakan luar negeri di era Presiden SBY. Kesinambungan berkaitan dengan upaya melanjutkan capaian positif diplomasi SBY *million friends, zero enemies*. Sedangkan, reorientasi kebijakan luar negeri ditempuh dalam upaya sistematis untuk mengedepankan diplomasi maritim. Urgensi reorientasi itu adalah memperoleh manfaat sebesar-besarnya dari Komunitas ASEAN 2015 dan kerjasama multilateral-bilateral selama ini.

Prestasi Polugri SBY menjadi warisan penting bagi politik luar negeri Jokowi, meskipun reorientasi tetap perlu dilakukan. Beberapa langkah reorientasi meliputi: pertama, penetapan arah dasar dan target pencapaiannya. Jokowi perlu segera membicarakannya bersama kabinetnya. Perumusan kembali Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) atau Rencana Pembangunan Jangka Panjang-Menengah-Pendek perlu dilakukan untuk memperkuat visi dan misi Pemerintahan Jokowi dan JK. Dalam konteks itu, politik luar negeri menjadi salah satu upaya nyata pemerintahan Jokowi untuk mewujudkan program kerjanya.

Kedua, menugaskan Kementerian Luar Negeri (Kemlu) sebagai *leading sector* dalam mengkoordinasikan pelaksanaannya melalui diplomasi maritim. Pemilihan sosok Menteri Luar Negeri yang memiliki latar belakang, pengalaman, dan *networking* di bidang maritim menjadi langkah awal mendasar. Beberapa nama diplomat karier seperti Retno Marsudi, Yuri Thamrin, Desra Percaya, Arief Havas Oegroseno, dan Dino Patti Jalal perlu lebih dipertimbangkan ketimbang profesional di luar Kemlu.

²⁵ Joko Widodo, "Pidato Pelantikan Presiden RI", harian Suara Merdeka, 21 Oktober 2014.

²⁶ *Ibid.*

Ketiga, identifikasi negara-negara yang paling berpotensi diajak bekerjasama dalam rangka mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Upaya ini memerlukan kerja keras *out of the box* dari lingkaran konsentris politik luar negeri Indonesia selama ini. Tiongkok, AS, Singapura, Thailand, Perancis, Belanda, dan Rusia adalah beberapa negara dengan sumber daya maritim yang perlu mendapat perhatian. Langkah ini tentu saja dikaitkan dengan peningkatan intensitas kerjasama bilateral di negara-negara itu.

Yang menarik adalah kehadiran Presiden Joko "Jokowi" Widodo pada KTT ASEAN di Nayphidaw, Myanmar (12-13/11/2014) tidak memperoleh pemberitaan sehingar-bingar pada KTT APEC di Beijing (Tiongkok). Sebagai "pemain" baru, Presiden Jokowi memang sangat ditunggu komitmennya terhadap ASEAN. Pada KTT ke-25 itu, Presiden Jokowi menyampaikan gagasan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Indonesia menyadari sebuah transformasi besar sedang terjadi di abad ke-21 ini. Pusat gravitasi geo-ekonomi dan geo-politik dunia sedang bergeser dari Barat ke Asia. Pergeseran itu menempatkan laut sebagai prioritas bagi masa depan kawasan. Jalur laut yang menghubungkan dua samudera strategis Samudera Hindia dan Samudera Pasifik merupakan jalur strategis bagi lalu lintas perdagangan dunia.

Namun demikian, cara diplomasi Jokowi yang 'blak-blakan', kongkrit, dan bergaya salesman seperti di depan CEO dan forum-forum bilateral selama KTT APEC di Beijing justru tidak tampak pada forum-forum pertemuan di Nayphidaw. Presiden Jokowi juga tidak terdengar melakukan diplomasi 'blusukan' ke daerah tertentu selama berada di kota itu, seperti dilakukan selama Beijing. Bahkan, pembicaraan bilateral antara Indonesia dan Myanmar tidak dilakukan demi mengejar kepentingan Nasional. Padahal beberapa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Indonesia sudah berencana melakukan ekspansi ke Myanmar dalam rangka Komunitas ASEAN 2015.

Sikap Indonesia yang kurang agresif di KTT ASEAN itu dapat berasal dari perubahan prioritas Indonesia di era Jokowi dalam melihat ASEAN. Polugri pemerintahan Jokowi dianggap lebih berorientasi domestik dan mengutamakan hubungan bilateral. Karakteristik polugri itu berbeda dari pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Orientasi regional-global berdasarkan "million friends, zero enemies" lebih mewarnai polugri Presiden SBY dan mulai ditanggalkan pemerintahan Jokowi. Dengan polugri itu, Jokowi diharapkan memberikan prioritas kepada kepentingan nasional ketimbang asing dalam interaksi antarbangsa.

Kesimpulan

Pemerintahan baru Indonesia di bawah Presiden ke-7, Joko Widodo, memiliki momentum penting dalam menentukan orientasi baru atau reorientasi Polugri 2014-2019. Berdasarkan prestasi Polugri pemerintahan Presiden SBY yang mampu menaikkan citra internasional Indonesia, Polugri Jokowi mencoba arah baru, yaitu menjadikan Indonesia sebagai poros maritime dunia. Orientasi baru Polugri pemerintahan Jokowi cenderung mengambil pendekatan diplomasi domestik demi meraih kepentingan domestik. Diplomasi Indonesia mulai mengurangi hubungan luar negeri yang bersifat multilateral, walaupun multilateralisme tetap penting.

Dengan orientasi Polugri itu, Indonesia tidak lagi 'sungkan' dalam mengambil tindakan tegas dan unilateral terhadap negara-negara lain, termasuk negara anggota ASEAN. Demi kepentingan nasionalnya, pemerintahan Jokowi telah berani mengambil resiko terganggunya hubungan bilateral dengan negara-negara sesama anggota ASEAN. Apalagi media nasional dan internasional meliput kebijakan Jokowi yang keras dan berpotensi mengganggu kesatuan ASEAN. Indonesia telah mengirimkan pesan kepada negara-negara lain bahwa kepentingan dan kedaulatan nasional adalah landasan utama bagi hubungan luar negerinya. Dalam hampir tiga bulan pertama pemerintahannya, Jokowi telah memperlihatkan bahwa kepentingan dan kedaulatan nasional itu pun melampaui kepentingan regional Indonesia di ASEAN. Memang masih terlalu dini untuk menilai sejauh mana kecenderungan kebijakan bilateral itu menempatkan ASEAN bukan lagi sebagai prioritas bagi polugri. Akan tetapi, beberapa perkembangan itu bisa saja berlanjut dan mengarah pada kenyataan bahwa 'ASEAN memang penting, tetapi bukan segalanya bagi Indonesia'.

Daftar Pustaka

- Debat ke-3 Calon Presiden tentang Politik Internasional dan Ketahanan Nasional*. 23 Juni 2014. Program Televisi. Jakarta: berbagai stasiun televisi nasional.
- Dosch, Jorn. 2006. "The Impact of Democratization on the Making of Foreign Policy in Indonesia, Thailand and the Philippines," *Südostasien Aktuell* No. 5.
- Gandarsih, Iis. 2012. "Indonesia's Democratic Politics and Foreign Policy-Making: A Case Study of Iranian Nuclear Issue, 2007-2008", *the Rajaratnam School of International Studies (RSIS) Working Paper*, No. 236, NTU, Singapore.
- Madu, Ludiro. 2011. "Democratization: Changes of Foreign Policy Agenda in Indonesia," paper dipresentasikan pada Seminar Internasional antara UPN "Veteran" Yogyakarta dengan the Institute of International Affairs Praha mengenai *Democracy, Gender, and Islam in Indonesia*, di Praha.

- ". "Peran Baru AS", harian Kedaulatan Rakyat, 16 November 2012.
- ". "Pemilu dan Diplomasi Indonesia", harian Kedaulatan Rakyat, 25 Maret 2014.
- ". "Uji Politik Luar Negeri Presiden", harian Suara Merdeka, 31 Juli 2014.
- ". "Diplomasi Demokrasi SBY", harian Kedaulatan Rakyat, 14 Oktober 2014.
- ". "Diplomasi *Blusukan* di Mancanegara", detiknews.com, 17 Desember 2014.
- Marsudi, Retno LP, "Diplomasi Poros Maritim Indonesia", harian Kompas, 19 September 2014.
- Nye, Joseph. 1990. "Soft Power", *Foreign Policy*, No. 80, Fall.
- Pattiradjawane, Rene L, "Maritim Dunia Presiden Jokowi", harian *Kompas*, 23 Oktober 2014.
- "Politik luar negeri: Kontinuitas tak terganggu", harian *Kompas*, 8 Januari 2014.
- Sukma, Rizal. 2013. *Indonesia and the Emerging Sino-US Rivalry in Southeast Asia*, LSE, London.
- Wardhani, Baiq, dan Asrudin, "Tantangan Politik Luar Negeri Jokowi", harian *Sinar Harapan*, 23 Oktober 2014.
- Widodo, Joko, "Pidato Pelantikan Presiden RI", harian Suara Merdeka, 21 Oktober 2014.
- Winarto, Yudho, "Saat MEA: Pengusaha RI punya pasar 625 juta orang", Koran *Kontan*, 16 Desember 2014.
- Wisnu, Dinna, "Tamunegara dan Prioritas", Koran *SINDO*, 22 Oktober 2014.
- Wuryandari, Ganewati, "Enam Dekade Politik Luar Negeri Indonesia: Sebuah Catatan yang Terlewat", dalam Ganewati Wuryandari (eds.), *Politik Luar Negeri Indonesia di Tengah Pusaran Politik Domestik*, P2P LIPI dan Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2008.
- Yani, Yanyan Muhammad, "Change and Continuity in Indonesian Foreign Policy," http://pustaka.unpad.ac.id/wpcontent/uploads/2010/01/change_and_continuity_in_indonesian_foreign_policy.pdf, diakses 10 Agustus 2014.

TINJAUAN TEORITIS MENGENAI KONSEP SEKURITISASI

Denik Iswardani Witarti¹, Budi Hartono²
deni_kiss@yahoo.com, hartono1989@yahoo.com

Abstract

This paper theoretically examines the concept of securitization. It is analyzed using the Copenhagen School of thought proposed by Ole Waever, Barry Buzan, etc. It concludes that the strength of the securitization is to accelerate the security threats response. However, securitization also increases the likelihood of abuse of power in the name of security threats.

Keywords: security concept, securitization, Copenhagen School

Pendahuluan

Studi keamanan pada awalnya berfokus pada isu militer/strategis yang memiliki kecenderungan terpengaruh oleh aliran realisme. Pada perkembangannya, Barry Buzan di dalam bukunya yang berjudul *Introduction to Strategic Studies: Military Technology and International Relations* melihat bahwa studi keamanan merupakan cabang dari politik, dan tetap memasukkan nilai realisme di dalamnya.³ Meskipun terdapat perspektif baru mengenai studi keamanan (memasukkan politik), bukan berarti studi keamanan tidak membahas mengenai hal teknis terkait militer seperti rudal, kapal tempur, dll. Studi keamanan tetap membahas hal tersebut, namun ada penambahan fokus yaitu tentang politik. Selain itu, pendekatan *problem solving* dalam studi keamanan turut menjadi “pembuka jalan” bagi studi politik untuk masuk ke dalam studi keamanan.

Studi keamanan yang memiliki nilai realisme telah mendominasi universitas dan lembaga penelitian di Barat selama era Perang Dingin. Kekuatan militer, statisme, dan *status quo* merupakan kata kunci dari aliran realisme yang terdapat dalam konsep keamanan. Realisme berasumsi bahwa politik internasional merupakan arena konflik antar negara-negara berdaulat – ide yang berasal dari nilai esensi manusia yang memiliki sifat egois, cemas, serta lingkungan yang bersifat anarki.⁴ Sementara itu, agenda dan prioritas realisme cenderung merupakan cermin dari sejarah dan *geographical parochialism*, gender, serta orang-orang yang mengakui (memperkuat posisi realisme). Realisme seperti yang dinyatakan Robert E. Cox yang merupakan, “a theory of the

¹ Dosen Program Studi Ilmu Hubungan Internasional FISIP Universitas Budi Luhur, Jakarta

² Alumnus Program Studi Hubungan Internasional FISIP Universitas Budi Luhur Jakarta. Kandidat Magister Sains Pertahanan Program Studi Diplomasi Pertahanan, Universitas Pertahanan, Sentul, Jawa Barat.

³ Barry Buzan. 1987. *Introduction to Strategic Studies: Military Technology and International Relations*, London: Macmillan.

⁴ Ken Booth. 2007. *Theory of World Security*, Cambridge: Cambridge University Press, hal 158.

powerful, by powerful, for the powerful."⁵

Pendekatan kritis terhadap studi keamanan berusaha mengungkap dan menantang pendekatan ortodoks/tradisional yang telah ada sejak tahun 1950-an. Pendekatan tradisional diwakili oleh universitas dan lembaga penelitian yang berada di Amerika Serikat, bahwa ide-ide yang cenderung bersifat nasionalis disinyalir telah menyamar dan dianggap sebagai suatu kebenaran. Edward Luttwak menegaskan bahwa satu-satunya penyelidikan akademik dalam studi keamanan bertujuan untuk, "*strengthen one's own side in contention of nations*."⁶ Kecenderungan dari keamanan tradisional secara eksplisit dinilai telah mengabaikan isu seperti gender, kelas, dan ras. Pendekatan keamanan tradisional dinilai tidak memperhatikan isu-isu seperti kekerasan terhadap perempuan dan kemiskinan yang bahkan tingkat kematiannya melebihi jumlah korban perang.⁷

Terdapat perdebatan mengenai apakah harus studi keamanan memperluas cakupan kajiannya, atau tetap berfokus pada isu yang bersifat *high politics*. Ilmuwan-ilmuwan dari pendekatan keamanan tradisional mengkritik apabila cakupan studi keamanan diperluas. Kaum tradisional menilai bahwa perluasan kajian keamanan akan membuat studi keamanan menjadi *chaos*.⁸ Salah satu ilmuwan yang mengkritik perluasan kajian keamanan adalah Stephen M. Walt dalam artikelnya yang berjudul "*The Renaissance of Security Studies*". Walt mengkritik terhadap gagasan perluasan agenda keamanan dan mengkritik dimasukkannya isu-isu nonmiliter seperti kemiskinan dan kerusakan lingkungan.

Walt berpendapat bahwa perluasan tersebut justru akan menghancurkan "*the field's intellectual coherence*."⁹ Namun, Walt memberikan tawaran terkait agenda penelitian. Adapun tawaran yang diberikan Walt adalah agenda kajian terkait peran politik dalam negeri, penyebab perdamaian dan kerjasama, *the power of ideas*, akhir Perang Dingin, ekonomi dan keamanan, serta menyempurnakan teori yang telah ada.

Di sisi lain, Menurut Ken Booth, realisme pada saat ini (pasca-Perang Dingin) berada pada kondisi yang harus mempertahankan identitas *power* di situasi dunia yang terus berubah. Hal ini merupakan masalah kritis realisme. Booth menyatakan bahwa:

⁵ Ken Booth, 'Critical Explorations', dalam Booth, *Critical Security Studies*, hal. 4 – 10.

⁶ Edward N. Luttwak. 1985. *Strategy and History: Collected Essays*, New Brunswick: Transaction Books, hal. Xiii.

⁷ Sandra Whitworth. 2004. *Men, Militarism, and UN Peacekeeping: A Gendered Analysis*, Boulder Colo: Lynne Rienner.

⁸ Ken Booth, *Op. Cit.*, hal 161.

⁹ Stephen M. Walt. 1991. *The Renaissance of Security Studies*, *International Studies Quarterly*, vol. 35 (2), hal. 211.

“The more realistic realism attempts to be, the more inconsistent it becomes, while the more theoretically consistent it remains, the more it departs from the real world.”¹⁰

Pernyataan Booth tersebut menunjukkan adanya paradoks dari aliran *realism*. Sifat *statism* justru membuat realisme kurang realistik dalam melihat dunia.

Selanjutnya pada era akhir 1980-an merupakan awal dari munculnya gagasan mengenai keamanan non-tradisional (ancaman nonmiliter). Pengembangan keamanan tradisional dilakukan oleh beberapa pemikir, salah satunya adalah Barry Buzan. Buzan mengategorikan keamanan ke dalam 5 sektor, yang setiap sektornya mengidentifikasi dari interaksi yang ada. Adapun isu yang dimasukkan Buzan seperti:¹¹

1. Sektor militer (*forceful coercion*);
2. Sektor politik (otoritas, status pemerintah, dan pengakuan);
3. Sektor ekonomi (perdagangan, produksi, dan finansial);
4. Sektor sosial (*collective identity*);
5. Sektor lingkungan (aktivitas manusia dan *the planetary biosphere*).

Menurut Buzan, kepentingan negara yang menentukan karakter dari agenda yang terdapat di atas. Karya Buzan yang berjudul *“People, State, and Fear”* merupakan tulisan yang bertujuan untuk memperluas agenda keamanan suatu negara. Meskipun dalam bukunya, Buzan mencoba memperluas agenda keamanan, namun kecenderungan negara sentris masih tetap ada.¹² Selanjutnya, dalam bukunya yang kedua, Buzan memperluas apa yang dikenal sebagai *‘referent objects’*. Buzan menyatakan, *“If a multisector approach to security was to be fully meaningful, referent objects other than the state had to be allowed into the picture.”¹³* Selanjutnya *Copenhagen school* berusaha mengkaji argumen ini.

Pengkajian yang dilakukan *Copenhagen school* memunculkan karya yang berjudul *“The European Security Order Recast: Scenarios for the Post-Cold War Era”*. Buku ini menjelaskan pergeseran *referent object* dari negara sebagai objek dan kedaulatan sebagai nilai yang diamankan, menuju masyarakat sebagai *referent* dan identitas sebagai nilai yang diamankan.¹⁴ Ide ini menjadi perubahan besar dalam pendekatan *Copenhagen school*. Dari ide inilah muncul konsep sekuritisasi yang akan dibahas.

¹⁰ Ken Booth, *Op. Cit.*, hal 161.

¹¹ Barry Buzan, Ole Waver, & Jaap de Wilde. 1998. *Security: A New Framework for Analysis*, Boulder Colo: Lynne Rienner, hal. 7 – 8.

¹² Barry Buzan. 1991. *People, States and Fear: An Agenda for International Security Studies in the Post-Cold War Era*, Brighton: Harvester-Wheatsheaf, hal. 9 – 20.

¹³ Barry Buzan et.al.1993. *Identity, Migration, and the New Security Agenda in Europe*, London: Pinter, hal. 24 – 7.

¹⁴ Barry Buzan, Morten Kelstrup, Pierre Lemaitre, Elzbieta Tromer & Ole Waever. 1990. *The European Security Order Recast: Scenarios for the Post-Cold War Era*, London: Pinter, hal. 8.

Copenhagen School: Sekuritisasi

Perubahan kajian keamanan tradisional menuju non-tradisional yang dipelopori oleh Barry Buzan, Ole Waever, serta beberapa pemikir disebut kelompok pemikir *Copenhagen School*. Terdapat beberapa pemikiran yang dihasilkan dari kelompok ini seperti *regional security complex theory* (RSCT), *European security*, serta hubungan antara keamanan regional dan global. Selain itu, salah satu pemikiran yang paling berkontribusi dan khas dari *Copenhagen School* adalah *Societal Security* (keamanan masyarakat) dan *Securitization* (sekuritisasi).

Posisi dari *Copenhagen School* berada pada (*via media*) antara keamanan tradisional yang cenderung *state-centrism* dan keamanan kritis yang memiliki fokus pada individu atau *global security*. Aliran keamanan yang dianut oleh *Copenhagen School* lebih kepada *societal security* atau keamanan masyarakat. Berbeda dengan *referent object* yang dimiliki oleh keamanan tradisional yaitu negara dan *global security* yaitu individu, keamanan masyarakat dari *Copenhagen School* merujuk pada dua hal yaitu negara serta masyarakat. Mengapa *Copenhagen School* tidak merujuk pada keamanan individu? Alasan dari Ole Weaver karena:

*"It seems reasonable to be conservative along this [referent object] axis, accepting that "security" is influenced in important ways by dynamics at the level of individuals and the global system, but not by propagating unclear terms such as individual security and global security."*¹⁵

Weaver melihat bahwa terdapat ketidakjelasan dari makna yang diberikan oleh pendekatan *global security* terkait dengan keamanan individu. Hal tersebut membuat Weaver serta pemikir-pemikir dari *Copenhagen School* merujuk pada keamanan masyarakat. Keamanan masyarakat merujuk pada 'kemungkinan atau ancaman yang aktual', dimana aktor politik sebagai penunjuk dari sumber ancaman dan identitas yang terancam.¹⁶ Keberhasilan suatu aktor dalam menunjukkan suatu isu menjadi sebuah ancaman bergantung pada keberhasilan aktor dalam mewacanakan keamanan. Pola tersebut merupakan konsep yang dikembangkan oleh Weaver yang dikenal dengan istilah sekuritisasi.

Sekuritisasi memiliki tiga akar utama, yaitu *speech act*, pendekatan *Schmittian* terkait keamanan dan politik, serta asumsi yang ada di pendekatan keamanan tradisional. Apabila digabungkan, konsep 'keamanan' merupakan wacana dari keamanan nasional yang memiliki penekanan pada pihak yang memiliki otoritas yang mengkonstruksi ancaman atau musuh, yang memiliki kemampuan untuk membuat keputusan dan

¹⁵ Barry Buzan & Lene Hansen. 2009. *The Evolution of International Security Studies*, New York: Cambridge University Press, hal. 213.

¹⁶ *Ibid.*

melakukan penerapan tindakan darurat. Jadi, aktor keamanan memiliki kekuatan diskursif dan politik untuk melakukan sekuritisasi terhadap suatu isu.

Aktor keamanan melakukan sekuritisasi untuk menghilangkan suatu ancaman yang sifatnya non-tradisional; lingkungan, ekonomi, kemiskinan, dll. Perubahan eskalasi yang dilakukan aktor untuk merubah isu non-keamanan menjadi isu keamanan dilakukan melalui proses sekuritisasi. Terkait dengan hal ini, Buzan menyatakan bahwa:

“Traditionally, by saying “security,” a state representative declares an emergency condition, thus claiming a right to use whatever means are necessary to block a threatening development.”¹⁷

Dari argumen Buzan dapat terlihat bahwa negara merupakan aktor dalam proses sekuritisasi. Negara berhak melakukan sekuritisasi untuk melakukan tindakan terhadap suatu ancaman. Terdapat beberapa hal yang perlu untuk diperhatikan ketika negara melakukan proses sekuritisasi.

Pertama, proses sekuritisasi; aktor melakukan identifikasi terhadap suatu isu (politik atau nonpolitik) yang tujuannya mengubah isu tersebut menjadi isu keamanan. Aktor yang melakukan sekuritisasi disebut sebagai *securitizing actors*. Aktor didefinisikan oleh Buzan sebagai, *“who securitize issues by declaring something – a referent object – existentially threatened.”¹⁸* *Referent object* disini adalah suatu objek (negara atau masyarakat) yang dipandang secara eksistensial terancam dan harus diamankan. Pertanyaan selanjutnya apakah hanya negara yang merupakan aktor tunggal dalam melakukan sekuritisasi? Menurut Buzan ‘tidak’, pada prinsipnya sekuritisasi dapat dilakukan oleh siapapun.¹⁹ Akan tetapi, pada praktiknya, tindakan sekuritisasi cenderung dilakukan oleh pemimpin politik, birokrasi, pelobi, kelompok oposisi, serta kelompok organisasi lainnya.

Aktor melakukan sekuritisasi apabila suatu isu dinilai sangat mendesak. Terdapat beberapa klasifikasi isu, seperti: *Pertama*, isu publik (*non-politicised*) bahwa negara tidak mengambil tindakan terhadap isu tersebut. *Kedua*, politisasi, dimana isu yang ada dimasukkan negara sebagai *input* dalam suatu kebijakan. *Ketiga*, sekuritisasi, dimana negara menangani isu melalui tindakan cepat dan bahkan “melanggar” aturan hukum yang ada. Buzan memposisikan sekuritisasi sebagai:

“Security” is the move that take politics beyond established rules of the game and frames the issue either as a special kind of politics or as above politics. Securitization can thus be seen as a more extreme version of politicization.”²⁰

¹⁷ Barry Buzan, *Op. Cit.*, hal. 21.

¹⁸ Barry Buzan & Eric Herring. 1998. *The Arms Dynamic in World Politics*, Boulder: Lynne Rienner.

¹⁹ Barry Buzan & Lene Hansen, *Op. Cit.*, hal. 214.

²⁰ *Ibid.* Hal. 23.

Buzan menyatakan bahwa posisi dari keamanan berada pada bentuk khusus dari politik. Sekuritisasi dapat dilihat sebagai suatu hal yang lebih ekstrem dari politisasi. Sekuritisasi dapat dilakukan terhadap isu yang dipolitisasi maupun tidak, selama terdapat ancaman yang nyata dari isu yang ada. Jadi, apabila isu tersebut dapat dikatakan ancaman, maka aktor sekuritisasi dapat melakukan sekuritisasi. Suatu isu dapat dikatakan sebagai ancaman ketika negara melakukan tindakan wacana yang menyatakan isu tersebut merupakan ancaman, serta terdapat aktor lain (masyarakat) yang menyetujui hal tersebut. Proses inilah yang merupakan inti dari tindakan sekuritisasi.

Kedua, kondisi pendukung dalam proses tindakan sekuritisasi (*facilitating conditions*); merupakan keadaan yang memiliki kemampuan untuk memperkuat opini publik terhadap suatu ancaman yang disekuritisasi. *Ketiga*, unit analisa keamanan (*the units of security analysis: actors and referent objects*); yaitu aktor yang menjadi rujukan sekuritisasi (negara atau masyarakat). *Keempat*, Buzan kemudian menyebutkan *speech-act*, yaitu istilah yang dilakukan aktor sekuritisasi terhadap suatu isu yang dinilai sebagai ancaman. Adapun *speech-act* yang dilakukan berdasarkan pada:

*“Referent objects: things that are seen to be existentially threatened and that have a legitimate claim to survival. Securitizing actors: actors who securitize issues by declaring something a referent object-existentially threatened. Functional actors: actors who affect the dynamics of a sector. Without being the referent object or the actor calling for security on behalf of the referent object, this is an actor who significantly influences decisions in the field of security.”*²¹

Gagasan terkait *speech act* dapat dikaitkan dari filsuf J.L. Austin, yang menurutnya istilah *speech act* bukan hanya merujuk pada pernyataan melainkan juga tindakan.²² Wacana keamanan menjadi hal khusus dari kegiatan komunikatif untuk menghasilkan efek tertentu pada pendengar. Seperti yang dinyatakan oleh Waeber yaitu, *“‘security’ is to give what is proposed the particular significance attached to dealing with ‘existential threats’ and ‘extraordinary measures.’*”²³ Jadi, wacana atau penamaan mengenai keamanan digunakan untuk memberikan makna politik tertentu. Kata ‘keamanan’ dalam wacana politik menandakan prioritas. Jika presiden atau perdana menteri suatu negara mengumumkan bahwa bencana alam merupakan masalah ancaman terhadap keamanan, berarti segala sumber daya negara harus diprioritaskan dalam menghadapi ancaman tersebut.

Kelima, konstelasi sekuritisasi (*constellations of securitization*); proses pemetaan terkait *security complex*, yang bertujuan untuk menganalisis pola keterkaitan keamanan

²¹ Nuraini Chandrawaty. 2002. *Perkembangan Konsep-Konsep Keamanan dan Relevansinya terhadap Dinamika Keamanan Negara Berkembang*, Vol II, hal. 35 – 36.

²² Ken Booth, *Op. Cit.*, hal 106.

²³ *Ibid.* hal 108.

dari beberapa kompleksitas keamanan yang berbeda. Adapun analisis dapat dilakukan melalui tiga cara:

“Is the issue securitized successfully by any actors? If yes, track the links and interactions from this instance-how does the security of others, and where does this then echo significantly? These cains can then be collected as a cluster of interconnected security concerns.”²⁴

Analisis dari pola keamanan dapat dilihat melalui pendekatan yang digunakan untuk melihat korelasi antarsistem keamanan. Adapun proses yang dilalui meliputi tiga langkah, seperti: apakah isu tersebut diwacanakan oleh aktor sekuritisasi? Apabila ‘iya’, maka harus dicari bagaimana korelasi antara isu, aktor, dan interaksinya. Selanjutnya, korelasi antara tiga hal inilah yang nantinya dikumpulkan sebagai data untuk melihat korelasi dalam masalah keamanan. Selain itu, sekuritisasi turut terkait dengan terminologi ancaman yang bersifat nyata (*existential threat*), yang ancamannya berada pada beberapa sektor yang berbeda-beda, seperti: sektor ekonomi, sektor militer, sektor politik, sektor sosial, serta sektor lingkungan.

Lalu, bagaimana ketika suatu ancaman sudah diatasi? Sekuritisasi yang dilakukan terhadap suatu isu identik dengan penggunaan militer dalam mengatasinya. Apabila suatu ancaman dapat diatasi, isu keamanan yang ada diturunkan kategorinya menjadi isu politis melalui ‘*de-securitise*’.²⁵ Menurut Booth, pengkategorian suatu isu menjadi isu keamanan harus terlebih dahulu ditetapkan melalui kriteria yang ketat, sehingga dapat dibedakan dalam rangka mengatasi isu yang ada.²⁶ Selain itu, dukungan terhadap tindakan darurat turut menjadi *concern* dari aktor sekuritisasi dalam mengatasi ancaman.

Kontradiksi Konsep Sekuritisasi

Sekuritisasi yang berdasarkan pada pendekatan *Copenhagen school* merupakan suatu konsep yang tujuannya untuk berpikir secara kritis terkait keamanan. Ciri dari pendekatannya meliputi: fokus pada *political power* dan simbolisme kata ‘keamanan’, penggunaan seluruh sumber daya dalam mengatasi isu di luar *ordinary politics* dan memasukkannya ke dalam isu keamanan, serta menantang *mind-set* dari keamanan tradisional yang cenderung bersifat *zero-sum*.²⁷

Namun, terdapat beberapa asumsi dari konsep sekuritisasi di pendekatan *Copenhagen school* yang justru menimbulkan kontradiksi. Kontradiksi terlihat ketika sekuritisasi memasukkan nilai *survival* dan memisahkan keamanan dengan politik.

²⁴ *Ibid.* hal, 42 – 43.

²⁵ Ole Waever. 1995. *Securitization and Desecuritization*, New York: Columbia University Press, hal. 46 – 86.

²⁶ *Ibid.* hal 109.

²⁷ *Ibid.* hal 164.

Padahal, pengangkatan suatu isu menjadi isu keamanan, dititikberatkan pada aktor politik dalam merubah agenda isu non-keamanan menjadi keamanan. Argumen terkait sekuritisasi dikatakan bahwa:

*"We seek to find coherence not by confining security to the military sector but by exploring the logic of security itself to find out what differentiates security and the process of securitization from that which is merely political."*²⁸

Kata *'itself'* memberikan penekanan pada 'definisi ulang' mengenai apa yang dimaksud keamanan. Sementara itu, dua frase yaitu *'merely political'* dan *'security itself'* mengungkapkan pemisahan antara keamanan dan politik. Selain itu, apa yang dimaksud keamanan dari pendekatan *Copenhagen school* adalah wacana. Jadi, perhatian yang difokuskan terkait keamanan adalah keamanan apa dan keamanan terhadap siapa dalam konteks tertentu.²⁹ Pendekatan yang bersifat *discourse-centric* ini cenderung memiliki kelemahan, karena aktor dapat memanipulasi realitas, dimana ancaman yang tidak ada dapat dikonstruksi menjadi ada. Jadi, suatu isu yang 'tidak penting' dapat menjadi penting ketika aktor sekuritisasi yang menyatakan bahwa isu tersebut merupakan ancaman. Pertanyaannya, bagaimana dengan ancaman yang disuarakan oleh aktor yang tidak memiliki *power* bahkan suara politik? Tentu suatu isu memiliki kecenderungan tidak dapat diangkat menjadi isu keamanan.

Selain itu, sekuritisasi dinilai negatif dalam rangka penanganan suatu isu keamanan. Sekuritisasi dilakukan ketika gagalnya tindakan politik dalam menangani suatu isu.³⁰ Penilaian negatif dari sekuritisasi adalah ketika menangani suatu isu keamanan, terdapat nilai tradisional yang dianut yaitu militer, *zero-sum*, serta konfrontatif. Pendekatan ini justru bertentangan dengan semangat "menantang" pendekatan tradisional yaitu melalui identifikasi emansipasi.

Di satu sisi, konsep sekuritisasi berusaha membuka jalan bagi keamanan masuk ke teori politik dan perubahan politik yang progresif. Namun, di sisi lain, bahasa 'sekuritisasi' justru "membeku" dalam kerangka keamanan yang bersifat statis; militer, *zero-sum*, serta konfrontatif. Selain itu, kontradiksi dari konsep sekuritisasi terlihat dengan di satu sisi statis, akan tetapi di sisi lain keamanan dilihat sebagai *speech act* yang memiliki nilai positif, nonmiliter, serta konotasi yang tidak bersifat statis. Jadi, dapat terlihat bahwa sekuritisasi, seperti pendekatan keamanan tradisional, masih terjebak dalam pola pikir Perang Dingin.

²⁸ Barry Buzan, *Op. Cit.*, hal. 4-5.

²⁹ Barry Buzan, Ole Waever & Jaap de Wilde, (1998), *Security: A New Framework for Analysis*, Boulder, Colo: Lynner Rienner, hal. 21 – 48.

³⁰ *Ibid.* hal. 44.

Nilai statis yang dianut sekuritisasi dapat terlihat dari pernyataan Waever yaitu, “a conservative approach to security is an intrinsic element in the logic of both our national and international politics organizing principles.”³¹ Setiap asumsi radikal dari lembaga kajian cenderung kembali pada asumsi konservatif, termasuk ide yang bersifat *state-centric*.

Asumsi sekuritisasi yang bersifat *state-centric* cenderung membuat negara mendominasi wacana. Karena negara mendominasi wacana, berarti negara memiliki *power* untuk membuat *referent object* untuk diamankan. Hal ini membuat negara dapat menentukan *referent object* sesuai dengan kepentingannya (bahkan bukan untuk kepentingan dari *referent object* seperti masyarakat).

Nilai statis yang ada di konsep sekuritisasi terlihat dari penjelasan Buzan ketika sebuah isu disekuritisasi maka menjadi, “so important that it should not be exposed to the normal haggling of politics but should be dealt with decisively by top leaders prior to other issues.”³² Posisi aktor yang melakukan sekuritisasi menjadi sangat strategis, sebab apabila aktor meningkatkan isu non-keamanan menjadi isu keamanan, maka tidak ada lagi posisi tawar-menawar dalam rangka penyelesaian isu tersebut. Merujuk pada pernyataan Waever, “The Language game of security is... a just necessities for threatened elites, and this must remain.”³³ Kata ‘top leaders’ dan ‘threatened elites’ merupakan nilai dari *state-centric*, sedangkan ‘must remain’ adalah bahasa dari kelompok konservatif untuk tetap menjaga *status quo*.

Oleh karena itu, konsep sekuritisasi mengalami *suffer* karena sifatnya yang elitis. Aktor penting dalam sekuritisasi adalah ‘top leaders’, ‘negara’, elit yang terancam, dan ‘audiences’ yang memiliki *power* membuat agenda (isu keamanan). Jadi, aktor-aktor lain yang tidak memiliki *discourse power*, tidak dapat bergabung dalam “permainan” sekuritisasi.

Perspektif sekuritisasi yang bersifat *top-down* ini cenderung memberikan perhatian rendah pada hak asasi manusia.³⁴ Meskipun telah menempatkan individu sebagai fokus utama internasional sejak akhir 1940-an – dalam *Universal Declaration of Human Rights* – namun, tetap terdapat tantangan dari kedaulatan negara yang telah ada semenjak 350 tahun lalu. Jadi, nilai-nilai *state-centric* seperti *top-down* dan kegiatan apapun bertujuan untuk mencapai kepentingan penguasa – yang membuat penguasa memiliki *discourse power*. Mereka (aktor) yang berada di luar wacana tidak hanya diam, melainkan

³¹ Ken Booth, *Op. Cit.*, hal. 166.

³² Barry Buzan *et al*, *Op. Cit.*, hal. 29.

³³ Ole Waever, *Op. Cit.*, hal. 56.

³⁴ Ken Booth, *Op. Cit.*, hal. 166.

cenderung dibungkam.

Copenhagen school mengklaim memiliki pemikiran radikal melalui, “*to construct a more radical view of security studies by exploring threats to referent objects, and the securitization of those threats, that are non military as well as military.*”³⁵ Pemikiran radikal yang ditawarkan oleh *Copenhagen school* melalui sekuritisasi justru menjadi tidak jelas. Sebab, pendekatan ini memberikan *discourse power* terhadap aktor keamanan yaitu negara, yang membuat pemikiran ini cenderung *state-dominated/centric*. Menetapkan nilai keamanan seperti era Perang Dingin, dengan menggunakan militer untuk menyelesaikan suatu isu, justru membuat sekuritisasi cenderung statis dan konservatif.

Terkadang dapat dikatakan penyelesaian suatu isu tidak perlu menggunakan instrumen militer. Akan tetapi, terdapat beberapa isu yang memang membutuhkan instrumen militer. Perlindungan lingkungan maupun manusia misalnya, membutuhkan persiapan penggunaan kekuatan. Contohnya kapal perang yang berpatroli untuk menjaga zona ekonomi eksklusif dan penggunaan militer dalam mencegah genosida secara massif (seperti di Rwanda). Untuk *Copenhagen School*, jawaban dari ‘sekuritisasi’ adalah *de-sekuritisasi*. Namun, *de-sekuritisasi* tidak dapat menjadi ketentuan umum, jika hal tersebut berarti menurunkan arti penting beberapa isu (yang diberikan pemegang kekuasaan sebagai isu keamanan).

De-sekuritisasi menjadi instrumen sekuritisasi untuk menurunkan isu keamanan menjadi isu non-keamanan (isu politik). Dapat dikatakan bahwa *de-sekuritisasi* sebagai instrumen untuk memperlemah suatu isu. Isu yang telah *de-sekuritisasi* diselesaikan melalui politik biasa. Akan tetapi, isu keamanan terkadang ada di dalam wilayah politik biasa. Misal, politik rasisme yang terlembaga, justru berada pada wilayah politik biasa, tidak menjadi isu keamanan. Apabila dengan kondisi seperti itu, *desekuritisasi* merupakan milik dari pemegang kuasa; yang dapat mengubah isu *extraordinary* (seperti rasis) menjadi isu *ordinary*.

Menurut Booth, sekuritisasi dan *desekuritisasi* merupakan ide yang menarik, namun mengandung “kecacatan” karena membuat studi keamanan tidak progresif. Problem utama dari sekuritisasi adalah pemisahan antara politik dan keamanan, serta ide konservatif yaitu menyelesaikan isu melalui tindakan militer.³⁶ Booth yang berpendapat bahwa, “*Copenhagen School does not move far enough in the direction of ‘real people in real places’.*”³⁷ Booth melihat bahwa ‘*blunder*’ yang dilakukan pendekatan ini karena mengkorelasikan antara keamanan dan *survival*, sehingga pendekatan ini bersifat *state-centric, elit-centric, discourse-dominated*, konservatif, dan tidak progresif.

³⁵ Barry Buzan *et al*, *Op. Cit.*, hal. 4.

³⁶ Ken Booth, *Op. Cit.*, hal 169.

³⁷ *Ibid.*

Sekuritisasi turut dikritik atas ketidakmampuannya melakukan identifikasi. Lene Hansen memberikan istilah tersebut dengan *'the silent security dilemma'*. Istilah *'security as silent'* diartikan ketika subjek yang *insecure* tidak memiliki kemampuan untuk mengatakan isu keamanannya.³⁸ Selain itu, konsekuensi dari *'security as silence'* menjadi problem ketika penyelesaian suatu isu keamanan tidak lagi melalui logika politik (kompromi, debat, solusi). Menjadi masalah baru ketika segelintir elit memiliki hak istimewa (sebagai aktor keamanan) yang memiliki legitimasi menangguk hak dan kebebasan sipil dengan alasan keamanan.

Kritik terhadap sekuritisasi turut dinyatakan oleh Bigo dan Huysmans. Mereka berpendapat konseptualisasi dari sekuritisasi merupakan drama diskursus yang melewati (tidak melalui) rutinitas birokrasi, misal praktek yang dilakukan oleh polisi atau kelompok keamanan profesional lain.³⁹ Tindakan *extraordinary* yang dilakukan elit penguasa melalui sekuritisasi, membuat elit tersebut melakukan tindakan apapun untuk mencapai keamanan. Elit penguasa dapat menciptakan jaringan pengawasan (internet) untuk menciptakan sebuah 'keamanan negara', bahwa setiap orang berada dalam pengawasan.⁴⁰ Selain itu, elit penguasa memiliki legitimasi untuk mendapatkan kontrol atas proses politik dengan menekan *power* dari parlemen dan kelompok oposisi.

Akhirnya, seperti yang dinyatakan di atas, konsep sekuritisasi yang berdasar pada *Copenhagen School*, memiliki pijakan atas pemikiran Schmittian. Pemikiran Schmittian melihat keamanan sebagai bahaya dan karakter khusus dari politik keamanan.⁴¹ Karena sifatnya yang normatif, bukan empiris, membuat konsep sekuritisasi menghadapi beberapa pertanyaan dari perspektif Realisme dan Postrukturalisme, seperti: apa implikasi konsep ini terhadap keamanan dan identitas negara? Apakah negara bergantung pada musuh untuk mempertahankan identitas/kontrol atas penduduknya? Apakah logika dari konsep ini dapat diubah? Pertanyaan-pertanyaan tersebut perlu dijawab untuk memperkuat konsep sekuritisasi yang berdasarkan pada perspektif *Copenhagen School* dalam rangka "melawan" perspektif keamanan tradisional yang cenderung *perspective of the powerful, by powerful, for the powerful*.

³⁸ Lene Hansen, (2002), 'The Little Mermaid's Silent Security Dilemma and the Absence of Gender in the Copenhagen School', *Millennium*, vol 29(2), hal. 285 – 306.

³⁹ Didier Bigo. 2002. *Security and Immigration: Toward a Critique of the Governmentality of Unease*. *Alternatives*, 27: Supplement, hal. 73.

⁴⁰ *Ibid.* hal. 63 – 92.

⁴¹ Jef Huysmans. 1998. *Security! What do You Mean? From Concept to Thick Signifier*. *European Journal of International Relations*, 4:2, hal. 26 – 55.

Kesimpulan

Pendekatan *Copenhagen School* yang diajukan oleh Ole Waever, Barry Buzan, dll merupakan hasil pemikiran kritis terhadap studi keamanan yang didominasi oleh realisme dan terlalu membahas hal teknis seperti senjata, personil militer, dll. Pendekatan keamanan tradisional tersebut mengabaikan isu-isu seperti gender, kelas, dan ras.

Copenhagen school menambahkan objek rujukan dan 5 dimensi keamanan yaitu ekonomi, sosial, politik, lingkungan, dan militer. Sedangkan objek rujukan terdiri dari negara dan masyarakat. Suatu isu dapat dikatakan isu keamanan apabila aktor keamanan menyatakan melalui tindakan *speech act* bahwa isu tersebut merupakan ancaman (meskipun tadinya isu tersebut bersifat nonpolitik dan politik). Tindakan tersebut dikenal dengan istilah sekuritisasi, yang menjadi tawaran *Copenhagen school* terkait penyelesaian suatu ancaman.

Kelebihan dari konsep sekuritisasi ini adalah bisa digunakan sebagai alat (*tools*) bagi pemegang kekuasaan dalam menanggulangi suatu ancaman tanpa melalui logika politik, sehingga suatu isu lebih cepat untuk ditanggapi. Namun, sekuritisasi juga memiliki kelemahan karena kemungkinan penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*) para pemegang kekuasaan. Hak sipil dan hak oposisi akan lebih ditekan karena alasan penanggulangan ancaman melalui tindakan sekuritisasi.

Daftar Pustaka

- Bigo, Didier. 2002. *Security and Immigration: Toward a Critique of the Governmentality of Unease*. Alternatives, 27: Supplement.
- Booth, Ken. 2007. *Theory of World Security*, Cambridge: Cambridge University Press.
- Buzan, Barry & Hansen, Lene. 2009. *The Evolution of International Security Studies*. New York: Cambridge University Press.
- Buzan, Barry & Herring, Eric. 1998. *The Arms Dynamic in World Politics*. Boulder: Lynne Rienner.
- Buzan, Barry *et al.* 1993. *Identity, Migration, and the New Security Agenda in Europe*. London: Pinter.
- Buzan, Barry, Kelstrup, Morten, Lemaitre, Pierre, Tromer, Elzbieta & Waever, Ole. 1990. *The European Security Order Recast: Scenarios for the Post-Cold War Era*. London: Pinter.
- Buzan, Barry, Waever, Ole & de Wilde, de Jaap. 1998. *Security: A New Framework for Analysis*. Boulder, Colo: Lynner Rienner.

- Buzan, Barry. 1987. *Introduction to Strategic Studies: Military Technology and International Relations*. London: Macmillan.
- Buzan, Barry. 1991. *People, States and Fear: An Agenda for International Security Studies in the Post-Cold War Era*. Brighton: Harvester-Wheatsheaf.
- Chandrawaty, Nuraini. 2002. *Perkembangan Konsep-Konsep Keamanan dan Relevansinya terhadap Dinamika Keamanan Negara Berkembang*. Vol II.
- Hansen, Lene. 2002. *The Little Mermaid's Silent Security Dilemma and the Absence of Gender in the Copenhagen School*. Millennium, vol 29(2).
- Huysmans, Jef. 1998. *Security! What do You Mean? From Concept to Thick Signifier*. European Journal of International Relations 4:2.
- Luttwak, Edward N. 1985. *Strategy and History: Collected Essays*. New Brunswick: Transaction Books.
- Waeber, Ole. 1995. *Securitization and Desecuritization*. New York: Columbia University Press.
- Walt, Stephen M. 1991. *The Renaissance of Security Studies*. International Studies Quarterly. vol. 35 (2).
- Whitworth, Sandra. 2004. *Men, Militarism, and UN Peacekeeping: A Gendered Analysis*. Boulder Colo: Lynne Rienner.

ANALISIS KEUNGGULAN KOMPETITIF DAN KOMPARATIF MINYAK SAWIT MENTAH (CPO) INDONESIA DI PASAR GLOBAL

Denada Faraswacyen L. Gaol dan Tulus Yuniasih
df.lgaol@gmail.com, tulusyuniasih@live.com

Abstract

This research discusses about the competitive and comparative advantage of Indonesian palm oil (CPO) in global market as one of top 10 commodities of this country. CPO has an increasing demand due to its habitat in tropical region and its substitution nature for other natural oil such as soy oil that performs as the materials in industries. Such nature encourages the existence of competitors on this commodity from other tropical countries such as Malaysia and Thailand. Therefore, the main research question is on how the posture of competitive and comparative advantage of Indonesian CPO in global market is. To answer the question, this descriptive analytic research uses qualitative method. The analysis is conducted by secondary data under some concepts, such as 'competitive advantage' and 'comparative advantage', supported by the concept of 'strategy to penetrate the global market and globalization'. The results show that the comparative advantage side of Indonesian CPO is still dominant over its competitive advantage. However, the Government of Indonesia, and the CPO developers have done various efforts in advancing the quality of CPO and their other intangible resources such as the capability to increase the cooperation with many countries. Both are done in order to preserve and widen the Indonesian CPO market in the world.

Keywords: *crude palm oil, competitive advantage, comparative advantage, global market, globalization*

Pendahuluan

Saat ini pemerintah terus berusaha mendorong ekspor nonmigas. Hal ini dilakukan karena ekspor migas mulai mengalami penurunan sejak dekade tahun 90-an. Beberapa produk komoditi unggulan masih didominasi oleh produk-produk primer seperti hasil pertambangan, pertanian dan beberapa produk manufaktur yang bersifat *low technology* (*low tech*). Menurunnya ekspor migas memberi isyarat bagi Pemerintah untuk mengambil langkah kebijakan meningkatkan ekspor nonmigas. Hal ini dimaksudkan guna peningkatan penerimaan devisa negara, penyerapan tenaga kerja maupun penerimaan pajak.

Perdagangan minyak sawit mentah (CPO) Indonesia di pasar global menduduki peringkat kedua setelah Malaysia. Kebutuhan CPO dunia semakin meningkat dikarenakan CPO merupakan bahan baku untuk keperluan industri di berbagai bidang terutama yang berkaitan dengan industri hulu. Pangsa pasar global untuk ekspor CPO Indonesia masih

tersedia cukup besar mengingat pemain utama dalam komoditas CPO adalah Indonesia dan Malaysia. Berdasarkan tingkat produktivitas dan kualitas CPO, Indonesia berada di peringkat kedua setelah Malaysia, tetapi untuk luas lahan Indonesia lebih luas dan biaya produksi lebih rendah dibandingkan Malaysia. Untuk memasuki pasar global bisnis CPO dibutuhkan nilai lebih atau keunggulan daya saing komoditas CPO Indonesia agar dapat dilirik di pasar global.

Setiap negara di dunia ini tentu berusaha meningkatkan jumlah dan kualitas ekspor karena besarnya ekspor ini dapat menjadi indikator perekonomian Negara tersebut, misalnya Indonesia. Selama ini pemerintah terus berusaha mendorong ekspor terutama ekspor nonmigas. Beberapa komoditas ekspor utama Indonesia berdasarkan besarnya kontribusi terhadap nilai ekspor seluruhnya, antara lain batubara, tembaga, tekstil dan produk tekstil, alat-alat elektronik, minyak sawit, mesin dan peralatan mesin, produk kimia, lada, karet serta binatang dan *hush product*.

Era globalisasi dan perdagangan bebas saat ini mendorong persaingan semakin ketat. Berbagai negara terus berupaya meningkatkan daya saing produknya agar produk-produknya lebih efisien dan laku di pasaran. Untuk meningkatkan daya saing antara lain ditempuh beberapa langkah baik peningkatan efisiensi, menekan biaya produksi, perbaikan iklim usaha, perbaikan infrastruktur serta mengurangi berbagai bentuk pungutan.

Berbagai kebijakan pemerintah terkait diperlukan guna peningkatan daya saing karena pemerintah sendiri membutuhkan penerimaan negara melalui pajak terhadap industri, walaupun industri membutuhkan keringanan pajak dan pungutan lainnya. Hal ini merupakan dilema banyak negara berkembang seperti halnya Indonesia. Maka orientasi ekspor Indonesia banyak diarahkan produk-produk padat karya yang dapat menyerap tenaga kerja cukup besar, seiring dengan kebijakan pemerintah untuk mengatasi tingkat pengangguran.

Daya saing juga mengindikasikan terjadinya penguatan perekonomian domestik dengan orientasi dan daya saing global. Secara makro, teori globalisasi ekonomi dapat diartikan sebagai sebuah teori yang didasarkan atas asumsi perdagangan bebas/pasar bebas di seluruh dunia, tanpa adanya hambatan baik dalam bentuk tarif atau nontarif.¹ Namun secara mikro, globalisasi ekonomi dapat diartikan sebagai sebuah inisiatif bisnis yang didasarkan atas kepercayaan bahwa dunia telah menjadi sedemikian homogen, seiring dengan makin mengaburnya perbedaan nyata antarpasar domestik. Tentang kerja sama regional, Hamdy (2001; 88) mengemukakan bahwa kerja sama ekonomi dan keuangan,

¹ | Wibowo. 2004. *Belajar dari Cina*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.

khususnya di bidang perdagangan internasional, saat ini mengarah pada pembentukan kerja sama guna mewujudkan integrasi ekonomi dan keuangan secara regional.

Indonesia dengan produk komoditas unggulan yang masuk dan mampu bersaing di pasar global adalah minyak sawit mentah (*CPO*) dan karet. Kedua jenis komoditas ini bersaing dengan minyak sawit mentah (*CPO*) dan karet dari Negara tetangga Malaysia. Berdasarkan data-data yang dihimpun, Indonesia memiliki luas lahan lebih besar dibandingkan Malaysia untuk perkebunan kelapa sawit dan karet, namun dari sisi produktivitas dan kualitas komoditas dari Indonesia ini masih di bawah Malaysia. Banyak faktor lain yang menyebabkan minyak sawit dan karet dari Indonesia mengalami hambatan untuk menguasai pasar atau berkontribusi besar di pasar global, misalnya hambatan tarif dan nontarif yang diberlakukan oleh Negara importir dan pemerintah Indonesia sendiri.

Untuk memperkuat posisi komoditas di pasar global, suatu produk harus memiliki nilai lebih atau keunggulan kompetitif dibandingkan komoditas dari Negara pesaing. Proses identifikasi keunggulan kompetitif inilah yang perlu diteliti agar Indonesia mengetahui dan dapat memanfaatkan peluang dalam meraih posisi di pasar global. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan topik keunggulan kompetitif minyak sawit (*CPO*) Indonesia dalam memasuki pasar global. Meskipun fokus utama adalah pada keunggulan kompetitif, penelitian ini juga akan tetap membahas sedikit tentang keunggulan komparatif *CPO* yang telah banyak didiskusikan secara teori maupun praktis oleh berbagai pihak. Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, maka peneliti merumuskan masalah dalam penelitian ini yaitu “bagaimana keunggulan kompetitif dan komparatif minyak sawit (*CPO*) Indonesia dalam memasuki pasar global?”

Keunggulan Kompetitif

Kebijakan pemerintah untuk meningkatkan ekspor nonmigas guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan penerimaan devisa, pajak, serta peningkatan jumlah lapangan pekerjaan memerlukan pemahaman yang mendalam mengenai kondisi bisnis internasional. Bisnis internasional masa kini dihadapkan pada banyak tantangan. Tantangan tersebut dapat bersumber dari dalam negeri, dari luar negeri, yang dapat bersifat *transboundary* atau transnasional, juga bahkan dari dalam produk komoditas ekspor sendiri. Dalam era globalisasi yang seakan-akan menghilangkan batas negara, bisnis internasional menjadi cenderung lebih rentan terhadap tantangan yang berasal dari tantangan-tantangan

yang bersifat kontemporer seperti perubahan iklim, penjagaan lingkungan, ancaman keamanan internasional dan terorisme, krisis keuangan dan krisis terkait aset *subprime*, kredit macet berskala global, peningkatan harga sumber daya energi dan pangan, dan sebagainya.² Era globalisasi yang juga berimplikasi pada terbukanya pasar bebas membawa persaingan yang berat bagi eksistensi pelaku ekonomi. Sama seperti halnya kegiatan ekspor bagi semua komoditas, kegiatan ekspor CPO Indonesia juga dihadapkan pada berbagai tantangan eksternal, termasuk salah satu di antaranya adalah persaingan dengan negara lain sesama penghasil utama CPO bagi kebutuhan global.

Terdapat berbagai pendekatan terhadap dinamika dunia internasional di atas. Namun, perusahaan-perusahaan yang terbukti sukses dalam bisnis internasional mengambil kebijakan untuk memahami, mengakomodasi, dan mentransformasi tantangan tersebut³ menjadi sesuatu yang memiliki nilai jual lebih agar bisa dikenal dan memperoleh posisi dalam pasar internasional. Porter menyebut nilai lebih ini sebagai keunggulan kompetitif. Day&Wensley menyatakan bahwa keunggulan kompetitif berkelanjutan merupakan bentuk-bentuk strategi untuk membantu aktor ekonomi dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya. Pendapat tersebut didukung oleh Ferdinand (2003) yang menyatakan bahwa pada pasar yang kompetitif, kemampuan aktor menghasilkan kinerja, terutama kinerja keuangan, sangat bergantung pada derajat keunggulan kompetitifnya.⁴ Suatu aktor dikatakan memiliki keunggulan kompetitif ketika aktor tersebut mempunyai sesuatu yang tidak dimiliki pesaing, melakukan sesuatu lebih baik dari aktor lain, atau mampu melakukan sesuatu yang tidak mampu dilakukan oleh aktor lain.

Manajemen strategis, dengan fokus pada keunggulan kompetitif, memiliki satu unsur penting, yaitu *operational effectiveness*. Efektivitas operasional dikombinasikan dengan strategi adalah jalan (meskipun tidak menjamin) untuk kinerja yang unggul. Efektivitas operasional menginginkan kita untuk menampilkan sesuatu yang lebih baik dari lawan. Hal ini dapat dilakukan melalui pemanfaatan input, misalnya dengan cara mengurangi cacat pada produk atau membuat lebih cepat produk yang lebih baik.⁵ Namun, penelitian juga menunjukkan bahwa sumber daya tidak wujud (*intangible*), terutamanya kapabilitas, menjadi elemen yang lebih berpengaruh bagi terbentuknya keunggulan kompetitif yang berkelanjutan

² Ibeh, Kevin and Sheena Davies. 2009. *Perspectives on Contemporary Challenges to International Business*. Houndmills, Basingstoke, U.K.: Palgrave MacMillan, 1-10 dalam <http://www.aib-uki.org/Publicationsandresearch/Bookseries/Vol16.aspx>

³ *ibid*

⁴ Ferdinand, Augusty. 2003. *Sustainable Competitive Advantage: Sebuah Eksplorasi Model Konseptual*. Seri Penelitian Manajemen. No.2/Maret/2003.

⁵ <http://maaw.info/ArticleSummaries/ArtSumPorter96.htm> diakses 15 Oktober 2014, pukul 14:00 WIB

(*sustainable competitive advantage/SCA*) bagi pelaku bisnis internasional.⁶ Hal ini termasuk kemampuan berinovasi, kemampuan memproduksi, kemampuan mengelola pasar,⁷ internasionalisasi perusahaan, kemampuan dalam sumber daya manusia.⁸ Kapabilitas tersebut pun terbagi menjadi kapabilitas yang bersifat substantif dan dinamis.⁹ Kemampuan yang bersifat substantif merujuk pada kapabilitas yang dapat menyelesaikan masalah (*problem solving*) dan memberikan hasil (*outcome achievement*). Sementara, kapabilitas yang bersifat dinamis merujuk pada kemampuan dengan level yang lebih tinggi, yang mampu mengubah atau mengkonfigurasi kembali kapabilitas substantif yang ada. Namun, dibandingkan kedua kapabilitas tersebut, Gabrielsson & Gabrielsson (2009) lebih menekankan pentingnya jaringan (*networking capability*) dalam mensukseskan bisnis yang bersifat global.

Kombinasi yang baik antara efektivitas operasional dan strategi akan memberikan keuntungan lebih bagi aktor ekonomi. Posisi strategis dalam rangka menampilkan performa berbeda muncul dari tiga esensi, yaitu *variety-based positioning* (berbasis variasi produk industri dan jasa), *needs-based positioning* (berdasarkan kebutuhan pelanggan tertentu), dan *access-based positioning* (berbasis pada segmentasi pelanggan yang memiliki akses berbeda).¹⁰

Keunggulan Komparatif

Teori keunggulan komparatif menekankan bahwa spesialisasi dapat meningkatkan efisiensi produksi. Negara atau perusahaan dianjurkan untuk melakukan spesialisasi produksi dan ekspor pada produk yang mempunyai keunggulan komparatif dan mengimpor produk yang tidak mempunyai keunggulan komparatif. Dengan spesialisasi pada beberapa produk berarti tidak memproduksi produk yang lain, sehingga perdagangan antarnegara amat penting. Berdasarkan argumen ini, dapat dipahami mengapa perusahaan dapat memasuki pasar luar negeri.

Teori keunggulan komparatif ini mengalami evolusi sejak masa David Ricardo dan Bertil Ohlin yang dianggap sebagai pencetus karya klasik keunggulan komparatif, hingga

⁶ <http://www.aib-uki.org/Publicationsandresearch/Bookseries/Vol16.aspx> diakses pada 15 Oktober 14:25 WIB

⁷ http://www.uk.sagepub.com/chaston/Chaston%20Web%20readings%20chapters%201-12/Chapter%206%20-%2019%20Barney%20et%20al.pdf?origin=publication_detail. Journal of Management, diakses 15 Oktober 2014, pukul 15:00 WIB

⁸ Westhead, P., Wright, M. & Ucbasaran, D. 2001. *The Internationalization of New and Small Firms: A Resource-Based View*. *Journal of Business Venturing* 16(4): 333-358.

⁹ <http://www.marketing-trends-congress.com/archives/2008/Materiali/Paper/Fr/McGuinness.pdf>, diakses 15 Oktober 2014, pukul 16:00 WIB

¹⁰ <http://maaw.info/ArticleSummaries/ArtSumPorter96.htm>, diakses 16 Oktober 2014, pukul 10:00 WIB

Porter dan Krugman yang mencetuskan keunggulan komparatif yang dinamis. Menurut David Ricardo, negara sebaiknya memfokuskan pada produksi komoditas yang mempunyai keunggulan komparatif dibanding negara lain. Aspek yang dilihat adalah seberapa jauh produktivitas tenaga kerja dalam memproduksi suatu barang. Apabila dua negara masing-masing melakukan spesialisasi dalam memproduksi suatu barang yang mempunyai keunggulan produktivitas, maka keduanya akan mendapat keuntungan dari perdagangan.¹¹

Keunggulan komparatif versi Bertil Ohlin (ekonom Swedia) menyatakan bahwa faktor penentu keunggulan komparatif adalah keunggulan relatif dalam faktor *endowment*, yaitu ketersediaan relatif berbagai input yang dibutuhkan dalam proses produksi, baik berasal dari sumber daya alam, tenaga kerja, dan modal.¹²

Paradigma keunggulan komparatif dinamis dirintis oleh Michael E. Porter (1990) dan Paul Krugman (1980). Kedua ahli ini sepakat bahwa keunggulan komparatif dapat diciptakan (*created comparative advantage*). Dengan kata lain, mereka menentang teori Ricardo dan Ohlin yang cenderung memandang keunggulan komparatif yang “alami” (*natural comparative advantage*). Argumennya, faktor yang menopang tingkatan tertinggi dalam keunggulan komparatif harus diperbarui atau diciptakan setiap saat melalui penggunaan investasi modal fisik dan manusia agar diperoleh keunggulan komparatif dalam produk yang terdiferensiasi dan teknologi produksi (Meier dalam Kuncoro 2005).¹³ Oleh karena itu, dapat dipahami apabila industri yang memiliki keunggulan komparatif versi Ricardo dan Ohlin umumnya industri yang padat sumber daya (misal: kayu, beras) dan padat karya yang tidak terampil (misal: tekstil, rokok). Hal ini berlainan dengan industri yang memiliki keunggulan komparatif versi Krugman dan Porter, yang umumnya padat modal (misal: mesin, baja) dan padat teknologi (misal: komputer, pesawat terbang).

Negara-negara ASEAN, kecuali Singapura, yang mengandalkan ekspor produk yang bersifat *resource intensive* dan *unskilled labor-intensive* cenderung masih mengikuti pendapat Ricardo dan Ohlin. Empat macan Asia, yaitu Korea Selatan, Hongkong, Taiwan, Singapura, cenderung mengandalkan ekspor produk yang padat karya namun terampil (*skilled labor-intensive*) dan padat modal. Sedangkan Jepang lebih mengandalkan industri yang padat teknologi. Dengan kata lain, 4 macan Asia dan Jepang agaknya merupakan contoh yang baik dari tipe ekspor versi Porter dan Krugman.

¹¹ Kuncoro, Mudrajad. 2005. *Strategi: Bagaimana Meraih Keunggulan Kompetitif?*. Jakarta: Erlangga

¹² *ibid*

¹³ *ibid*

Teori Perdagangan Internasional

Ada dua alasan suatu negara melakukan perdagangan internasional. Pertama, setiap negara mempunyai perbedaan dalam pemilikan sumber daya alam dan pengolahannya. Kedua, negara-negara yang berdagang bertujuan untuk mencapai skala ekonomis (*economics of scale*) dalam produksi.¹⁴ Perbedaan antarnegara dalam pemilikan sumber daya tersebut memberikan peluang bagi terjadinya perdagangan antarnegara dan masing-masing menyumbangkan keuntungan perdagangan (*gains of trade*) bagi mereka.

Teori perdagangan internasional yang pertama dikemukakan oleh David Ricardo, jika suatu negara dapat memproduksi barang atau jasa lebih murah, maka negara tersebut akan memproduksi barang atau jasa tersebut dari pada membeli dari negara lain atau mengimpor dari negara lain. Tetapi kalau biaya produksinya relatif lebih mahal bila dibandingkan dengan ongkos produksi di negara-negara lainnya, maka barang atau jasa tersebut dibeli dari negara lain atau mengimpor dari negara lain. Barang atau jasa dengan ongkos produksi yang relatif lebih rendah, di samping bisa dikonsumsi sendiri, juga bisa diekspor. Perdagangan antarnegara memungkinkan terjadinya tukar-menukar barang dan jasa, pergerakan sumber daya dan pertukaran serta perluasan penggunaan teknologi yang dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi negara-negara yang terlibat di dalamnya.¹⁵ Tanpa perdagangan internasional maka harga pasar suatu produk di suatu negara akan berbeda dengan negara lain, dengan adanya perdagangan internasional harga yang terjadi akan sama.

Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan **pendekatan kualitatif** yaitu penelitian yang menggunakan latar ilmiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada.¹⁶ Penelitian kualitatif juga dimaksudkan untuk memahami tentang apa persepsi, tindakan dan lain-lain secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada konteks yang alamiah dengan metode ilmiah.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka penelitian ini lebih tepat menggunakan pendekatan kualitatif karena obyek penelitian ini diteliti dengan menggunakan data sekunder melalui studi literatur baik cetak maupun *online* (situs) dalam menggali data atau keterangan

¹⁴http://people.ucsc.edu/~hutch/241B/Ec%20241b%20SYLLABUS%20Winter%202010_files/obstfeld_modelsofcurrencycrises_selffulfilling_eer96.pdf, diakses 15 Oktober 2014, pukul 16:15 WIB

¹⁵ Salvatore Dominic, 1994. *Ekonomi Internasional*. Jakarta: Erlangga

¹⁶http://www2.warwick.ac.uk/fac/soc/al/degrees/ma/core/research_methodology/ma_introduction_to_qualitative_research_sm_kr.pdf diakses pada 17 Oktober 2014, pukul 09:15 WIB

berkaitan dengan keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif minyak sawit (*CPO*) Indonesia. **Metode penelitian** yang digunakan adalah metode deskriptif yaitu suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu obyek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antarfenomena yang diselidiki.¹⁷ **Objek penelitian** dalam penelitian ini adalah keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif minyak sawit (*CPO*) Indonesia. **Jenis data** pada penelitian ini adalah data sekunder, yaitu kumpulan data lain yang mendukung penelitian ini, diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*) yang berhubungan dengan teori, informasi tentang hal-hal yang berkaitan dengan landasan teori, serta konsep-konsep ilmiah yang diperlukan pada saat analisis, juga dokumen dan catatan yang meliputi dokumen pribadi dan dokumen resmi. **Teknik Analisis Data** dalam penelitian ini yaitu berdasarkan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Kategorisasi dan reduksi data. Di sini, peneliti mengumpulkan informasi-informasi yang penting dari sumber data sekunder yang terkait dengan masalah penelitian, dan selanjutnya mengelompokkan data tersebut sesuai dengan topik masalahnya.
- b. Sajian data. Data yang terkumpul dan telah dikelompokkan itu kemudian disusun sistematis sehingga peneliti dapat melihat dan menelaah komponen-komponen penting dari sajian data.
- c. Penarikan kesimpulan. Pada tahap ini, peneliti melakukan interpretasi data sesuai dengan konteks permasalahan dan tujuan penelitian. Dari interpretasi yang dilakukan, maka diharapkan akan diperoleh kesimpulan dalam menjawab masalah penelitian.¹⁸

Pembahasan Hasil Penelitian

Analisis mengenai keunggulan kompetitif dan komparatif produk *CPO* Indonesia dapat dimulai dari proses memahami tantangan-tantangan yang dihadapi produk *CPO* Indonesia. Tantangan terhadap produk *CPO* Indonesia bukan hanya berasal dari dalam wilayah Indonesia, tetapi juga dari luar wilayah Indonesia. Selain itu, analisis terhadap tantangan dapat dilihat dari sisi struktural, sistem, proses produksi juga dari sisi produk. Dengan menganalisis tantangan-tantangan yang dihadapi produk *CPO* Indonesia, tim peneliti kemudian memberikan analisis mengenai proses identifikasi keunggulan kompetitif, dan juga

¹⁷ Nazir, Moh. 2005. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.

¹⁸ Bungin, Burhan. 2003. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.

komparatif, produk *CPO* Indonesia serta pengwujudan posisi keunggulan kompetitif dan komparatif produk *CPO* Indonesia ketika harus berhadapan dengan pasar yang dinamik serta dengan produk-produk *CPO* negara lain.

Sawit merupakan komoditi utama keempat Indonesia di bawah TPT, Elektronik dan Karet.¹⁹ Meskipun demikian, *CPO* Indonesia tidak termasuk dalam 23 komoditi yang diawasi mutunya oleh pemerintah.²⁰ Kementerian Pertanian Republik Indonesia juga telah mengidentifikasi beberapa macam keunggulan kompetitif *CPO* Indonesia yaitu berupa inovasi produk turunan.²¹ Satu yang sudah diakui memiliki nilai kompetitif tinggi adalah lilin. Pada tahun 2011, di antara turunan produk ketiga yang akan dikembangkan adalah *fatty acid*, *fatty alcohol*, *biodiesel*, nonpangan lain seperti *epoxy compound*, *ester compound*, lilin, kosmetik, pelumas, tandan kosong untuk bahan kertas (*pulp*), pupuk hijau (kompos), karbon, rayon; cangkang biji untuk bahan bakar dan karbon; serat untuk *fibre board* dan bahan bakar; batang pohon dan pelepah untuk mebel *pulp paper* dan makanan ternak yang dapat menggunakan limbah kernel dan *sludge*.

Perwujudan posisi keunggulan kompetitif dan komparatif *CPO* Indonesia dari segi pengurangan waktu produksi dapat bersumber dari perluasan wilayah perkebunan dan pengembangan kawasan industri. Pada bagian sebelumnya telah dijelaskan bahwa pemerintah Indonesia berencana memperluas lahan perkebunan kelapa sawit di Papua. Hal ini dilakukan karena keterbatasan ketersediaan lahan di kawasan Sumatera dan Kalimantan. Lebih lanjut, pemerintah Indonesia memberlakukan moratorium hutan sehingga tahun 2011. Sampai dengan tahun 2010, pemerintah telah melakukan penuntasan masalah tata ruang nasional dengan pertumbuhan areal tanam sebesar 6,7 persen per tahun.²² Meskipun demikian, Kementerian Perindustrian telah menyatakan pada tahun 2011 bahwa pemerintah tetap berupaya untuk mengembangkan kawasan industri di wilayah yang sudah berkembang terlebih dahulu yaitu Sumatera dan Kalimantan.²³

Pemerintah juga terus berupaya untuk menghadapi standar hijau yang sempat menghambat laju ekspor *CPO* Indonesia dengan meningkatkan inovasi produk bermutu tinggi. Dalam KTT APEC 2012, proposal pemerintah Indonesia untuk memasukkan produk

¹⁹ Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, "Profil Ekonomi: Negara Tujuan Ekspor 10 Komoditi Utama", <http://www.kemendag.go.id/id/economic-profile/10-main-and-potential-commodities/10-potential-commodities> diakses pada 2 Maret 2014

²⁰ Kemendag, 2012, Kajian Kebijakan Mutu dan Standar Produk Ekspor Tertentu dalam Meningkatkan Daya Saing, Laporan Akhir, Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Perdagangan, Pusat Kebijakan Perdagangan Luar Negeri, Jakarta, hal. 11.

²¹ Kementerian Perindustrian RI, 2011, Outlook Industri 2012: Strategi Percepatan dan Perluasan Agroindustri.

²² Ibid.

²³ Ibid.

CPO Indonesia ke dalam *EG list* mengalami penolakan karena belum memenuhi ambang batas emisi gas rumah kaca. Namun, dalam KTT APEC 2013, proposal pengajuan CPO Indonesia dalam *EG list* juga masih belum mendapat persetujuan karena permasalahan proses pemasukan yang memerlukan waktu yang cukup panjang.²⁴ Artinya, CPO Indonesia telah mencapai standar produk ramah lingkungan, karena pencantuman produk CPO Indonesia di dalam *EG list* hanya terkendala proses yang lama. Oleh karena itu, dapat disimpulkan pula bahwa telah terdapat peningkatan mutu atau kualitas CPO Indonesia dalam aspek sebagai produk yang ramah lingkungan karena produksinya tidak melebihi batas emisi gas rumah kaca. Faktor peningkatan standar ini tentu saja dapat menjadi modal peningkatan keunggulan kompetitif produk CPO Indonesia dibandingkan produk CPO negara pesaing.

Komitmen pemerintah dalam mewujudkan keunggulan kompetitif CPO Indonesia juga diwujudkan dalam penerbitan ISPO (*Indonesian Sustainable Palm Oil*) pada tahun 2011.²⁵ Sebelumnya, Indonesia berkomitmen kepada sertifikasi *Roundtable on Sustainable Palm Oil* (RSPO). Namun, beberapa pengusaha yang tergabung dalam GAPKI memiliki perspektif bahwa RSPO yang hanya 17% keputusannya mewakili negara produsen (*grower*), menciptakan posisi tawar yang lebih tinggi bagi para pembeli, bahkan LSM, dibanding bagi negara-negara produsen.²⁶

Pemerintah mewajibkan seluruh perkebunan kelapa sawit untuk telah memiliki ISPO pada tahun 2014. Pada Februari 2014, kurang dari 40% atau hanya sejumlah 40 perkebunan yang telah memiliki ISPO.²⁷ Sisanya, yaitu sebanyak 73 perkebunan, telah dalam proses mendapatkan ISPO. Meskipun demikian, masih terdapat tantangan terutama dari kerusakan lingkungan yang dihasilkan dari produksi CPO. Hal ini dapat dilihat dari izin tanam oleh pemerintah yang meningkat secara signifikan. Di Kalimantan Barat, izin per Juni 2013, hanya diberikan kepada pembukaan bagi 1,5 juta hektar tanah. Sedangkan, pada Januari 2014, izin yang telah diberikan mencapai 4 juta hektar. Dengan kata lain, dalam waktu setengah tahun, luas area tanam meningkat lebih dari 100%.

²⁴ Kompas, (23 Oktober 2013), Mentan: RI Tidak Gagal Memasukkan CPO dalam Daftar Ramah Lingkungan, <http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2013/10/23/1826490/Mentan.RI.Tidak.Gagal.Memasukkan.CPO.dalam.Daftar.Ramah.Lingkungan> diakses pada 2 Maret 2014.

²⁵ Hanim Adnan, (8 Maret 2014), Standard for Sustainability, The Star Online, <http://www.thestar.com.my/Business/Business-News/2014/03/08/Standard-for-sustainability-The-Malaysian-Sustainable-Palm-Oil-MSPO-standard-paves-the-way-for-ou/?style=biz> diakses pada 29 Agustus 2014.

²⁶ Tuti Ermawati dan Yeni Saptia, 2013, "Kinerja Ekspor Minyak Kelapa Sawit Indonesia", *Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan*, Vol. 7 No. 2, hal 142.

²⁷ Berita Pertanian Online, (14 Februari 2014), Tahun Ini Seluruh Perkebunan Kelapa Sawit Harus Punya ISPO, Departemen Pertanian RI, <http://www.pertanian.go.id/news/detail.php?id=1165&awal=0&page=> diakses pada 2 Maret 2014.

Terkait dengan kebijakan pelabelan produk makanan di Eropa yang akan mulai diimplementasikan pada Desember 2014, pemerintah Indonesia telah berupaya untuk menghadapi tantangan tersebut dengan cara meyakinkan negara *partner*-nya di Eropa, terutamanya Belanda. Pelabuhan Rotterdam, Belanda, merupakan pintu masuk utama produk *CPO* Indonesia ke negara-negara di Eropa. Pada saat yang sama, Belanda juga merupakan pelaku re-ekspor terbesar di Eropa. Oleh karena itu, para distributor *CPO* Indonesia serta para pelaku industri makanan dan produk olahan *CPO* di Belanda akan mengalami kerugian besar jika Indonesia tidak dapat mencapai standar pelabelan tersebut. Pada November 2013, Pemerintah Indonesia dan Belanda telah sepakat untuk bekerjasama dalam mempromosikan produksi *CPO* ramah lingkungan serta peningkatan perdagangan *CPO* Indonesia.²⁸ Dalam kesepakatan tersebut, Pemerintah Indonesia menyatakan komitmennya untuk menghentikan produksi minyak sawit yang tidak ramah lingkungan secara total dalam beberapa tahun lagi.

Sedangkan, analisis keunggulan kompetitif *CPO* Indonesia terhadap *CPO* Ghana akan tim peneliti sajikan kemudian. Tim peneliti mendapati bahwa keunggulan kompetitif dan komparatif *CPO* Indonesia masih tinggi dibandingkan Ghana terlihat dari penguasaan pangsa pasar negara-negara pengimpor utama *CPO* Indonesia. Namun, *CPO* Ghana masih menguasai pangsa pasar Afrika secara dominan. Tim peneliti berpendapat bahwa faktor utama dari hal ini berasal dari letak geografis yang menguntungkan Ghana dibandingkan Indonesia.

Meskipun Indonesia masih menjadi penghasil *CPO* terbesar di dunia, produk *CPO* negara tersebut masih menerima tantangan dari adanya dinamika dalam proses permintaan-penawaran serta produksi *CPO* itu sendiri. Dinamika tersebut berlangsung tidak hanya pada level nasional bahkan mikro, tetapi juga pada level internasional. Di antara tantangan-tantangan tersebut adalah penurunan permintaan *CPO* Indonesia, standar hijau dari beberapa negara pengimpor terutamanya dari Uni Eropa, peningkatan harga *CPO*, terbatasnya produksi turunan *CPO*, yang sebagian besar dari faktor-faktor di atas justru menyumbang kepada analisis bahwa keunggulan komparatif komoditi *CPO* masih tinggi dibandingkan dengan keunggulan kompetitifnya.

Volume ekspor *CPO* dunia sejak tahun 2009 hingga kini sempat mengalami penurunan pada tahun 2010. Meskipun rata-rata volume ekspor dunia kembali terus meningkat setelah

²⁸ CBI, "Netherlands and Indonesia join hands for sustainable palm oil", <http://www.government.nl/news/2013/11/22/netherlands-and-indonesia-join-hands-for-sustainable-palm-oil.html> diakses pada 25 Oktober 2014.

itu, terdapat perlambatan peningkatan pada tahun 2013. Menurut data *UN Comtrade*, jumlah ekspor *CPO* dunia pada tahun 2009 dari 61 negara mencapai 3,56 Juta ton.²⁹ Jumlah tersebut belum termasuk ekspor dari Indonesia. Berdasarkan laporan dalam *Indonesian Commercial Newsletter (ICN)* bulan November 2009, sehingga bulan September 2009, ekspor Indonesia tercatat sebanyak 14,9 Juta ton.³⁰ Berdasarkan GAPKI, ekspor Indonesia pada tahun 2009 mencapai 15,5 Juta ton.³¹ Sedangkan, pada tahun 2010, total volume ekspor *CPO* dunia dari 70 negara hanya tercatat sebesar 13,16 Juta ton atau rata-rata sebesar 188 Ribu ton.³² Hal ini menunjukkan adanya penurunan signifikan.

Meskipun demikian, total ekspor *CPO* dari 67 negara pada tahun 2011 sebesar 14,18 Juta ton, dengan rata-rata sekitar 211 Ribu ton atau meningkat sebesar 12%. Volume ekspor terlihat kembali meningkat pada tahun 2012 dengan total ekspor *CPO* dari 68 negara sejumlah 16,57 Juta ton, dengan rata-rata mencapai 243 Ribu ton atau meningkat sebesar 15%. Meskipun demikian, peningkatan juga berlaku pada tahun 2013 yaitu total ekspor dari 51 negara mencapai 14,14 Juta ton, dengan rata-rata hampir mencapai 278 Ribu ton atau meningkat hanya sebesar 14%.

Dinamika volume ekspor *CPO* dunia tersebut tidak diiringi dengan peningkatan harga rata-rata *CPO* dunia. Harga rata-rata *CPO* dunia meningkat secara signifikan pada tahun 2011, namun mengalami penurunan sejak tahun 2012. Meskipun demikian, seperti halnya perlambatan peningkatan rata-rata volume ekspor *CPO* dunia, penurunan rata-rata nilai ekspor *CPO* dunia juga mengalami perlambatan.

Pada tahun 2010, nilai total ekspor *CPO* dunia sebesar sekitar 10,65 Juta dolar AS. Sementara itu, pada tahun 2011, nilainya mencapai 14,69 Juta dolar AS. Sehingga, meskipun volume ekspor *CPO* dunia naik sebesar 1 Juta ton, nilai *CPO* naik sebesar 4 Juta dolar AS. Peningkatan nilai atau harga *CPO* dunia juga dapat dilihat dari rata-rata nilai hasil ekspor *CPO* dunia sebesar sekitar 152 Ribu dolar AS pada tahun 2010. Sedangkan, pada tahun 2011, nilainya mencapai 219 Ribu dolar AS. Hal ini menandakan harga rata-rata *CPO* dunia yang meningkat tajam. Berbeda dengan tahun berikutnya, yaitu di tahun 2012, bahwa total nilai ekspor *CPO* dunia hanya sebesar 13,12 Juta dolar AS atau turun sebesar sekitar 1

²⁹ United Nations Statistic Division, Commodity Trade Statistic Database (COMTRADE), <http://comtrade.un.org> diakses pada 27-29 Agustus 2014.

³⁰ Indonesian Commercial Newsletter (ICN), (November 2009), Industri Palm Oil di Indonesia, Laporan Market Intelligence, <http://www.datacon.co.id/CPO1-2009Sawit.html> diakses pada Agustus 2014.

³¹ Indonesian Commercial Newsletter (ICN), (November 2009), Industri Palm Oil di Indonesia, Laporan Market Intelligence, <http://www.datacon.co.id/CPO1-2009Sawit.html> diakses pada Agustus 2014.

³² United Nations Statistic Division, Commodity Trade Statistic Database (COMTRADE), <http://comtrade.un.org> diakses pada 27-29 Agustus 2014.

Juta dolar AS meskipun secara volume meningkat sekitar sebesar 2,35 Juta ton. Secara rata-rata nilai ekspor pun hanya hampir mencapai 193 Ribu dolar AS atau turun sebesar 12%.

Pada tahun 2013, peningkatan rata-rata volume ekspor CPO dunia sebesar 14% kembali tidak diiringi dengan peningkatan rata-rata nilai CPO dunia. Rata-rata nilai ekspor CPO dunia hanya mencapai 182 Ribu dolar AS atau turun sekitar 5%. Meskipun pada Oktober 2013, harga CPO meningkat sebesar 5%³³, penurunan harga CPO kembali berlaku pada tahun 2014. Hal ini juga didukung dengan adanya penurunan harga jual rata-rata (*average selling price/ASP*) CPO dunia di Rotterdam pada bulan Juni 2014 yang turun 1.7% dari harga pada bulan April 2014. Pada Juni 2014, nilai jual CPO hanya berkisar 875 – 950 dolar AS per metrik ton.³⁴

Analisis di atas juga menunjukkan bahwa pada dasarnya, produk CPO masih bergantung pada keunggulan komparatif. Kuatnya sisi keunggulan komparatif komoditi ini terlihat dari terdapatnya penawaran dengan harga yang lebih rendah yang muncul beriringan dengan permintaan yang lebih tinggi. Meskipun demikian, penarikan kesimpulan seperti ini masih sangat mentah jika tidak disertai dengan data perspektif dari negara pengimpor. Data perspektif negara pengimpor akan diberikan kemudian dalam pembahasan pada subbab ini ketika mendiskusikan penurunan permintaan CPO Indonesia oleh negara pengimpor, peningkatan harga CPO, serta tantangan yang berasal dari negara pesaing.

Tren meningkatnya volume ekspor CPO dunia tidak terlihat pada produk ekspor CPO Indonesia. Berikut data ekspor CPO Indonesia kepada 18 *partner* ekspor CPO Indonesia yang konsisten terdaftar menerima ekspor CPO Indonesia pada periode tahun 2010 – 2013.

**Volume Ekspor CPO Indonesia tahun 2010 – 2013
Berdasarkan Negara Tujuan dan
Peringkat Negara Tujuan Berdasarkan Volume Ekspor**

Pengimpor	2010	N	2011	N	2012	N	2013	N
India	4,449,537,3	1	4,257,407,84	1	3,614,821,30	1	3,099,284,41	1
Belanda	948,460,74	3	602,824,545	4	1,109,525,56	2	1,094,672,55	2
Italia	623,809,65	4	486,685,403	5	577,442,758	5	683,551,748	3
Singapura	573,156,08	5	632,820,778	3	634,581,769	3	544,925,273	4
Spanyol	296,850,03	7	321,020,083	6	198,678,145	6	421,572,267	5
Jerman	328,191,96	6	206,626,402	7	138,777,758	7	227,739,974	6

³³ UNCTAD, "Recent developments and new challenges in commodity markets, and policy options for commodity-based inclusive growth and sustainable development", Materi dalam Agenda Khusus No. 3, Pertemuan Para Ahli Komoditas dan Pembangunan Multi-tahun, Sesi ke-6, 9-10 April 2014, Jenewa, hal. 5

³⁴ Ayu Prima Sandi, (19 Juni 2014), High CPO Export Improves Trade Balance, Tempo.Co, <http://en.tempo.co/read/news/2014/06/19/056586556/High-CPO-Export-Improves-Trade-Balance> diakses pada 27 Agustus 2014.

Malaysia	1,318,387,0	2	1,244,231,93	2	587,265,833	4	182,197,585	7
Tanzania	102,777,00	12	144,744,850	8	95,498,648	8	75,699,437	8
Kenya	15,522,000	18	76,294,534	11	52,125,492	11	67,249,000	9
Pakistan	15,000,000	15	37,644,254	13	9,199,996	17	51,489,727	10
Tiongkok	108,827,00	10	28,301,658	15	33,198,778	12	39,127,355	11
Ghana	14,000,097	17	6,500,000	22	5,250,000	20	19,999,970	12
Denmark	10,038,000	22	16,244,014	16	11,000,297	15	10,870,252	13
Maroko	6,500,000	26	8,104,917	19	6,650,000	18	6,000,065	14
Bangladesh	115,533,60	11	114,214,911	9	25,998,134	13	5,499,917	15
Yunani	10,462,925	23	6,066,625	20	8,361,572	16	5,218,625	16
Kamerun	11,249,082	20	10,074,997	18	5,000,000	21	3,000,000	17
Mesir	21,164,000	14	14,019,540	17	11,399,639	14	3,001,000	18
Total	8,969,466,6		8,213,827,29		7,124,775,69		6,541,099,16	

Sumber: Laporan Indonesia kepada *UN Comtrade*, 2010 – 2013.³⁵

Sejak tahun 2010, jumlah total ekspor *CPO* Indonesia kepada 18 negara *partner* tersebut mengalami penurunan yang signifikan hingga tahun 2012. Penurunan tetap terjadi pada jumlah ekspor *CPO* Indonesia tahun 2013, namun, persentase penurunannya tidak sebesar pada dua tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat prospek peningkatan keunggulan komparatif atau keunggulan kompetitif dari produk *CPO* Indonesia. Pada tahun 2010, jumlah ekspor *CPO* Indonesia kepada 18 negara mencapai 8,9 Miliar ton. Jumlah ini menurun sebesar sekitar 8,3% pada tahun 2011. Pada tahun 2012, volume ekspor *CPO* Indonesia kembali menurun sebesar sekitar 13,2% dari tahun 2011 kepada hanya 7,1 Miliar ton. Kemudian, jumlah tersebut kembali turun kepada sekitar 6,5 Miliar ton pada tahun 2013, atau berkurang sebesar 8,1%.

Meskipun demikian, Indonesia masih menjadi eksportir utama *CPO* dunia. Pada tahun 2010, produk *CPO* Indonesia mencapai 71% produk *CPO* dunia yang berasal dari 62 negara. Meskipun laporan pada tahun 2013 hanya mencakup 51 negara, Indonesia masih merupakan pengekspor terbesar. Volume ekspor Indonesia mencapai 46,45% dari total ekspor *CPO* dunia.

Pada tahun 2012, Kementerian Perindustrian RI telah mengidentifikasi tiga permasalahan utama yang berasal dari internal negara yang dihadapi oleh produk kelapa sawit Indonesia. Adapun tantangan-tantangan tersebut terdapat pada industri hilir, pajak serta infrastruktur pendukung industri berupa akses kepada sumber daya dan kepada pasar yang masih belum memadai.³⁶ Kapasitas untuk menghasilkan produk-produk turunan *CPO*

³⁵ United Nations Statistic Division, Commodity Trade Statistic Database (COMTRADE), <http://comtrade.un.org> diakses pada 27-29 Agustus 2014.

³⁶ Kementerian Perindustrian RI, 2011, Outlook Industri 2012: Strategi Percepatan dan Perluasan Agroindustri.

yang beragam dan bermutu masih terbatas. Keterbatasan ini bersumber dari kualitas riset, teknologi, serta SDM yang masih perlu untuk ditingkatkan. Hal ini berdampak pada terciptanya *idle capacity* terutama pada bagian *refinery* atau pengolahan. Lebih lanjut, hal ini juga menyebabkan rantai nilai industri yang kurang efisien, yang biaya produksi pada akhirnya tinggi dan menghasilkan produk turunan harus dijual dengan harga yang lebih mahal. Peningkatan harga tersebut tentu saja akan berakibat pada kurangnya daya saing atau keunggulan komparatif (*comparative advantage*) CPO Indonesia.

Daftar Pustaka

Buku

- Brandi, Clara, *et.al.* 2013. *Sustainability certification of Indonesian palm oil sector: Benefits and challenge for smallholders*. Bonn: DIE.
- Cravens, David W. 2000. *Strategic Marketing 6th Edition*. Texas: Irwin Mc-Graw Hill.
- Ferdinand, Augusty. 2003. *Structural Equation Modeling dalam Penelitian Manajemen*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Gujarati, D. 2001. *Ekonometrika Dasar, Edisi Kelima*. Jakarta: Erlangga.
- Hamdy, Hadi. 2001. *Ekonomi Internasional: Teori dan Kebijakan Keuangan Internasional*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Hutauruk, A. 2005. *Ekspor Impor, Teori dan Penerapannya*. Jakarta: Pustaka Binaman Pressindo.
- Indrarto, Giorgio Budi. *et.al.* 2013. *Konteks REDD+ di Indonesia: Pemicu, pelaku dan lembaganya, Working Paper 105*. Bogor: CIFOR.
- Jhingan, ML. 2006. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Edisi Pertama. Penerjemah D. Guritno. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Katsioloudes, Mario I. dan Spyros Hadjidakis. 2007. *International Business: A Global Perspective*. Oxford: Elsevier.
- Kementerian Perdagangan RI. 2009. *Dampak Pengeanaan Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemical (REACH) terhadap Ekspor Non-Migas Indonesia di Pasar Uni Eropa*. Jakarta: Puslitbang Perdagangan Luar Negeri, Badan Litbang Perdagangan.

Kementerian Perindustrian RI. 2011. *Outlook Industri 2012: Strategi Percepatan dan Perluasan Agroindustri*.

Millar, Carla C.J.M, et.al. 2000. *International Business: Emerging Issues and Emerging Markets*. Hampshire: Macmillan Press LTD.

Nazir, M. 2005. *Metodologi Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.

O'Connor, Aidan M (Ed.). 2010. *Managing Economies, Trade and International Business*.

Simanjuntak, Yosua H., et.al. 2009. *Dampak Pengecanaan Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemical (REACH) terhadap Ekspor Non Migas Indonesia di Pasar Uni Eropa*. Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Perdagangan Luar Negeri, Badan Penelitian dan Pengembangan Perdagangan.

Soekartawi. 2002. *Prinsip Ekonomi Pertanian*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Wibowo. 2004. *Belajar dari Cina*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.

Winardi. 2006. *Ekonomi Internasional*. Cetakan Kelima. Jakarta: Rineka Cipta.

Sumber Lain

Adnan, Hanim. (8 Maret 2014). Standard for Sustainability. *The Star Online*. <http://www.thestar.com.my/Business/Business-News/2014/03/08/Standard-for-sustainability-The-Malaysian-Sustainable-Palm-Oil-MSPO-standard-paves-the-way-for-ou/?style=biz> diakses pada 29 Agustus 2014.

Afonso, Swansy. (14 Maret 2014). "Palm Imports by India Tumble to Lowest in 34 Months on Prices". *Bloomberg*. <http://www.bloomberg.com/news/2014-03-14/palm-imports-by-india-tumble-to-lowest-in-34-months-on-prices.html> diakses pada 27 Agustus 2014.

Alam, S. M. "Role of oil palm in economy". *Agri Overview*. <http://www.pakissan.com/english/agri.overview/role.of.oil.palm.in.economy.shtml> diakses pada 25 Oktober 2014.

Amri, Qayuum. (22 Februari 2014). "Ekspor Sawit Terganggu Masalah Pelabuhan dan Kepabeanan". *Sawit Indonesia Online!*. <http://www.sawitindonesia.com/kinerja/ekspor-sawit-terganggu-masalah-pelabuhan-dan-kepabeanan> diakses pada 2 Maret 2014.

Antara. "Turki Minta Indonesia Tingkatkan Ekspor CPO". http://djpen.kemendag.go.id/app_frontend/accepted_rsses/view/530ed2 diakses pada 2 Maret 2014.

- Asia Briefing*. 2014. "Malaysia-Indonesia Tax Battle Set to Boost Crude Palm Oil Sales". <http://www.asiabriefing.com/news/2014/09/malaysia-indonesia-tax-battle-set-boost-crude-palm-oil-sales/> diakses pada 25 Oktober 2014.
- Berita Pertanian Online*. (14 Februari 2014). "Tahun Ini Seluruh Perkebunan Kelapa Sawit Harus Punya ISPO". <http://www.pertanian.go.id/news/detail.php?id=1165&awal=0&page=> diakses pada 2 Maret 2014.
- CBI, "Netherlands and Indonesia join hands for sustainable palm oil", <http://www.government.nl/news/2013/11/22/netherlands-and-indonesia-join-hands-for-sustainable-palm-oil.html> diakses pada 25 Oktober 2014.
- (2 Maret 2011). "Palm Oil in Netherlands". *CBI Market Information Database*.
- CMT. "6th Palm Oil Asia Summit". <http://www.cmtevents.com/aboutevent.aspx?ev=140824> diakses pada 25 Oktober 2014.
- Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian. 2011. Perkembangan Ekspor Kelapa Sawit (CPO) Indonesia dalam Perdagangan Dunia, http://pphp.pertanian.go.id/disp_informasi/1/5/54/1188/perkembangan_ekspor_kelapa_sawit_cpo_indonesia_dalam_perdagangan_dunia diakses pada 2 Maret 2014.
- 2013. "Kebijakan Bea Keluar atas Ekspor Kelapa Sawit, CPO, dan Produk Turunannya". Arsip Juli 2013. www.pphp.deptan.go.id. Diakses Senin 9 September 2013 pukul 13:00 WIB.
- 2013. "Market Intelligence" Beberapa Komoditi Andalan Ekspor Indonesia". *Jurnal PPHP* Vol 1(1) (Agustus).
- Day, George, & Robbin Wesley. 1998. "Assessing Advantage; A Framework for Diagnostic Competitive Superiority", *Journal of Marketing*. 52 (April), 1 – 20.
- Ermawati, Tuti dan Yeni Saptia. 2013. "Kinerja Ekspor Minyak Kelapa Sawit Indonesia", *Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan*, Vol. 7 No. 2: 129-47.
- Fakhrudin, Umar. 2011. "The Competitiveness of Indonesian Product in Trade Relationship with China". 2013. "Kinerja Ekspor Minyak Kelapa Sawit Indonesia", *Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan*, Vol. 5 No. 2: 164-76.
- Fyfe, Anna-Maria. (22 November 2012). "Export Restrictions on Natural Resources: The Case of Indonesia and Vietnam". *Biores*, Vol. 6 No.4. <http://www.ictsd.org/bridges->

news/biores/news/export-restrictions-on-natural-resources-the-case-of-indonesia-and-vietnam diakses pada 25 Oktober 2014.

Gerasimchuk, Ivetta dan Peng Yam Koh. (September 2013). *The EU Biofuel Policy and Palm Oil: Cutting subsidies or cutting rainforest?* Laporan Penelitian. Jenewa: IISD.

Indonesian Commercial Newsletter (ICN). (November 2009). Industri Palm Oil di Indonesia. Laporan Market Intelligence, <http://www.datacon.co.id/CPO1-2009Sawit.html> diakses pada Agustus 2014.

International Trade Center. 2012. *Palm Products Global Market and Development*.

Ismailkuala, Zaidi Isham. (28 Oktober 2014). "B7 biodiesel plan to take off next month". *New Strait Times Online*. <http://www.nst.com.my/node/47156> diakses pada 19 November 2014.

Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. "Profil Ekonomi: Negara Tujuan Ekspor 10 Komoditi Utama". <http://www.kemendag.go.id/id/economic-profile/10-main-and-potential-commodities/10-potential-commodities> diakses pada 2 Maret 2014.

----- . 2010. *Kajian Kelayakan Pembentukan FTA Indonesia - Turki dan Pakistan*. Laporan Akhir. Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Perdagangan Luar Negeri, Badan Penelitian dan Pengembangan Perdagangan.

----- . 2011. *Kajian Kebijakan Pengembangan Diversifikasi Pasar dan Produk Ekspor*. Laporan Akhir. Jakarta.

----- . 2012. *Kajian Kebijakan Mutu dan Standar Produk Ekspor Tertentu dalam Meningkatkan Daya Saing*. Laporan Akhir. Jakarta: Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Perdagangan, Pusat Kebijakan Perdagangan Luar Negeri.

Kompas. (23 Oktober 2013). "Mentan: RI Tidak Gagal Memasukkan CPO dalam Daftar Ramah Lingkungan". <http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2013/10/23/1826490/Mentan.RI.Tidak.Gagal.Memasukkan.CPO.dalam.Daftar.Ramah.Lingkungan> diakses pada 2 Maret 2014.

----- . (11 Januari 2014). "Indonesia Acuan Harga CPO". <http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2014/01/11/0852200/Indonesia.Acuan.Harga.CPO> diakses pada 2 Maret 2014.

Mohd Hidzir, Mohd Fairus dan Hisamuddin Mohd Aspar. 2014. "The Palm Oil Market in Pakistan". *Palm Oil Developments* 59.

Munadi, E. 2007. "Penurunan Pajak Ekspor dan Dampaknya terhadap Ekspor Minyak Kelapa Sawit Indonesia ke India (Pendekatan Error Correction Model)". *Informatika Pertanian* Volume 16 No. 2. Bogor.

Nurhayat, Wiji. (8 Januari 2014). "Ekspor CPO Indonesia ke Pakistan Melonjak". *Detik Finance*. <http://finance.detik.com/read/2014/01/08/172353/2461982/4/ekspor-cpo-indonesia-ke-pakistan-melonjak> diakses pada 2 Maret 2014.

Porter, Michael E. 1996. "What is Strategy"? *Harvard Business Review*, Nov/Dec 1996.
-----, 2001. *Strategy and the Internet*. Boston: Harvard Business Review.

Putranto, Kun Rizki. 2011. *Analisis Ketidakmampuan Indonesia Dalam Penentuan Patokan Harga Perdagangan CPO Internasional (2007-2011)*. Skripsi. Depok: Universitas Indonesia.

Raghu, Anuradha. (28 Oktober 2014). "Malaysia to roll out B7 biodiesel plan from Nov-official". *Reuters*. <http://www.reuters.com/article/2014/10/28/malaysia-palmoil-biodiesel-idUSL4N0QL3EV20141028> diakses pada 19 November 2014.

Reuters. (22 September 2014). "Palm oil demand at risk by tax war between Indonesia and Malaysia". <http://www.themalaymailonline.com/print/money/palm-oil-demand-at-risk-by-tax-war-between-indonesia-and-malaysia> diakses pada 25 Oktober 2014.

Rifin, Amzul. 2010. "The Effect of Export Tax on Indonesia's Crude Palm Oil (CPO) Export Competitiveness". *ASEAN Economic Bulletin*, Vol. 27 No. 2: 173-84. Singapura: ISEAS.

-----, 2010. "Export Competitiveness of Indonesia's Palm Oil Product." *Trends in Agriculture Economics* 3(1): 1-18.

Roberts, James M. (24 Januari 2011). "How Western Environmental Policies Are Stunting Economic Growth in Developing Countries". *Backgrounder No. 2509*. Washington: The Heritage Foundation. <http://www.heritage.org/research/reports/2011/01/how-western-environmental-policies-are-stunting-economic-growth-in-developing-countries> diakses pada 19 November 2014.

RSPO. 2014. *Impact Report 2014*.

Sandi, Ayu Prima. (19 Juni 2014). "High CPO Export Improves Trade Balance". *Tempo.Co*, <http://en.tempo.co/read/news/2014/06/19/056586556/High-CPO-Export-Improves-Trade-Balance> diakses pada 27 Agustus 2014.

Secularac, Ivana. (5 Maret 2013). "Palm oil labelling will slash EU consumption – Dutch agency". *Reuters*. <http://www.reuters.com/assets/print?aid=USL6N0BWI7W20130305> diakses pada 25 Oktober 2014.

Setiawan, Sigit. 2012. "ASEAN-China FTA: Dampaknya terhadap Ekspor Indonesia dan Cina". *Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan*, Vol. 6 No. 2.

The Jakarta Globe. (6 Juni 2014). "Indonesia Seeks Trade Talks With Turkey Amid CPO Price Parity". <http://thejakartaglobe.beritasatu.com/business/indonesia-seeks-trade-talks-turkey/> diakses pada 29 Agustus 2014.

The Jakarta Post. (10 Juni 2014). "RI seeks new hubs to market its palm oil products". <http://www.thejakartapost.com/news/2014/06/10/ri-seeks-new-hubs-market-its-palm-oil-products.html> diakses pada 29 Agustus 2014.

----- (16 Oktober 2014). "RI should benefit more from 'Rising Africa'". <http://www.thejakartapost.com/news/2014/10/16/ri-should-benefit-more-rising-africa.html> diakses pada 19 Oktober 2014.

UNCTAD. "Recent developments and new challenges in commodity markets, and policy options for commodity-based inclusive growth and sustainable development". Materi dalam Agenda Khusus No. 3, Pertemuan Para Ahli Komoditas dan Pembangunan Multi-tahun, Sesi ke-6, 9-10 April 2014, Jenewa.

United Nations Statistic Division. *Commodity Trade Statistic Database (COMTRADE)*. <http://comtrade.un.org> diakses pada 27-29 Agustus 2014.

USDA Foreign Agricultural Service. (12 Oktober 2013). "Biofuels Overview 2014: Spain". *GAIN Report No SP1321*.

----- (4 September 2014). "Biofuels Overview 2014: Italy". *GAIN Report No IT1430*.

Wibowo, Rudi. 2004. "Koperasi dan Korporasi Petani: Kunci Pembuka Pengembangan Agribisnis Berdaya Saing Berkerakyatan, dan Berkeadilan". *Infokop* Edisi 24 dalam www.smecca.com-koperasi dan UKM.

www.beritasatu.com. Pemerintah tidak Terpengaruh Kebijakan Ekspor CPO Malaysia. Senin 25 Februari 2013, diakses Senin 2 September 2013 pukul 14:15 WIB.

ASIMETRI STRUKTURAL PENYEBAB PERANG KEKUATAN BESAR DALAM KONTEKS ASIA PASIFIK

Andrea Abdul Rahman A.
asahib1@rocketmail.com

Abstract

The end of the cold war has ended the spirit of the bipolar international system and changed the multipolar system or specifically has transferred military nuanced competition towards competition or conflict of economic interests. Competition ideological and military power can be derived from the main priority scale, and the international community wants to concentrate on the problem of how to improve their welfare in the economy. So now the problems of development and economic cooperation became the main agenda in international politics. When the Chinese economy and soaring rise rapidly in the early 21st century, approached Japan and the United States then it can lead to tensions in the entire region, a variety of debate and analysis of the rise of Cina as a new power in the Asia Pacific region. This is complicated by the state of the Asia Pacific region is now surrounded by a wide variety of non- traditional threats "non - traditional security" (NTS) or "non - military security threats". Consortium on Non - Traditional Security Studies in Asia defines that natural disasters (earthquakes, tsunamis) and man-made disasters (leaking nuclear reactors), terrorism, financial crisis, pandemic disease SARS or Avian Flu (H5N1), Global Warming - Global Dimming, until the drug and human smuggling, is asymmetric Structured (Structural Assymetry) are very likely to be the main katalistator in the process of a major war in the Asia Pacific region.

Keywords: asimetri, asia pasifik, non traditional threat (NTS), Cina, ASEAN

Pendahuluan

Dari pemahaman judul di atas, dapat diartikan dalam bahasa Indonesia, bahwa tajuk rencana "*Structural Asymmetry Cause Great Power of War, The Asia Pacific context*" adalah strukturkekuatan non-tradisional (asimetrik) di asia pasifik yang dapat memicu peperangan besar. Berangkat dari tajuk inilah, dapat kita uraikan masalah-masalah yang saling mengikat bagai simpul, untuk dapat kita lepaskan satu demi satu, sehingga tujuan dari uraian diatas dapat tercapai. Berakhirnya perang dingin telah mengakhiri semangat sistem internasional *bipolar* dan berubah pada *multipolar* atau secara khusus telah mengalihkan persaingan yang bernuansa militer (baca: Blok Barat - Blok Timur) ke arah persaingan atau konflik kepentingan ekonomi diantara negara-negara di dunia ini. Pasca perang dingin yang ditandai dengan berakhirnya persaingan ideologi antara Amerika Serikat dan Uni Soviet telah mempengaruhi isu-isu hubungan internasional yang sebelumnya lebih fokus pada isu-isu *high politics* (isu politik dan keamanan) kepada isu-isu *low politics* (misalnya, hak asasi manusia, ekonomi, lingkungan hidup, dan terorisme) yang dianggap sudah sama penting dengan isu *high politics*.

Ketika terjadi peralihan abad dari era perang dingin menuju keadaan pascaperang dingin, jaringan aliansi Amerika Serikat ternyata menyisakan komponen penting berupa kebijakan keamanan internasional dari pihak Amerika Serikat sendiri. Kebijakan tersebut pada dasarnya berbasis pada usaha Amerika Serikat dalam mempertahankan superioritas militernya lebih dari kekuatan yang dimilikinya pada sektor ini sekarang sekaligus dalam upaya menghadapi *rival-rival* Amerika Serikat yang memiliki kekuatan potensial di daratan Eropa. Demi mencapai tujuan tersebut maka Amerika Serikat kemudian berusaha untuk mempertahankan kehadiran dari kekuatannya di Eropa dan Asia yang nantinya dapat membentuk *balance of power* di kedua regional itu selama periode *peacetime* (Tow, 1999: 5). Konsep mengenai pembentukan aliansi keamanan regional yang digagas oleh military planners Amerika Serikat berupaya antara lain untuk mempromosikan adanya konsolidasi atau penggabungan dan menggabungkan pelatihan militer, mendorong aliansi pertahanan untuk saling berbagi masalah yang dihadapi, dan mengizinkan pihak komandan militer Amerika Serikat untuk membentuk kesatuan tempur yang lebih luas sebagai sebuah pilihan militer yang seharusnya mampu menimbulkan erupsi krisis di wilayah-wilayah kunci.

Pengimplementasian pengaruh Amerika Serikat di beberapa wilayah melalui pembangunan hubungan kerjasama guna mempertahankan eksistensi kekuatannya ternyata berdampak signifikan. Berdasarkan tulisan dari Tow (1999: 6) yang berjudul *Assessing U.S. Bilateral Security Alliances in the Asia Pacific's "Southern Rim": Why the San Francisco System Endures*, hubungan keamanan bilateral paling signifikan yang dijalankan di Asia Pasifik adalah yang melekat di dalam sistem bernama "*San Fransisco System*". Istilah tersebut berasal dari jaringan pertahanan bilateral pada tingkat regional bentukan Amerika Serikat ketika konferensi perdamaian Jepang diselenggarakan di San Fransisco pada bulan September 1951. Berbicara tentang Jepang, kekuatan Amerika Serikat ditempatkan pula di Jepang dan Korea Selatan untuk melindungi Amerika Serikat dari kekuatan ekonomi baru tersebut, yang berturut-turut merupakan negara dengan predikat sebagai *largest single-state economies* urutan kedua dan ke sebelas dunia. Dalam hal ini, kepentingan Amerika Serikat secara global mungkin menghadapi tantangan paling berat selama abad ke-21 bahwa tantangan tersebut berasal dari kekuatan Asia Timur yakni Republik Rakyat Cina (Tow, 1999: 6).

Penguatan Hegemoni Cina

Berbicara mengenai kondisi yang terjadi pasca berakhirnya Perang Dingin pada sekitar tahun 1990-an, kawasan Asia Timur memiliki Cina sebagai negara yang menonjol karena Cina mengalami pertumbuhan ekonomi sangat. Pasca Perang Dingin, kawasan Asia Timur juga memiliki keadaan yang relatif stabil dan damai karena Amerika Serikat sebagai kekuatan besar saat itu, berusaha melindungi negara-negara aliansinya di Asia Timur, seperti Cina dan Jepang. Usaha Amerika Serikat tersebut terkait dengan keputusannya untuk membentuk *triangular relations* bersama Cina dan Jepang. Apalagi Amerika Serikat memiliki kepentingan ekonomi dan strategi yang banyak terpendam di Asia Timur (Goh, 2008). Berakhirnya Perang Dingin dan meningkatnya kualifikasi Cina di percaturan dunia internasional telah menimbulkan beragam prediksi dari para analis mengenai bagaimana nantinya hubungan antar-kekuatan yang ada di wilayah tersebut seiring dengan naiknya popularitas Cina yang berpotensi menyaingi dominasi Amerika Serikat sebagai pihak yang berkuasa.

Kembali ke masa sekarang, bahwa persaingan ideologi dan kekuatan militer dapat diturunkan dari skala prioritasnya yang utama, dan masyarakat internasional sepertinya ingin berkonsentrasi pada masalah bagaimana meningkatkan kesejahteraannya di bidang ekonomi. Sampai kini masalah-masalah pembangunan dan kerja sama ekonomi menjadi agenda utama dalam politik internasional. Karena itu, jika selama masa perang dingin posisi tawar (*bargaining position*) suatu negara dapat ditunjang oleh keterlibatannya dalam suatu blok keamanan tertentu, maka pada masa sekarang, misalnya, posisi tawar menawar tersebut bisa didapat dengan cara melibatkan diri pada suatu blok perdagangan.

Lebih lanjut, secara empirik perubahan hubungan internasional pasca berakhirnya perang dingin juga mempengaruhi stabilitas strategis hubungan internasional di kawasan Asia Pasifik (termasuk hubungan Amerika Serikat dengan kawasan ini). Hal itu dikarenakan secara geostrategi, perubahan tidak hanya terjadi di tingkat global tetapi juga di tingkat kawasan, termasuk Asia Pasifik. Perkembangan lingkungan strategis keamanan yang kompleks di Asia Pasifik pasca berakhirnya Perang Dingin dapat dikenali sebagai berikut:

- a) Pergeseran kekuatan diantara negara-negara besar;
- b) Kemunculan bertahap suatu lingkungan keamanan *multipolar* dengan suatu kekuatan negara besar Asia yang memainkan peran lebih besar;
- c) Pertumbuhan ekonomi yang cepat dan cenderung tak dapat diduga yang dapat mengubah keseimbangan kekuatan secara geoekonomi;

- d) Terjadinya peningkatan yang signifikan dari industri pertahanan dan kemampuan militer lokal negara-negara di kawasan;

Dari empat poin di atas ditambah dengan pernyataan dari seorang analis strategik Universitas Zhejiang Cina, Long Tao yang berpendapat di dalam tulisannya pada Surat Kabar *Global Times*, dia menulis

“Vietnam’s insults in the South Cina Sea remained unpunished today...it is probably the right time for us to reason, think ahead and strike first... It seems all the countries around the area are preparing for an arms race. Singapore brings home high-end stealth aircraft while Australia, India and Japan are all stockpiling arms for a possible “world-class” battle... We shouldn’t waste the opportunity to launch some tiny-scale battles that could deter provocateurs from going further... Everything will be burned to the ground should a military conflict break out...”

Setelah tulisan ini beredar, maka memicu aneka perdebatan dan analisis mengenai kebangkitan Cina sebagai kekuatan baru di wilayah Asia Pasifik. Sangat beralasan bahwa pergerakan Cina yang lebih agresif dan semakin besar kekuatan militernya sangat mengkhawatirkan semua pihak. Pada prinsipnya percaturan regional ini berkembang dengan *fluid*, namun kondisi keamanan kawasan Asia Pasifik yang pada umumnya cukup stabil, walaupun kadang terganggu oleh gejolak-gejolak yang insidental, pada akhirnya menjadi semakin memanas karena tulisan tersebut di atas. Terdapat empat negara yang menentukan dinamika perkembangan keamanan (*security*) kawasan ini, yaitu AS, Cina, Jepang dan Rusia. Meskipun pada saat ini Rusia belum dapat memainkan peranannya, keempat negara ini mempunyai kepentingan strategis di kawasan ini. *Equilibrium* di antara keempat kekuatan ini akan dapat menjamin perdamaian dan stabilitas kawasan.

Dapat dibayangkan ketika salah satu dari keempat negara di atas menguat secara signifikan baik itu kemampuan ekonomi, perdagangan, militer, dan industri pertahanannya. Terlebih lagi dengan kemunculan pangkalan militer Amerika Serikat di Darwin, daerah utara Australia dan penguatan pangkalan Amerika Serikat di Guam. Yang semakin memperkuat dugaan bahwa struktur *equilibrium* kekuatan di kawasan Asia Pasifik sedang goyah, dan secara signifikan memperlihatkan perlombaan kekuatan Cina dengan Amerika Serikat dalam mencapai penguasaan pengaruh di kawasan Asia Pasifik, meski samar tapi pesan itu menegaskan bahwa goyahnya struktur dapat memicu munculnya aktor-aktor nonnegara yang mengancam *human security* (radikalisme, terorisme, proliferasi WMD, pelanggaran HAM berat, konflik horizontal, degradasi lingkungan, migrasi ilegal, kejahatan transnasional terorganisasi) akibatnya tantangan asimetrik ini dapat memicu perang besar di kawasan Asia Pasifik.

Konsep Cooperative Security

Konsep *cooperative security* secara umum didefinisikan sebagai “a process whereby countries with common interest work jointly through agreed mechanism to reduce tensions and suspicion, resolve or mitigate disputes, build confidence, enhance economic development prospects, and maintain stability in their regions” (Michael Moodle, Chemical and Biological Arms Control Institute, January, 2000).

Istilah *comprehensive security* yang muncul di dalam Bali Concord II (2003), semakin populer seiring pula dengan berakhirnya Perang Dingin sekitar tahun 1988, yang berseberangan dengan harapan masyarakat dunia yang mengharapkan dengan penuh optimisme munculnya perdamaian abadi, baik internal maupun antarnegara, berkurangnya kekerasan dan tegaknya ketertiban dunia di bawah kendali PBB. Namun yang terjadi pada tahun 1990-an justru menimbulkan pertanyaan, karena yang muncul adalah kekerasan yang dilakukan oleh *non-state actors* seperti perang saudara, pelanggaran HAM berat seperti genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan, konflik berdasar identitas, pemanasan bumi (*global warming*) yang menyebabkan perubahan iklim (*climate change*) yang membahayakan umat manusia akibat ulah manusia (*man-made*), terorisme yang dipicu oleh frustrasi akibat perasaan-perasaan kasenjangan sosial ekonomi, ketidakadilan, *xenophobia*, ketidakamanan akibat globalisasi yang dirasakan sebagai *corporate globalism* yang menimbulkan *global injustice*, separasi politik, tuntutan solidaritas agama yang sempit, yang dimanipulasi oleh kaum ekstremis, fanatik, fundamentalis dan kelompok radikal (Muladi, 2006).

Dasar Perkembangan Konsep Cooperative Security

Pertama, masalah saat ini berada di luar kemampuan dari negara per negara untuk memecahkannya, karena bersifat transnasional dan jauh dari kenyataan terjadinya fragmentasi dan desentralisasi tertib keamanan pasca perang dingin di satu pihak, dan fenomena globalisasi ekonomi internasional, teknologi informasi dan ketertiban sosial di lain pihak yang di samping bersifat positif, juga memunculkan bahaya-bahaya keamanan baru. Di samping bahaya keamanan tradisional atau yang bersifat simetrik dan *state centric* memungkinkan berkembangnya bahaya keamanan baru yang bersifat asimetrik atau non-tradisional yang didominasi peranan aktor-aktor nonnegara (*non-state actors*) terhadap *human security* seperti radikalisme, terorisme, proliferasi wmd, pelanggaran HAM berat, konflik horizontal, degradasi lingkungan, migrasi ilegal, kejahatan transnasional terorganisasi (TOC), globalisasi ekonomi yang tidak adil (*global injustice*), perompakan di laut, pemerintahan yang otoriter (*state crime*) dll. Di samping itu masih terjadinya bahaya keamanan tradisional yang bersifat “*state centric*” dan bersifat lebih

kompleks (Afrika Tengah menggambarkan terjadinya apa yang dinamakan konflik yang merupakan perpaduan antara “*interstate rivalries, internal conflicts and transnational ethnic problems*”), dua spektrum ancaman bahaya ini digambarkan oleh James Rosenau (1990) sebagai *the two world of world politics* atau *bifurcated conflict environment* (lingkungan konflik dua cabang).

Kedua, Di masa pascaperang dingin, sistem internasional, di samping memperhatikan peranan dari kekuatan dan kompetisi militer, memperkenalkan *cooperative security* yang juga mencakup keamanan ekonomi dan lingkungan. Kinerja ekonomi tidak kalah penting daripada kapabilitas militer dilihat sebagai kekuatan negara di dalam komunitas internasional. Bahaya didefinisikan sebagai bahaya ekonomi, lingkungan dan demografi (asimetrik). Namun demikian kepedulian terhadap tantangan bahaya non-tradisional tidak menghilangkan kekhawatiran terhadap bahaya tradisional. Kerjasama antar negara dibutuhkan, karena negara-negara merasa tidak mungkin mengatasi banyak permasalahan secara sendirian. Untuk itu perlu dibangun kapabilitas melalui kesepakatan internasional, usaha bersama mengatasi bahaya transnasional, mencegah atau menyelesaikan konflik, dan membangun masyarakat madani. Makna kedaulatan mengalami pergeseran dari konsep Westphalian 1648 yang menegaskan prinsip *privilege and control* berkembang juga ke arah *responsibility* baik internal maupun eksternal.

Tantangan dari Amerika Serikat untuk Cina

Ketegangan antara Filipina dan Cina di wilayah Laut Cina Selatan seperti yang terjadi di Scarborough Shoal, memang telah menjadi sinyal “lampu kuning” menuju perang perpanjangan tangan atau *Proxy War* antara Amerika Serikat dan Cina di kawasan Asia Tenggara, atau pada skala yang lebih luas, di kawasan Asia Pasifik. Amerika kiranya cukup beralasan untuk berbagi kecemasan bersama Jepang dan Vietnam menyusul semakin agresifnya postur militer Cina di Asia Pasifik. Berdasar studi *SIPRI (Stockholm International Peace Research Institute, 2010)*, Cina merupakan negara Asia dengan anggaran militer terbesar. Pada 2000, militer Cina sudah menghabiskan anggaran militer sebesar US\$90 miliar dan pada 2010, hingga mencapai US\$120 miliar. Berdasarkan data dari sumber yang sama, saat ini Cina memiliki 2,3 juta tentara. Angkatan Daratnya saat ini merupakan kekuatan paling besar di dunia. Pada tahun 2012, anggaran militer Beijing mencapai US\$160 miliar.

Sudah tentu data-data terbaru dari *SIPRI* tersebut, telah memicu kecemasan di kalangan para analis keamanan nasional Jepang. Maklum, karena baik Cina maupun Jepang kebetulan sama-sama masuk deretan negara-negara adidaya baru di kawasan

Asia Timur. Maka tak heran bila sebuah laporan dari Kementerian Pertahanan Jepang menegaskan bahwa kenaikan anggaran militer Jepang yang sedemikian cepat tersebut pada gilirannya bisa mempengaruhi tata tertib regional di kawasan Asia Timur, sehingga memiliki dampak yang cukup membahayakan bagi keamanan nasional Jepang. Kecemasan Jepang semakin menjadi-jadi ketika beberapa waktu lalu pihak Jepang sempat melaporkan bahwa Cina telah meningkatkan intensitas kegiatan militernya di Perairan Jepang. Anehnya lagi, para pemegang otoritas keamanan nasional sempat mencemaskan tidak adanya keterbukaan atau transparansi mengenai aktivitas militer Cina di Asia Timur maupun strategi nasional Cina itu sendiri. Tentu saja ini satu sikap yang cukup aneh mengingat pihak Jepang pun pasti tahu bahwa yang namanya fakta-fakta seputar perkembangan dan peningkatan postur militer suatu negara, jelas jelas masuk kategori rahasia negara.

Dalam hal konflik perbatasan antara Cina dan Jepang yang belakangan ini kian menajam, tentunya juga tidak kalah krusialnya dengan ketegangan konflik perbatasan antara Filipina dan Cina di Laut Cina Selatan. Pada September 2010, misalnya, sempat terjadi ketegangan antara Cina dan Jepang atas Kepulauan Senkaku/Diaoyu yang mengungkap adanya potensi konflik kedua negara bertetangga ini di dalam beberapa bulan atau tahun mendatang. Pada September 2010 itu Tokyo sempat menahan seorang kapten kapal RRC di ibukota Okinawa, Naha, dengan tuduhan kapten kapal Beijing itu melanggar kedaulatan hukum Jepang. Masalah semakin memanas ketika pihak Beijing kemudian menuntut pembebasannya, dengan melancarkan serangan balik dengan menangkap empat karyawan Fujita Corporation di Provinsi Hebei, Cina, dan malah dalam lawatan Perdana Menteri Wen Jibao ke New York, ia menegaskan Cina akan mengambil langkah lebih lanjut terhadap Jepang jika Tokyo tidak membebaskan kapten kapal tersebut (BBC News, 2010). Menghadapi ofensif Diplomatik Cina, Jepang akhirnya memilih jalan damai, dan kemudian membebaskan kapten kapal Cina itu.

Mungkinkah kasus-kasus serupa bakal menjadi katalistator gesekan antara Cina dan Jepang sehingga memicu Perang terbuka antara aliansi Amerika Serikat dan Jepang dengan Cina di tahun-tahun mendatang? Memang belum bisa dipastikan, meski dalam bukunya *The Clash of Civilization* Dr Samuel Huntington memprediksi akan pecah konflik militer terbuka antara Amerika dan Cina di kawasan Asia Pasifik pada sekitar 2014 – 2017.

Namun jelas terlihat, beberapa prakondisi untuk memantik perang terbuka Cina dan Jepang sepertinya sudah tersedia. Pertama, pada Desember 2010 lalu, Tokyo telah mengumumkan haluan pertahanan baru sebagai respons atas meningkatnya anggaran militer Cina dan sepak-terjangnya di kawasan Asia Pasifik. Berarti, ada satu *trend*

terjadinya militerisasi baik di pihak Jepang, yang diketahui masih terikat pada perjanjian persekutuan keamanan bersama antara Jepang dan Amerika Serikat. Kedua, sebagai konsekuensi dari haluan baru pertahanan Jepang untuk mengimbangi kekuatan militer Cina, Jepang memutuskan untuk menjalin kerjasama strategis dengan Amerika Serikat untuk menjamin keamanan nasional Jepang. Dan konsekuensinya, Jepang akan mempersilahkan kehadiran militer Amerika di Jepang (Mainichi Daily News, 2011).

Bukan itu saja, Di bagian lain kawasan Asia Timur, tepatnya di Selat Taiwan, ternyata Cina juga telah mengembangkan armada laut yang diperkuat dengan kapal selam yang memiliki jarak tempuh 2100 km sehingga mampu memberlakukan *Strategy anti access aerial denial*, suatu strategi penolakan dan penangkalan terhadap kehadiran militer Amerika Serikat, sehingga mampu memaksa pasukan marinir AS berada di luar kawasan Selat Taiwan dan Pasifik Barat, jika sewaktu-waktu terjadi aksi militer Cina ke Taiwan. Dari konstalasi kekuatan militer Cina yang seperti itu, angkatan bersenjata AS akan bisa dicegah untuk memberi dukungan angkatan laut kepada Jepang jika terjadi konflik militer terbuka antara Cina dan Jepang.

Seperti yang diketahui sebelumnya, kedigdayaan militer Cina belakangan ini dimungkinkan karena kemajuan perekonomian mereka dalam beberapa tahun terakhir. Inilah yang kemudian mendorong berbagai pakar dan peneliti di Amerika Serikat untuk merekomendasikan adanya aliansi baru di kawasan Asia Pasifik, dalam rangka menghadang ancaman militer Cina di kawasan ini. Seperti yang dilakukan terhadap Filipina, Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, dan bahkan Vietnam, yang pada era 1970-an, merupakan musuh utama Amerika Serikat di kawasan Asia Tenggara. Seorang pakar strategi dan keamanan nasional Amerika Serikat bahkan dengan jelas mengumandangkan kecemasannya terhadap perkembangan militer Cina. 'Bagaimanapun AS cemas dan khawatir dengan kebangkitan militer Cina, selain isu nuklir Iran dan Korea Utara,' Prof Robert Gallucci di Universitas California Berkeley (15/04/2012),

Asia Pasifik dan Indonesia di Tengah-tengah Ancaman Asimetrik

Asia Pasifik kini dikepung oleh berbagai macam ancaman non tradisional "*non-traditional security*" (NTS) atau "*non-military security threat*" atau "*non-conventional security threat*" atau "*asymetric security threat*". Digunakannya istilah *security* dalam hal ini dimaksudkan agar masalahnya memperoleh perhatian sungguh-sungguh dari negara-negara di dunia, karena potensi viktimisasi yang ditimbulkannya terhadap umat manusia sangat besar, terutama dalam konteks kawasan Asia Pasifik. Kita tidak dapat menutup mata bahwa pada 50 tahun terakhir dalam kerangka proses globalisasi, pertumbuhan dinamis masyarakat dunia luar biasa, yang diwarnai oleh pelbagai inovasi di segala

bidang. Namun demikian kita juga tidak buta terhadap kenyataan, bahwa terutama sejak krisis ekonomi di Asia orang juga disadarkan oleh keterbukaan dan interdependensi serta sifat transnasional dari hal-hal yang bersifat mencederai tidak hanya negara, tetapi juga *human security*. Contoh terakhir adalah krisis ekonomi global yang melanda dunia, akibat perilaku korporasi multi nasional di Amerika Serikat yang berperilaku jauh dari etika bisnis (salah satu ancaman asimetrik).

Kejadian terakhir di Indonesia yang menjurus terrorisme yang diarahkan untuk mencederai simbol-simbol Negara oleh kelompok radikal dapat dikatakan merupakan sinergi (hybrid) antara ancaman yang simetrik dan asimetrik. Kita sadar bahwa masalah keamanan selalu didominasi oleh keprihatinan tradisional seperti kedaulatan, kemerdekaan politik dan militer serta pertahanan sampai dengan keamanan regional. Meskipun demikian kenyataan yang terjadi adalah munculnya tantangan-tantangan baru seperti ancaman terhadap kesehatan (penyakit infeksi menular seperti SARS, flu burung dll), pengangguran, kemiskinan, krisis ekonomi, bencana alam (tsunami, gempa, banjir, dll), degradasi lingkungan hidup, migrasi manusia yang tidak tertib, kompetisi untuk memperoleh sumber daya alam, kejahatan transnasional terorganisasi, perdagangan illegal dan narkoba, terrorisme dan saling ketergantungan ekonomi, yang sangat berbahaya baik bagi negara maupun umat manusia.

Hal ini sama sekali telah mengubah pandangan manusia, bahwa ancaman bahaya keamanan tidak hanya bersumber pada hal-hal yang bersentuhan dengan terminologi geopolitik, yang meliputi *deterrence, power balancing and military strategy* sehubungan dengan pertahanan dari serangan militer dari luar saja, yang sebelumnya merupakan fokus eksklusif dari kebijakan keamanan. Dengan demikian pengertian keamanan dalam arti sempit (*narrow definition of security*) mulai dipertanyakan dan seharusnya juga mencakup ancaman keamanan yang non-militer atau asimetrik terstruktur.

Human security concept menyadarkan kita bahwa apa yang dinamakan *people centered view of security* sangat penting untuk diperhatikan dalam rangka terciptanya stabilitas baik secara nasional, regional maupun global. Suatu konsorsium yaitu *Consortium on Non-Traditional Security Studies in Asia* mendefinisikan NTS sebagai “*challenges to the survival and well-being of peoples and states that arise primarily out of non military sources, such as climate change, resource scarcity, infectious diseases (SARS, pandemi avian flu), natural disasters, irregular migration, famine, people smuggling, drug trafficking and transnational crime*”. Krisis finansial 1997 – 1998, bencana asap kebakaran hutan, terrorisme, TOC, bencana alam (termasuk di dalam ruang lingkup NTS).

Bahaya keamanan non-tradisional pada dasarnya cenderung bersifat transnasional, yang penanggulangannya harus didasarkan atas kerjasama antarnegara dan bahaya ini mencakup 3 (tiga) kategori:

Pertama, Bahaya alam (*nature threat*) seperti bahaya penyakit infeksi menular misalnya virus HIV/AIDS, SARS, H5NI, bencana alam, *climate change/global warming* karena ulah umat manusia yang meningkatkan emisi gas rumah kaca secara tidak terkendali, dalam proses industrialisasi (CO₂) dan pembalakan hutan;

Kedua, Bahaya terhadap ekonomi dan pembangunan (*economic and development threat*) seperti dampak negatif globalisasi (*the worldwide phenomenon of technological, economic, political, and cultural exchanges, brought about by modern communication, transportation and legal infrastructure as well as the political choice to consciously open cross border links in international trade and finance*) yang cenderung menguntungkan negara-negara maju dengan mengesampingkan solidaritas sosial, demokrasi, egalitarianisme, HAM, urbanisasi, peledakan penduduk, kemiskinan, pengangguran, krisis ekonomi, krisis energy, dan

Ketiga, Bahaya sosial dan politik (*social and political threat*) yang mencakup konflik etnik, agama dan budaya, terorisme, kultur militerisme, kejahatan terorganisasi, bahaya narkoba, ketidaksetaraan gender, perompakan di laut, *illegal fishing, illegal logging* dan *illegal mining*, penyelundupan; ekstrimisme, migran gelap, perdagangan manusia (termasuk perdagangan organ tubuh), gerakan separatis, radikalisme dan sebagainya. (Feng, 2007).

Keempat, Khusus tentang *global warming and climate change*, masalahnya sangat aktual, sebab pelbagai bencana alam yang ditimbulkannya seperti meningkatnya gelombang panas, peningkatan curah hujan yang menimbulkan banjir, peningkatan badai tropis, cuaca buruk, pengurangan salju dan gletser, munculnya penyakit-penyakit endemi, kenaikan air laut, peningkatan suhu di permukaan bumi dan sebagainya, di samping faktor alam juga karena ulah manusia yang tidak terkendali di bidang industri, kendaraan bermotor, deforestasi, pertanian, manufaktur, dsb, yang mengakibatkan meningkatnya konsentrasi gas rumah kaca (GRK) di atmosfer (CO, CH₄, N₂ dll). Dengan demikian sangat dibutuhkan kerjasama antarnegara baik antarnegara maju (*emission trading, joint implementation*) maupun antara negara maju dengan negara berkembang (*clean development mechanism*), untuk melakukan langkah-langkah mitigasi (memperlambat) maupun adaptasi (menyesuaikan diri) terhadap perubahan iklim (*climate change*) tersebut (Muladi, 2008).

Dalam beberapa hal bahaya terhadap keamanan non-tradisional menimbulkan kondisi “*overlap*” bahwa *soft security* berinteraksi dan bersinergi dengan *hard security*

yang menimbulkan dilema terhadap keterlibatan militer dalam suasana demokrasi, mengingat hal ini cenderung bisa mencederai kedaulatan negara dan bahaya terhadap masyarakat sekaligus. Contohnya adalah terorisme, perompakan di laut dan ekstrimisme, serta keberadaan kelompok bersenjata transnasional. Terkait di sini apa yang dinamakan dalam konsep militer sebagai MOOW "*military operation other than war*" (Indonesia – OMSP). (Vide UU No. 34 Tahun 2004 Pasal 7 ayat 2 butir b). (mengatasi separatis bersenjata; mengatasi pemberontakan bersenjata; mengatasi aksi terorisme; mengamankan wilayah perbatasan; mengamankan obyek vital nasional yang bersifat strategis; melaksanakan tugas perdamaian dunia sesuai dengan kebijakan politik luar negeri; pengamanan presiden dan wapres beserta keluarganya; memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini dengan sitem pertahanan semesta; membantu tugas pemerintahan di daerah; membantu Kepolisian RI dalam rangka keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam UU; membantu pengamanan tamu negara setingkat kepala negara dan perwakilan pemerintah asing yang sedang berada di Indonesia, membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian dan pemberian bantuan kemanusiaan; membantu pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan (*Search and Rescue*) dan membantu pemerintah dalam pengamanan pelayaran dan penerbangan terhadap pembajakan, perampokan, dan penyelundupan). Pelaksanaan OMSP tergantung pada kebijakan dan keputusan politik Negara (Pasal 7 ayat 3);

Atas dasar Pasal 15 UU No. 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, diisyaratkan pembentukan semacam Dewan Keamanan (istilahnya "Dewan Pertahanan Nasional") atau di Amerika Serikat disebut *The National Security Council* yang berfungsi memberi nasehat kepada Presiden dengan memperhatikan integrasi berbagai kebijakan dalam negeri, luar negeri, militer dan departemen/badan lainnya, untuk bekerjasama secara efektif dalam berbagai masalah menyangkut keamanan nasional. Hal ini diharapkan dapat menjembatani dikotomi antara tugas TNI dan POLRI menurut Pasal 30 UUD NRI Tahun 1945, yang memisahkan tugas TNI (sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan Negara) dan tugas POLRI (sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum). Hal ini dapat dikatakan sebagai kerjasama keamanan di tingkat nasional.

Kofi A. Annan pada laporannya semasa menjabat Sekretaris Jenderal PBB mengidentifikasi adanya 6 kelompok ancaman atau bahaya bersama (*six clusters of threats*) yang dihadapi oleh bangsa-bangsa di dunia yaitu ancaman sosial ekonomi berupa kemiskinan, penyakit menular dan degradasi lingkungan; konflik antarnegara,

konflik internal negara termasuk perang saudara, genosida dan kekejaman berskala besar lainnya; senjata nuklir, radiologi, kimia dan biologi; terorisme dan kejahatan lintas negara terorganisasi (TOC). (Annan, 2005). Dari sini nampak bahwa bahaya bersama terhadap keamanan manusia di masa depan akan bersifat dua dimensi, yaitu bahaya keamanan yang tradisional (konflik antarnegara) yang masih ada seperti konflik Cina-Taiwan, Korea Utara-Korea Selatan, India, Pakistan dll, dan bahaya keamanan nontradisional di atas.

Kesimpulan

Pemahaman tentang kerjasama keamanan dan keamanan komprehensif sangat diperlukan dengan menyadari adanya bahaya ancaman keamanan yang multidimensional di dunia termasuk menghadapi NTS yang bersifat transnasional, tidak mungkin dihadapi sendiri oleh suatu negara, di mana konflik dan ancaman akan dikelola secara kolektif melalui kerjasama internasional atau regional, baik multilateral maupun bilateral.

Tidak dapat dihindari bahwa ancaman asimetrik yang terstruktur dapat membawa kepada peperangan besar di kawasan Asia Pasifik. Ancaman non-tradisional yang bersifat non-*state actor* semisal teroris atau kejahatan transnasional merupakan salah satu faktor yang bisa memperkeruh keadaan dan memancing sebuah kehancuran fatal dalam arti perang yang sesungguhnya karena, menyeret berbagai macam kepentingan di sekitarnya (ekonomi, politik, agama, sumber daya alam).

Daftar Pustaka

- Agreement between the Republic of Indonesia and Australia on the Framework for Security Cooperation*, Lombok, 13 Desember 2007.
- Alagappa, Muthiah. 1988. *Asian Security Practices (Material and Ideational Influences)*. Stanford University Press.
- Annan, Kofi A. 2005. *In Larger Freedom: Towards Development, Security and Human Rights for All*. UN.
- CSCAP. 1995. Memorandum No. 3: *The Concept of Comprehensive and Cooperative Security Kuala Lumpur*. ISIS.
- Desker, Barry, *New Security Dimensions in the Asia Pacific, the Indonesian Quarterly*. Vol. 36. No. 3-4, 2008 p.355-368.
- Emmers, Ralf, Anthony, Melly Caballero, Acharya, Amitav. 2006. *Studying Non-Traditional Security in Asia, Trend and Issues*. Singapore: Marshall Cavendish Academic.

- Evans, *From the Long Peace to the Long War: Armed Conflict and Military Education and Training in the 21 st Century*. Australian Defence College, Occasional Series No. 1, 2007.
- Feng, Han. 2007. *NTS Challenges and Policy Responses in North East Asia*. In Inaugural Meeting of the Consortium of NTS Studies in Asia. Singapore
- Ghitis, Frida. World Citizen: Will Cina Challenge U.S. as Global Superpower? Terdapat pada situs: <http://www.worldpoliticsreview.com/articles/6787/world-citizen-will-Cina-challenge-u-s-as-global-superpower> diakses pada tanggal 31 juli 2012 pukul 05.30 WIB.
- Goh, Evelyn. 2008. Great Powers and Hierarchical Order in Southeast Asia; Analyzing Regional Security Strategies dalam *Strategy and Security in Asia*. Hal. 1-33
- Hernandez, Carolina. 2008. *The Asean Charter and the Building of an ASEAN Security Community*. The Indonesia Quarterly Vol. 36 No. 3-4, p.296-311.
- Hsiung, James C. 2008. *Comprehensive Security: Challenge for Pacific Asia*. New York University.
- Jablonsky, David, *National Power, US War College Guide to National Security Policy and Strategy*, 2nd Edition, June 2006.
- Katsumata, Hiro. 2007. *Asean Security Community Background Paper for the Informal Meeting of ASEAN Defence and Security Think Tanks*. Singapore.
- Len le Rou. 1999. *Defining Defence Requirements: Force Design Considerations for the South African National Defence Force*. African Security Review Vol. 8 No. 5.
- Lind, William S. 2007. *Understanding Fourth Generation War*. <http://www.lewrockwell.com/lind/lind3b.html>.
- Lutz, James M and Lutz Brend J. 2008. *Global Terrorism*, Routledge, London and New York.
- Moodie, Michael. 2000. *Cooperative Security: Implications for National Security and International Relations*, Chemical and Biological Arms Control Institute, January.
- Muladi. "Global Warming" dan a"Climate Change" Sebagai Masalah Nasional dan Internasional, Jakarta, 10 Maret 2008.
- Muladi. *International Terrorism*. Paper Presented in IDSS Seminar, Singapore, 2006. NIC, Global Trends 2015, a Dialog about the Future with NGO Expert, December 2000.
- Patriot Post. 2007. Us, [http://patriotpost.us/papers/05-10 paper asp](http://patriotpost.us/papers/05-10%20paper.asp).

- Rana, Madhukar, SJB. 2008. *Comprehensive Security for South Asia, Conceptualization toward a Regional Strategy*. Sage Publication, New Delhi.
- Ravenhill, John. 2008. *East Asian Regionalism: Much Ado about Nothing?* Working paper (Australian National University, Department of International Relations, Research School of Pacific and Asian Studies: Online); 2008/3, hal. 1-41.
- Regehr, Ernie, Project Ploughshares. *Canadian Defence Policy within a Comprehensive Security Strategy*. March 21, 2005.
- Snow, Donald M. 2007. *National Security for a New Era*. New York: Longman.
- Sukma, Rizal. *The Future of Asean, Towards a Security Community*. New York, 3 June 2003.
- Tan, Andrew T.H. and Boutin Kenneth J.D. 2001. *Non Traditional Security Issues in Southeast Asia*. Singapore: IDSS.
- Tow, William. 1999. *Assessing U.S. Bilateral Security Alliances in the Asia Pacific's "Southern Rim": Why the San Francisco System Endures*. Hal. 1-36.
- Yamada, Yasuhiro. 2009. *International Relations of East Asia in Transition, and ASEAN, Cina, the United States and Japan*. Discussion Papers in Contemporary Cina Studies, Osaka University Forum on Cina No.2009-3, hal. 1-12.

PENGUNGSI DAN TANGGUNG JAWAB INTERNASIONAL

Tubagus Erif Faturahman
tef_bagus@yahoo.com

Abstract

There are more than 50 million refugees in the world today based on UNHCR data. Refugee has become a crucial issue in international politics for raising of humanitarian issue, it has bore the burden of international budget policy and security as well. It is stated in International Convention of non-refoulement principle where countries are prohibited refusing or returning refugees. However, in practice, this principle does not apply simply. Many countries are applying a double standard in which are pressing other countries to accept refugees but on the other hand refusing refugees coming into the country. UNHCR, as a UN agency dealing with refugees, has performed un-optimal in providing protection and security against refugees as it has some fundamental weaknesses. This research analyzes matters relating to refugees, factors causing human flows, reasons for rejection of the refugees and how international community should act dealing with the refugee issue. UNHCR itself may not be able to work alone but must be supported by other actors. Then it is important for international community to develop a comprehensive strategy and action in the form of collective intervention to solve the refugee problem.

Keywords: *Refugee, Humanitarian Action, Conflict*

Pendahuluan

Sejak berakhirnya perang dingin, konflik klasik antarnegara hampir tidak pernah terjadi. Beberapa pengamat bahkan menganggapnya sesuatu yang dapat diabaikan dalam masa kontemporer ini. Sebaliknya, konflik internal baik itu *intra-state* atau *inner-imperial* bertebaran dimana-mana. Konflik “kecil” yang didasarkan atas etnis, bahasa, agama atau identitas lainnya merupakan ancaman terbesar dalam sistem politik politik internasional.¹ Kendati skupnya lebih sempit, namun biaya konflik yang ditimbulkannya jauh lebih besar dibanding konflik antar negara. Salah satu buah hasil konflik yang menjadi beban internasional adalah lahirnya jutaan aliran manusia yang terpaksa mengungsi ke daerah aman untuk menghindar dari area konflik. Aliran manusia ini disebut pengungsi atau pencari suaka.

Akibat menimbulkan persoalan kompleks yang tidak dapat diatasi oleh satu negara saja, dunia internasional pada akhirnya terpaksa harus ikut bertanggung jawab menanganinya. Namun demikian, alih-alih mendapatkan perhatian dan bantuan, kehadiran atau kedatangan pengungsi justru dihindari. Kaum pengungsi adalah orang-

¹ Pauline H. Baker. “Conflict Resolution Versus Democratic Governance; Divergnect paths to Peace?” in Chester A. Croker (et.al) (eds.) *Managing Global Chaos: Sources of and Responses to International Conflict* (Washington, D.C.: USIP Press, 1996), hal. 563

orang “terkutuk”, begitu Kunarto² menganalogikan. Di mana-mana mereka tidak diharapkan, bahkan di tempat kelahirannya sekalipun sehingga secara terpaksa harus mencari tempat lain yang mau menerimanya secara lebih ramah dan memberikan harapan hidup yang lebih baik. Tetapi, acapkali apa yang diharapkan kerap tidak terwujud, bahkan sebaliknya, penderitaan mereka semakin bertambah akibat tempat-tempat yang mereka tuju tidak mau menerimanya atau diperlakukan secara tidak manusiawi.

Banyak negara yang menolak mengizinkan masuknya para pengungsi ke wilayah mereka karena dianggap akan melahirkan banyak masalah seperti hadirnya minoritas baru, konflik ras, agama dan etnik. Bagi negara, pengungsi adalah sebetulnya ancaman atau sejenis penyakit kusta yang harus dihindari. Penolakan kehadiran mereka oleh sebuah negara di suatu wilayah tertentu bukan tanpa alasan. Kehadiran tamu tak diundang tersebut akan memberikan banyak beban atau dampak bagi *host-state* (negara tempat tujuan), baik dampak sosial, politik, ekonomi maupun keamanan. Bahkan negara-negara besar yang menjunjung tinggi hak asasi manusia kerap bersikap ambivalen dan tidak jarang yang menolak kehadiran atau bahkan mengusir kedatangan mereka. Italia bahkan pernah menolak kedatangan pengungsi dari Albania yang terjebak perang saudara. Amerika sendiri bersikap mendua dalam menangani pengungsi. Ia mengkritik perilaku negara-negara Asia terhadap pengungsi Vietnam, tetapi ia sendiri menolak pengungsi Haiti tanpa mempertimbangkan lagi untuk memberikan mereka perlindungan.³

Tercatat sampai saat ini, hampir semua pengungsi berasal dari negara yang tengah menghadapi konflik atau krisis sosial, ekonomi maupun politik, seperti dari wilayah *Horn Africa*, Afrika Selatan, Afghanistan, Palestina, Indochina, Amerika Tengah, Timur Tengah dan lain-lain. Saat ini, sekitar dua pertiga dari jumlah seluruh pengungsi yang ditangani *UNHCR* berasal dari negara dunia ketiga⁴ dan hanya sedikit di antara mereka yang beruntung bisa masuk ke Eropa atau negara maju.

Semua itu menjadi beban bagi sistem internasional sebab memiliki dampak tidak hanya bagi dua negara saja (negara asal atau *sender* dan negara penampungan atau *host-state*), tetapi juga bagi perdamaian dan keamanan internasional,⁵ terutama dikaitkan dengan masalah hukum internasional dan hak asasi manusia untuk mencari kehidupan yang lebih baik dan layak serta terhindar dari rasa ketakutan.

² Lihat tulisannya Kunarto *Pengamanan dan Perawatan Pengungsi Vietnam di Pulau Galang*, Pulau Galang, 1980

³ Gil Loescher. *Beyond Charity: International Cooperation and the Global Refugee Crisis*, Oxford University Press, New York, 1993, p.7

⁴ Hans Arnold, ‘The “Century of the Refugee”, A European Century?’, *Aussen Politik*, Vol.42, No.3, Quarter, 1991, p.276

⁵ Alan Dowty and Gil Loescher, “Refugee Flows as Ground for International Action”, *International Security*, Vol. 21, No.1, (Summer; 1996), p.58

Tulisan ini akan menganalisis tentang pengungsi, beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya arus pengungsi, alasan penolakan negara terhadap pengungsi dan bagaimana seharusnya sikap internasional dalam menghadapi arus pengungsi tersebut.

Pengungsi: Identifikasi dan Jumlah

Pengungsi selalu hadir di mana-mana sebagai akibat dari perang, kudeta militer, dan kekerasan hak asasi manusia⁶ serta permasalahan ekonomi. Dulu sejarah terbesar dan dramatis tentang pengungsi adalah ketika pemerintahan Irak, di bawah kepemimpinan Saddam Hussein, melakukan *genocide* terhadap suku Kurdi dan penganut Islam *Shi'ah* yang melahirkan jutaan pengungsi (2 – 3 juta). Sekarang, cerita horor itu kembali terjadi di gelanggang Syiria dengan nama *arab spring* yang tak jelas akhirnya. Sembilan juta warga Syiria terpaksa menjadi pengungsi. Di Yugoslavia, konflik etnik berkepanjangan juga menimbulkan jutaan pengungsi. Sampai saat ini, *diaspora* (*term* yang digunakan pemerintah Israel) orang-orang Palestina banyak tersebar dan menjadi hambatan besar di sejumlah negara-negara Arab.

Masalah pengungsi sebenarnya telah ada sejak lama, dan mulai muncul menjadi isu bahasan politik internasional setelah perang dunia kedua. Pada 1949, terdapat 100.000 pengungsi. Angka ini bertambah menjadi 5 juta pada 1970, 10 juta pada 1980, dan saat ini ada sekitar 15-20 juta pengungsi⁷ dengan rincian sekitar 9 juta di Afrika (Liberia, Burundi, Rwanda, Ethiopia, dll), 5 juta di Eropa (Bosnia, Kosovo, Chechnya, Kroasia, dll), 5 Juta di Asia (Sri langka, Pakistan, dll.) dan 1 sampai 2 juta di wilayah Amerika Latin.⁸ Puncaknya adalah tahun saat ini, ketika Afrika dan negara-negara Arab dilanda konflik internal secara bersamaan.

Konvensi Genewa 1951 mengenai pengungsi mendefinisikan seorang pengungsi sebagai orang yang merasa jiwanya terancam karena berbagai alasan, seperti rasialis, agama, nasionalitas, keanggotaan dalam kelompok atau partai tertentu.⁹ Rasa keterancaman tersebut mengharuskan orang untuk mencari tempat lain yang dianggap lebih menjanjikan keamanan dan ketentraman.

Banyak pengamat melihat definisi konvensi Genewa 1951 mengandung kelemahan-kelemahan. Mengutip Holborn, Joly menulis bahwa konvensi 1951 tersebut tidak di desain untuk menghadapi pengungsi di atas tahun 1951. Definisi itu tidak melibatkan faktor-

⁶ *ibid*, p.3

⁷ Hans Arnold, *op.cit*, p.275

⁸ Robert Cohen and Francis M. Deng (Eds.). *The Forsaken People; Case Studies of the Internally Displaced*, (Washington, D.C.; BIP, 1998).

⁹ UNHCR, *Collection of International Instrument Concerning Refugees*, 2nd edition, Office of UNHCR, Geneva, 1979, p.11

faktor psikologis seperti diskriminasi, perasaan khawatir, dan lain sebagainya.¹⁰ Kriteria pengungsi menurut konvensi 1951 tidak memasukkan adanya latar belakang ekonomi dan lingkungan. Tidak adanya klausul ekonomi dan lingkungan dalam konvensi 1951 karena saat itu dunia masih dipengaruhi oleh perang dunia kedua yang bernuansa politik keamanan dan ini merupakan sebuah kelemahan karena pada masa ini banyak orang yang terpaksa mengungsi karena ancaman yang bersifat ekonomis dan karena alasan lingkungan alam, seperti adanya degradasi lingkungan seperti ancaman kelaparan pangan, bencana alam, kebakaran,¹¹ seperti bencana gempa bumi tektonik dan gelombang tsunami yang melanda Aceh.

Pada tahun 1969, organisasi kerja sama Afrika membuat definisi pengungsi yang jauh lebih komprehensif. Dalam definisi tersebut, seseorang yang terpaksa pergi karena adanya agresi eksternal, pendudukan, dominasi politik luar negeri atau adanya gangguan-gangguan serius dalam *public order* baik terhadap sebagian atau seluruh warga, maka ia dapat digolongkan sebagai pengungsi.¹²

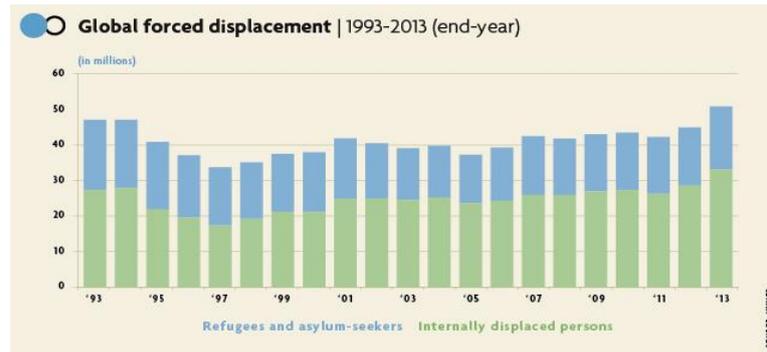
Ada beragam *term* atau istilah yang berbeda-beda terkait aliran manusia ini yang kerap kali membingungkan satu sama lain. *UNHCR* memilahkannya pada 3 kelompok: pengungsi (*refugees*), pencari suaka (*asylum-seekers*) dan pengungsi internal (*internally displaced person/IDP*). Kerap kali istilah-istilah tersebut membingungkan atau tumpang tindih satu sama lain. Seorang pencari suaka adalah seseorang yang menyebut dirinya sebagai pengungsi, namun permintaan mereka akan perlindungan belum selesai dipertimbangkan. Dengan kata lain, pencari suaka adalah mereka yang tidak memperoleh status pengungsi.

Sedangkan yang dimaksud dengan pengungsi internal (IDP) ialah orang-orang yang terpaksa pindah dari tempat tinggalnya ke daerah aman tetapi masih dalam satu negara. Istilah *displaced persons* digunakan oleh PBB untuk pertama kali pada tahun 1972 merujuk pada orang-orang di Sudan yang terpaksa meninggalkan kampung halamannya untuk pergi ke tempat-tempat yang lebih aman, tetapi masih dalam wilayah negara mereka sendiri.

¹⁰ Daniele Joly, *Heaven or Hell; Asylum Policies and refugees in Europe*, Macmillan, London, 1996, pp.17-18

¹¹ Manfred Woehlicke, "Environmental Refugees", *Aussen Politik*, Vol.43, No.3, Quarter, 1992, p.288

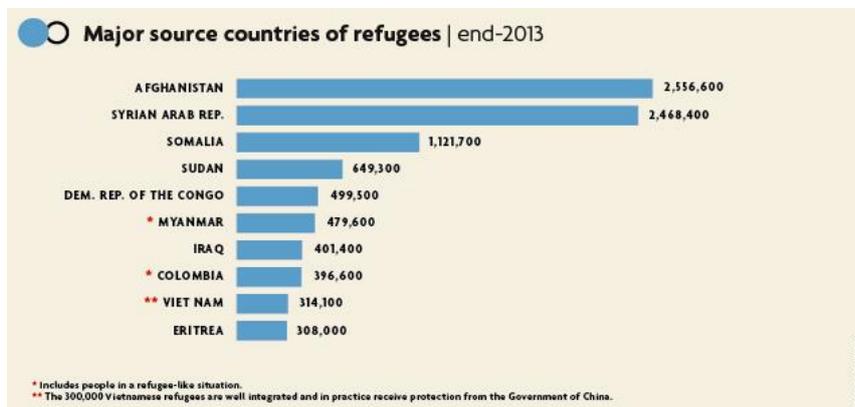
¹² Joly, *op.cit.*, p. 13



Grafik 1. Jumlah Pengungsi dan Pencari Suaka 1993-2013
 Sumber: *UNHCR*

Menurut laporan badan PBB yang menangani pengungsi, *UNHCR*, hingga akhir 2013 terdapat 51,2 juta orang yang terpaksa keluar dari tempat tinggalnya, menjadi pengungsi atau mencari suaka. Jumlah ini meningkat 6 juta dibanding tahun sebelumnya (2012) sebanyak 45, 2 juta jiwa. Peningkatan ini didorong oleh adanya peristiwa kekerasan internal, khususnya di Syiria yang memaksa 2, 5 juta orang mengungsi dan 6, 5 juta pergi dari tempat tinggal mereka. Selain Syiria, Sudan Selatan dan Republik Afrika Tengah juga turut menyumbang jutaan aliran pengungsi akibat konflik internal. Jumlah termasuk belum termasuk orang-orang yang dikelompokkan sebagai *stateless*. Menurut *UNHCR*, hingga 2013, terdapat 3, 5 juta orang yang digolongkan sebagai *stateless*

Dari jumlah tersebut, 16.7 juta tercatat sebagai pengungsi dimana 11.7 juta berada dalam tanggungjawab *UNHCR*. Sisanya terregistrasi di bawah badan yang menangani pengungsi Palestina (*United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East/UNRWA*). Separuh dari jumlah pengungsi dibawah *UNHCR* adalah para pengungsi yang telah berada di pengasingan selama 5 tahun. Dari seluruh pengungsi yang ada, mayoritas berasal dari Afghanistan, Syiria dan Somalia. Ketiga negara itu menyumbang lebih dari separuh total jumlah pengungsi yang ada di dunia.



Grafik 2. Jumlah Pengungsi Berdasarkan Asal Negara
 Sumber: *UNHCR*

Jumlah pencari suaka terdata sebanyak 1.1 juta orang. Sebagian besar diantara mereka mengajukannya ke negara-negara maju. Jerman merupakan negara favorit tujuan. Sebanyak 25.000 pencari suaka adalah anak-anak yang terpisahkan dari keluarganya. Pencari suaka terbanyak dari Syiria yaitu 64.300, Kongo 64.400 dan Myanmar 57.400 pemohon. Sedangkan pengungsi internal tercatat sebanyak 33, 3 juta jiwa. Bagi *UNHCR* dan lembaga bantuan kemanusiaan, memberikan bantuan terhadap pengungsi internal memiliki tantangan yang lebih menantang karena berada di tengah wilayah konflik.

Untuk Indonesia, hingga Juni 2014, terdapat 10.116 pengungsi dan pencari suaka yang terdapat oleh *UNHCR* di Indonesia, dimana 6.286 orang merupakan pencari suaka dan 3.830 orang merupakan pengungsi.

Faktor-faktor yang Mengakibatkan Terjadinya Arus Pengungsi

Seseorang pergi dari “rumah” dengan beragam alasan. Menurut Weiner, arus pengungsi lazimnya terjadi karena empat hal; perang antarnegara (termasuk perang anti kolonial), konflik etnik, perang sipil nonetnik dan lari dari pemerintah otoriter atau rezim revolusioner.¹³ Pandangan Weiner ini melulu lebih berorientasi pada pendekatan politik keamanan sehingga melupakan alasan-alasan lain seperti ekonomi, lingkungan, sosial, maupun lainnya (data jumlah pengungsi Weiner bisa dilihat di lampiran). Weiner mungkin terlalu dipengaruhi oleh definisi dan kriteria mengenai pengungsi berdasarkan konvensi Genewa 1951.

Cohen dan Deng yang secara *simple* melihat dua penyebab utama terjadinya arus pengungsian; konflik etnis baik antarkelompok maupun pemerintah dengan kelompok minoritas) dan terjadi perebutan atas kelangkaan sumber ekonomi yang langka.¹⁴ Lain lagi pandangan Opitz. Menurutnya, beberapa hal yang menyebabkan terjadinya pengungsian adalah karena; problem *nation building* yang belum tuntas sehingga menimbulkan konflik internal, perang sipil, konflik etnis, agama dan lain-lain (konflik *interstate*); karena faktor konflik *innerimperial*, seperti dalam kasus Soviet dan Yugoslavia; adanya *outward delimitation*, terutama dengan negara tetangga; adanya *inward delimitation* atau konflik internal, tetapi bisa juga terjadi karena kerusakan lingkungan di wilayahnya.¹⁵

Dari berbagai pandangan dan beberapa pendapat yang ada, pengungsian bisa terjadi karena landasan ekonomi atau *economic migrant*, reuni keluarga, politik,

¹³ Myron Weiner, “Bad Neighbors, Bad Neighbourhoods, An Inquiry into the Causes of Refugee Flows”, *International Security*, Vol.21, No.1 (Summer, 1996), p.9

¹⁴ Cohen and Deng, *op.cit*, p. 3-4

kekerasan, hak asasi manusia, teroris, degradasi lingkungan, perang *interstate*, perang internal, intervensi negara super power terhadap salah satu gerakan kemerdekaan, persekusi dan kemiskinan, serta kurangnya jaminan perlindungan dari pemerintah mereka.¹⁶

Jika diambil kesimpulan, pengungsian bisa terjadi karena faktor *push* dan *pull*.¹⁷ *Push factors* seperti yang terjadi pada pengungsi Vietnam bahwa pemerintah melakukan politik “buang sampah” sebagai upaya untuk mengurangi beban ekonomi dan politiknya. Sedangkan *pull factors* terjadi karena lebih karena keinginan kuat dari pengungsi itu sendiri untuk menyelamatkan diri kendati di negara asalnya tidak ada paksaan atau dorongan yang bersifat mengusir. Kedekatan alasan (jika tidak disebut mosaik) antara ekonomi dan politik menjadikan sukarnya pemilahan mana migran dan mana pengungsi. Secara gampang, migran terjadi karena dorongan untuk meningkatkan kehidupan ekonomi, sedangkan pengungsi terjadi untuk menyelamatkan diri. Perbedaan ini menjadi semakin sukar manakala terjadi dua alasan sekaligus; prospek ekonomi dan menghindari kekerasan. Pada intinya, pengungsi adalah orang yang tidak lagi yakin terhadap adanya kepercayaan, loyalitas, proteksi dan asistensi yang selayaknya dalam situasi normal diberikan negara padanya.¹⁸

Berbagai Kendala dalam Menangani Pengungsi

Secara teoritis, para pencari perlindungan akan mendapat perlindungan hukum internasional segera setelah mereka melintasi perbatasan negara menuju negara tujuan.¹⁹ Aturan seperti ini terdapat dalam atikel 33 konvensi internasional yang disebut dengan prinsip *non-refoulement*²⁰ yaitu *prohibition of expulsion or return* atau larangan bagi negara untuk menolak atau mengembalikan para pengungsi. Perinsip *non-refoulement* mengharuskan setiap negara untuk menerima, menyediakan tempat, melindungi serta melayani para pengungsi dan melarang untuk menolak kedatangan mereka. Prinsip ini merupakan cerminan dari hak fundamental setiap individu untuk mendapat ketentraman dan keamanan.²¹ Sebaliknya, menerima dan melindungi pengungsi merupakan tugas kemanusiaan²² yang dianjurkan dalam hukum internasional.

¹⁵ Peter J. Opitz, “Refugee and Migration Movements”, *Aussen Politik*, Vol.42, No.3, Quarter, 1991, pp.265-268

¹⁶ Gil Loescher, *op.cit*, pp.5-6, lihat juga Peter Chalk, “The International Ethics of Refugees: A Case of Internal or External Political Obligation?”, *Australian Journal of International Affairs*, Vol.52, No.2, July, 1998, p.149

¹⁷ Gil Loescher, *op.cit*, pp.16-17

¹⁸ *ibid*, p.6

¹⁹ *ibid*, p.143

²⁰ Mengenai asas *refoulement* dapat dilihat dalam UNHCR, *Human Rights and Refugee Protection*, UNHCR, Geneva, 1994, pp.137-147. Juga dalam *Collection of International Instrument Concerning Refugees*, 2nd edition, Office of UNHCR, Geneva, 1979, p.22

²¹ Peter Chalk, *op.cit*, p.153

²² UNHCR, *Human Rights and Refugee Protection*, UNHCR, Geneva, 1994, p.8

Tetapi dalam kenyataannya, penerapan prinsip tersebut sangat sukar sebab, kecuali timbulnya dampak sosial, ekonomi dan politik, negara tujuan sendiri memiliki banyak kendala dalam memberikan perlindungan dan kesejahteraan terhadap warganya. Terlebih-lebih jika negara tersebut miskin. Dalam banyak kasus, negara yang menjadi tempat tujuan kerap menyusupkan pasukannya ke pengungsi yang berada di bawah perlindungan *UNHCR* untuk menciptakan teror dan memerangi mereka agar segera pergi tempat tersebut.²³ Bahkan negara-negara maju seperti Australia, negara-negara Eropa atau Amerika kerap menolak kedatangan para pengungsi yang membutuhkan perlindungan tersebut. Banyak diantara mereka yang terkatung-katung di tengah laut kemudian tewas dihantam gelombang.

Untuk menangani masalah pengungsi yang terjadi di dalam sebuah negara, kendala utama yang dihadapi sistem internasional adalah masalah klasik, yaitu mengenai prinsip kedaulatan dan integritas teritorial serta adanya perinsip non-intervensi ke dalam urusan domestik sebuah negara.²⁴ Akibatnya, lembaga-lembaga internasional kerap tidak dapat berbuat banyak untuk mencegah terjadinya kejahatan kemanusiaan lebih lanjut yang dilakukan oleh negara kepada kaum pengungsi di dalam negeri. Hal seperti ini biasanya terjadi ketika ada konflik antara pemerintah dan etnis mayoritas melawan etnis minoritas seperti yang terjadi di Rwanda antara Hutu yang mayoritas melawan Tutsi, sebaliknya di Burundi antara Tutsi yang mayoritas melawan Hutu yang minoritas.

Arus pengungsi yang paling banyak ditolak kehadirannya oleh negara *host* adalah pengungsi yang terjadi karena adanya konflik internal ataupun eksternal. Selain khawatir terhadap merembesnya konflik ke teritori mereka, Negara-negara *host* khawatir diantara pengungsi tersebut ada yang berstatus sebagai pejuang atau militer yang akan meneruskan perlawanan mereka dari barak pengungsian. Mereka yang seperti itu disebut sebagai *refugee warriors*.²⁵ Di barak-barak pengungsian, para *refugee warriors* biasanya kembali membangun perlawanan mereka. Dalam satu sisi, banyak pihak yang bersimpati terhadap strategi taktik perjuangan dan gerakan mereka. Tetapi bagi *host-state*, keberadaan mereka jelas merupakan ancaman. Bangkitnya kembali perlawanan mereka sangat ditakuti oleh *sender state* dan pasti negara *sender* tersebut tidak akan diam dalam menghadapi para *warriors* tersebut. Karenanya, *refugee warriors* tidak hanya menjadi ancaman stabilitas bagi negara asalnya, tetapi juga bagi *host state*.²⁶

Barak pengungsian yang dijadikan basis perjuangan berstatus dalam yuridis domestik *host state*. Karenanya, segala macam tindakan yang dilakukan didalamnya akan

²³ Gil Loescher, *op.cit*, p.143

²⁴ Cohen and Deng, *Op.cit*, p.5

²⁵ Howard Adelman, "Why Refugee Warriors are Threats", *The Journal of Conflict Studies*, Vol.26, No.2, Winer, 1997, p.49

melibatkan negara *host* tersebut. Pada tataran lebih lanjut, tindakan para *refugee warriors* untuk mengadakan perlawanan akan menyeret *host state* dalam area konflik yang pelik dan dilematis yang mengharuskannya berpijak di dua tempat berbeda sekaligus. Sebagai tuan rumah negara memiliki kewajiban melindungi para pengungsi, terlebih-lebih jika gerakan para pejuang tersebut mendapat simpati dan dukungan dari warga asli *host state*. Tetapi di sisi lain, tindakan pengungsi dapat mengancam stabilitas politik dan keamanan. Pada sisi lain, negara atau rejim yang menjadi sasaran perlawanan biasanya akan menuntut *host state* untuk menangkap para pejuang tersebut atau ia akan melakukannya sendiri kendati itu harus melanggar teritori negara.

Kasus ini yang kerap terjadi di wilayah Libanon Selatan yang melibatkan pengungsi Palestina, Pemerintah Libanon dan Israel. Untuk menghindari ancaman dan konflik dengan Israel, pemerintah Libanon pernah melakukan serangan militer dan penangkapan besar-besaran terhadap para pejuang kemerdekaan Palestina yang berada di wilayahnya. Dalam banyak kasus, militer Israel sendiri kerap melakukan serangan langsung ke wilayah Libanon yang dituduh sebagai markas para pejuang Palestina.

Sebuah negara secara moral mendapat justifikasi untuk menolak pengungsi apabila pertama, penolakan tersebut tidak mengakibatkan hilangnya kebutuhan dasar dari para pengungsi dan kedua, penerimaan pengungsi mengakibatkan biaya yang sangat mahal dan membebani negara penerima.²⁷ Namun sekali lagi, karena tiadanya standar internasional mengenai 'rasa terancam', maka setiap negara akan berhak menafsirkan secara berbeda yang tidak bisa dilepaskan dari unsur kebijakan politis bahkan ideologis.

Tidak efektifnya etika atau moral internasional untuk melindungi para pengungsi dikarenakan beberapa hal. Pertama, lemahnya *power* yang dimiliki lembaga internasional (PBB) yang khusus menangani masalah ini, yaitu *UNHCR*, dalam menerapkan tekanan ke setiap negara. Kedua, tidak adanya kejelasan hukum internasional yang dapat dijadikan pegangan atau petunjuk mengenai standar persekusi. Ketiga dan yang sangat krusial adalah kurangnya dana yang selalu menjadi kendala bagi *regime* pengungsi internasional²⁸ padahal penanganan pengungsi memerlukan biaya yang sangat mahal. Sebagai contoh, biaya penanganan pengungsi Rwanda selama sembilan bulan saja menghabiskan Dana US\$1, 4 milyar.²⁹ Khusus untuk pengungsi Syria, PBB memerlukan dana lebih dari 8, 4.³⁰

Selain itu, Loescher juga menambahkan berbagai kendala yang mengakibatkan tidak efektifnya *UNHCR* seperti adanya peran ganda yang harus dimainkan; melindungi

²⁶ *ibid*, p.50

²⁷ Peter Chalk, *op.cit*, p.159

²⁸ *ibid*, pp.157-158

²⁹ Alan Dowty and Gil Loescher, *op.cit*, p.44

pengungsi sekaligus menjadi pengawas bagi wilayah tersebut.³¹ *UNHCR* sendiri hanya memiliki jumlah anggota yang sangat terbatas, terdiri dari 110 negara. Bahkan di beberapa negara Eropa Timur yang banyak terjadi kasus pengungsian, kecuali Yugoslavia, tidak ada satupun negara yang mau meratifikasi konvensi internasional mengenai pengungsi dan menjadi anggota *UNHCR*.³²

Aliran pengungsi bukan hanya menjadi persoalan HAM dan kemanusiaan saja, tetapi bisa menjadi ancaman bagi keamanan dan perdamaian internasional³³ karena itu, perlu ada intervensi untuk mengaturnya, tetapi yang bersifat nonmiliter atau yang disebut *soft intervention*, yaitu melalui rejim pengungsi internasional atau *UNHCR*.³⁴ Tetapi dalam kenyataannya *UNHCR* dianggap tidak cukup kuat dalam menangani berbagai persoalan pengungsi seperti kekerasan, jaminan perlindungan dan lain-lain, sekaligus menyediakan solusi dalam jangka waktu panjang baik bagi pengungsi tersebut, negara pengirim maupun negara tujuannya.³⁵ Karena itu *UNHCR* harus meyakinkan para *policy makers* di setiap negara bahwa penanganan pengungsi bukanlah permasalahan amal kemanusiaan belaka, tetapi permasalahan politik yang membutuhkan solusi³⁶ terlebih-lebih karena persoalan ini tidak dapat dipisahkan dengan persoalan internasional lainnya, seperti migrasi, hak asasi manusia, keamanan internasional dan bantuan pembangunan.

Strategi komprehensif yang perlu dilakukan guna memecahkan persoalan pengungsi adalah; membentuk lembaga monitoring yang independen di PBB, kewenangan yang lebih luas dari PBB untuk menangani permasalahan hak asasi manusia dan pengungsi, dukungan penuh terhadap departemen PBB bidang kemanusiaan, serta pembentukan basis di tingkat regional sebagai upaya dukungan atau bantuan bagi aktivitas dan basis global.³⁷ Sementara program aksi yang harus dilakukan adalah membentuk basis intervensi kolektif dalam setiap konflik internasional yang dapat mengakibatkan arus pengungsian, jaminan akses internasional untuk memasuki wilayah krisis, dukungan pemerintah untuk mengakui hak-hak perlindungan bagi para pengungsi, penanganan bagi sejumlah pengungsi yang telah lama menetap untuk dipulangkan ke negara asal serta jaminan perlindungan HAM baik saat dipulangkan maupun ketika ia sudah tiba di negeri asalnya.³⁸

³⁰ <http://www.voaindonesia.com/content/pbb-minta-dana-pengungsi-suriyah/2564395.html>

³¹ Gil Loescher, *op.cit*, pp.130-140

³² *ibid*, p.145

³³ Alan Dowty and Gil Loescher, *op.cit*, p.58. lihat juga Cohen and Deng, *Op.cit*, p.1

³⁴ *ibid*, p.61

³⁵ Gil Loescher, *op.cit*, p.129

³⁶ *ibid* p.130

³⁷ *ibid*, pp.184-195

³⁸ *ibid*, pp.196-204

Karena banyaknya kelemahan yang dimiliki, *UNHCR* sendiri pasti tidak akan efektif menangani permasalahan pengungsi. *UNHCR* butuh aktor-aktor lain, terutama organisasi-organisasi non-pemerintah untuk melakukan tugas-tugas kemanusiaan dan tekanan politis ke berbagai pemerintah agar melahirkan sebuah solusi yang tepat. Guna mendukung efektifitas rezim pengungsi global tersebut, penting juga dibentuk sebuah basis regional.³⁹ Pentingnya *regional bases for act* ini karena metode penggunaan pendekatan regional akan jauh lebih efektif, setidaknya, dapat memberikan masukan mengenai persoalan-persoalan sensitif yang tidak diketahui oleh lembaga non-regional.

Kesimpulan

Arus pengungsian bisa terjadi oleh banyak faktor. Mulai dari sebab politik keamanan, seperti perang, ideologi, sampai pada sebab lingkungan atau masalah yang kelihatannya sepele sekali semisal reuni keluarga. Saat ini lebih dari 50 juta orang berstatus pengungsi. Persoalan ini menjadi isu krusial karena terjadinya arus pengungsi tidak hanya menimbulkan permasalahan kemanusiaan belaka, tetapi menimbulkan ancaman keamanan internasional. Permasalahan kemanusiaan dan keamanan internasional bukan lagi monopoli negara tertentu tetapi menjadi kewajiban sistem global untuk menyelesaikannya.

Kendati secara hukum internasional setiap negara secara moral diharuskan untuk melindungi para pengungsi serta adanya jaminan keselamatan bagi mereka, dunia politik yang sangat anarki menyulitkan kaum pengungsi untuk mendapatkan hak-hak mereka. Dalam banyak kasus mereka justru sering terlantar karena tidak ada negara yang mau menerima serta minimnya bantuan internasional yang mengalir. Penolakan negara untuk menerima para pengungsi juga dilandasi oleh banyak alasan yang cukup rasional dan jelas. Negara khawatir kedatangan pengungsi akan melahirkan banyak beban yang sebelumnya telah ada. Jika menanggung warganya sendiri sudah kesulitan, hadirnya pengungsi tentu akan lebih menyulitkan. Alasan negara untuk menolak para pengungsi juga karena alasan moral yaitu menjaga ketertiban negara dan warganya.

Dalam kasus ini, yang saling berdiri berhadapan adalah hak pengungsi untuk mendapatkan perlindungan berdasarkan hukum dan moral internasional melawan hak negara yang memiliki kedaulatan untuk menolaknya berdasarkan pertimbangan moral untuk menjaga stabilitas wilayahnya. Memecahkan perseteruan moral tersebut, maka dibutuhkan sebuah lembaga independen sekaligus kuat dalam menangani pengungsi. Tidak cukup lembaga bahkan, melainkan sebuah regim internasional. Dalam hal ini, PBB telah memiliki departemen yang menangani masalah tersebut, yaitu *UNHCR*. Seperti

³⁹ Cohen and Deng, *op.cit.*, p.12

kemandulan PBB dalam menghadapi kekuatan kedaulatan negara lain, maka begitu pula kemandulan *UNHCR* dalam kenyataannya untuk melindungi dan menjamin para pengungsi karena lembaga ini memiliki berbagai kelemahan fundamental.

Referensi

- Adelman, Howard. "Why Refugee Warriors are Threats", *The Journal of Conflict Studies*, Vol.26, No.2, Winer, 1997
- Arnold, Hans. 'The "Century of the Refugee", A European Century?' *Aussen Politik*, Vol.42, No.3, Quarter, 1991.
- Baker, Pauline H. 1996. *Conflict Resolution Versus Democratic Governance; Divergent paths to Peace?* in Chester A. Croker (et.al) (eds.) *Managing Global Chaos: Sources of and Responses to International Conflict* USIP Press, Washington, D.C.
- Chalk, Peter. "The International Ethics of Refugees: A Case of Internal or External Political Obligation?" *Australian Journal of International Affairs*, Vol.52, No.2, July, 1998.
- Cohen, Robert and Deng, Francis M. (Eds.). 1998. *The Forsaken People; Case Studies of the Internally Displaced*, BIP, Washington, D.C.
- Dowty, Alan and Loescher, Gil. "Refugee Flows as Ground for International Action", *International Security*, Vol. 21, No.1, (summer; 1996)
- Joly, Daniele. 1996. *Heaven or Hell; Asylum Policies and refugees in Europe*. London: Macmillan.
- Kunarto. 1980. *Pengamanan dan Perawatan Pengungsi Vietnam di Pulau Galang, Pulau Galang*.
- Loescher, Gil. 1993. *beyond Charity: International Cooperation and the Global Refugee Crisis*. New York: Oxford University Press.
- Opitz, Peter J. "Refugee and Migration Movements", *Aussen Politik*, Vol.42, No.3, Quarter, 1991.
- Strategic Survey*, April, 1998.
- UNHCR. Collection of International Instrument Concerning Refugees*, 2nd edition, Office of UNHCR, Geneva, 1979.
- UNHCR. Human Rights and Refugee Protection*, UNHCR, Geneva, 1994.
- Woehlcke, Manfred. "Environmental Refugees", *Aussen Politik*, Vol.43, No.3, Quarter, 1992.

FAKTOR SOSIAL-BUDAYA SEBAGAI PENDORONG KRIMEA MELAKUKAN REFERENDUM

Arin Fithriana¹, Elistania²
arin_030302@yahoo.com.au, tanya.heinous@gamil.com

Abstract

New nation state faces the nation and state building to develop and gain national interest. Ukraina's self determination faces the complicated problem by internal and eksternal factors. On internal factor such elite conflict, corruption and hyperinflation, have been challenged for Ukraina's government. Domestic conflict and political chaos have been triggered unsatisfaction and separatism. Conducting by qualitative reseach and applicating socio culture concept, political culture and the scope of referendum, this research aims analyze the socio culture as Crimean trigger factor to conduct the referendum. This research found that the role of Crimean socio culture influenced social capital, cohesion, patisipation, entrepreneurial spirit and government loyalty based on historical context. Besides external factors such democracy as part of globalization, Crimea geographical border by Russia and Russia's interest as part of the fulfillment of Crimean's problem which was not find from the Ukranian government. Thus referendum as the point to solve the Crimean problem especially as base on current and prospect development of Crimean.

Keywords: *sosio culture, political culture, referendum, Crimea, Ukraina*

Pendahuluan

Berlangsungnya Krisis Ukraina ditandai dengan diberhentikannya Presiden Ukraina yakni Viktor Yanukovych dari jabatannya.³ Sebab penurunannya ialah Yanukovych dinilai gagal mengatasi gelombang demonstrasi yang telah berlangsung sejak Desember 2013 sekaligus dituduh melakukan pembunuhan masal dalam mengatasi demonstran tersebut. Lebih dalam, penurunannya disebabkan karena Yanukovych membatalkan perjanjian dengan Uni Eropa dan lebih memilih melanggengkan bisnis dengan Rusia. Dengan batalnya perjanjian tersebut, sejumlah protes kembali terjadi khususnya dari masyarakat pro-Uni Eropa sejak tanggal 24 Februari 2014.⁴

Terhitung sejak Ukraina menjadi negara pemohon dalam keanggotaan Uni Eropa, masyarakat Ukraina memang telah terbagi ke dalam kelompok pro dan kontra Uni Eropa. Salah satu wilayah yang sangat kontra terhadap Uni Eropa ialah Krimea sebagai bagian

¹ Dosen Program Studi Ilmu Hubungan Internasional FISIP Universitas Budi Luhur, Jakarta.

² Alumnus Program Studi Ilmu Hubungan Internasional FISIP Universitas Budi Luhur, Jakarta. Saat ini sedang studi lanjut pada Kajian Eropa di Universitas Indonesia Jakarta

³ "Ukraine's political upheaval boosts some while others just get the boot" diambil dari <http://www.cnn.com/2014/02/24/world/europe/ukraine-winners-and-losers/index.html?iref=allsearch> diakses pada 8 April 2014

⁴ "Exit polls show Yanukovich leads Ukraine presidential election" diambil dari <http://www.cnn.com/2010/WORLD/europe/02/07/ukraine.elections/index.html?iref=allsearch> diakses pada 8 April 2014

dari wilayah Timur Ukraina yang memiliki otoritas sendiri di negara tersebut.⁵ Krimea menolak legitimasi pemerintah yang didukung Barat dalam memproklamkan diri mereka untuk bergabung ke Rusia setelah pemerintah di Kiev memperkenalkan langkah-langkah yang bertujuan melawan Rusia di negara tersebut.⁶

Pembicaraan mengenai referendum di Krimea tercetus setelah konfrontasi berkepanjangan antara pihak oposisi dengan Pemerintah di Kiev. Aksi protes anti-Rusia yang digunakan oleh beberapa nasionalis Ukraina yang mengambil kekuasaan di Kiev membuat warga Krimea ketakutan. Puncaknya, referendum rakyat Krimea yang bermaksud untuk memisahkan diri dari Ukraina dan keputusan Rusia untuk menerima Krimea dalam Federal Rusia-langsung disambut pasukan elite Rusia pada 22 Maret 2014 merebut pangkalan udara militer Ukraina di Belbek, Krimea.⁷

Kondisi ketidakstabilan politik di Ukraina memang telah berlangsung selama bertahun-tahun dengan tantangan politik yang kompleks. Berbagai persoalan budaya, etnis dan pengakuan, menjadikan negara tersebut terutama rentan terhadap konflik internal. Proses sosial-politik dan sosial-ekonomi, antaretnis dan hubungan antar agama di Krimea menjadi salah satu faktor yang memiliki dampak serius, tidak hanya pada situasi di Ukraina, akan tetapi juga pada kebijakan dan hubungan dengan negara asing lainnya. Keberpihakan Krimea terhadap Rusia bermakna besar dalam konflik Ukraina dan dinilai semakin memperparah keadaan hingga melibatkan berbagai negara besar turut campur dalam konflik Ukraina ini. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka fokus permasalahan dalam penelitian ini ialah, *“bagaimana faktor sosial budaya menjadi pendorong pembuatan referendum Krimea?”*

Sejarah dan Perkembangan Sistem Politik Ukraina

Perubahan politik merupakan bagian dari perubahan sosial yang secara tidak langsung berdampak pada perubahan sistem sosial yang ada dalam sebuah kelompok masyarakat, termasuk organisasi ekonomi dan politiknya. Sebagaimana negara baru, Ukraina juga mengalami proses transisi dalam *nation* dan *state building*-nya. Transisi dalam sistem politik ini bukanlah perkara mudah. Pasca perang dingin, model pembangunan sistem politik dunia mengacu pada modernisasi yang mengarah pada

⁵ “Christian Le Miere, “Evaluating Russia’s Black Sea Fleet,” International Institute of Strategic Studies”, February 26, 2014.

⁶ Putin’s Q&A Session 2014: Krimea, Ukraine, Gas, Foreign Policy and Mass Surveillance diambil dari <http://en.ria.ru/politics/20140417/189252781/Putins-QA-Session-2014-Krimea-Ukraine-Gas-Foreign-Policy-and.html> diakses pada 9 April 2014

⁷ “Ukraine orders Krimea troop withdrawal as Russia seizes naval base” diambil dari <http://www.cnn.com/2014/03/24/world/europe/ukraine-crisis/index.html?iref=allsearch> diakses pada 9 April 2014

bentuk negara bangsa yang demokratis dengan mengembangkan sistem ekonomi kapitalis, masyarakat rasional yang sekuler, *goal oriented*, aktif dan partisipatif.⁸

Sistem politik yang berkembang di Ukraina mendapatkan pengaruh dari pola yang berkembang di Eropa Timur, dimana transisi demokrasi yang terjadi belum sepenuhnya demokratis.⁹ Rakyat dan penguasa masih perlu waktu dalam memaknai dan mengimplementasi nilai-nilai demokrasi. Sebagaimana beberapa literatur menyebutkan bahwa transisi yang terjadi di negara-negara post komunis secara umum mengalami masalah yang berbeda dengan transisi negara baru lainnya di dunia, misalnya seperti di Asia dan Amerika Latin. Leslie Holmes mencatat bahwa ada hal yang membedakan pada transisi negara post komunis dengan negara lainnya. Holmes mendeskripsikan ada tiga belas faktor dalam transisi post-komunis¹⁰.

Ketiga belas faktor tersebut memang terjadi pada transisi politik Ukraina sebagai negara post-komunis. Kondisi Ukraina saat itu menggambarkan bangsa merdeka tanpa negara modern atau kesatuan komunitas politik yang terikat dalam batas wilayahnya.¹¹ Hal ini karena kemerdekaan Ukraina tidak diikuti dengan kemerdekaan dan kebebasan entitas pembentuk negara di dalamnya. Struktur pembentuk sistem politik dalam hal ini ekonomi, politik dan keamanan masih terikat dan bergabung dengan Soviet. Kondisi inilah yang menjadi tantangan bagi Ukraina sekaligus menjadi potensi konflik.

Presiden pertama Ukraina terpilih, Leonid Kravchuk merupakan mantan anggota partai komunis yang berusaha membangun institusi politik yang kuat. Hal yang paling utama adalah berusaha melepaskan diri dari pengaruh dan kepentingan Soviet. Misalnya Ukraina melakukan negosiasi dengan Rusia dan beberapa negara post-Soviet berkaitan dengan keamanan, termasuk didalamnya kekuatan militer, tentara, armada di Laut Hitam dan 200 senjata nuklir yang berada di wilayah Ukraina. Hal ini cukup pelik karena berkaitan dengan konsekuensi dan komitmen Ukraina sebagai negara merdeka dan berdaulat.

Tahun 1994, Kravchuk digantikan oleh Leonid Kuchma yang kemudian pada 1996 mengenalkan konstitusi baru dan mata uang baru Hryvnia.¹² Sebagai salah satu negara eks-Soviet, Ukraina merupakan negara yang memang tidak menyusun konstitusi baru setelah mendapatkan kemerdekaan. Namun, di bawah kuasa Kuchma, Ukraina memiliki

⁸ Wsevolod W. Isajiw (ed), 2003, *Transition : sosial Change in Ukraine in Western Perspective*, (Toronto: Canadian Scholars' Press Inc), p. 4

⁹ Elena Bashkinova, *Russia, Belarus and Ukraine: Construction of Democratic Communities*, dalam Hans-Dieter Klingemann (ed), 2006, *Democracy and Political Culture in Eastern Europe* (Canada: Routledge), p. 356.

¹⁰ Lebih lanjut lihat: Wsevolod W. Isajiw (ed), 2003, *Transition : sosial Change in Ukraine in Western Perspective*, (Toronto: Canadian Scholars' Press Inc), p. 23

¹¹ Paul Kubicek, 2008, "The History of Ukraine", (USA: Greenwood Publishing Group), p. 141

¹² *Ibid.*

konstitusi baru. Konstitusi ini pada dasarnya memungkinkan Ukraina untuk memiliki properti pribadi, meniadakan dewan lokal yang menentang reformasi, dan membuat bahasa Ukraina menjadi bahasa resmi negara tersebut.¹³ Kuchma dipandang lebih positif oleh kelompok nasionalis yang lebih berorientasi Barat. Hal ini terlihat dari komitmennya terhadap demokrasi dan reformasi ekonomi. Konstitusi baru menekankan adanya pemisahan kekuasaan antara presiden dan parlemen. Konstitusi juga mengatur kekuatan presiden untuk menunjuk dan memberhentikan perdana menteri dan beberapa pejabat negara seperti hakim, jaksa, kepala negara bagian dan badan privatisasi.¹⁴

Perkembangan sistem politik tersebut sejatinya memang telah membuat Ukraina menjadi negara yang secara politik ditentang oleh bangsanya sendiri. Dengan transformasi yang dibawa Kuchma, negara ini seringkali diwarnai oleh konflik internal karena terbagi dua kubu-Timur dan Barat. Konflik internal inilah yang selalu diprediksi dapat memicu rusaknya masa depan negara tersebut. Sehingga secara internal, lepasnya Ukraina dari Uni Soviet berdampak pada perubahan politik yang ada. Perubahan politik ini secara umum merupakan bagian dari perubahan sosial, sehingga secara tidak langsung akan berdampak pada sistem sosial dalam sebuah kelompok masyarakat. Perubahan juga berdampak pada struktur dan fungsi masyarakat termasuk organisasi ekonomi dan politik.

Beberapa pemikir juga menambahkan adanya komplikasi pada negara baru seperti halnya Ukraina, yang bukan hanya mengenalkan reformasi politik dan ekonomi secara berkelanjutan, akan tetapi juga membangun institusi dan negara sementara melupakan upaya penyatuan negara bangsa.¹⁵ Ini yang sering menjadi bagian dari kegagalan negara baru karena ekonomi pasar dan demokrasi tidak dapat berdiri tanpa adanya sistem politik yang kuat dan berfungsi sebagaimana mestinya. Artinya ada kesatuan dalam tiga hal yakni negara, masyarakat dan identitas nasional.

Dapat dikatakan berfungsinya sistem politik berkaitan dengan sosial budaya yang dianut oleh entitas pembentuknya. Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa Ukraina merupakan negara yang memerdekakan diri dari Uni Soviet, maka nilai-nilai sosial budaya masyarakatnya masih diwarnai dan terpengaruh dari penguasa sebelumnya. Berdasarkan sejarah, Ukraina terbentuk sebagai entitas negara pada abad masehi dengan berdirinya kerajaan Kyiv Rus dengan pusat pemerintahan di Kyiv hingga akhir abad 12 Masehi. Ukraina mengalami kejayaan dan perkembangan yang cukup pesat.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Otfinoski, Steven. (2005). "Nation in Transitions: Ukraine. Part II: Ukraine Today – Government." 2nd edition. New York: Library of Congress Cataloging-in-Publication Data

¹⁵ Wsevolod W. Isajiw (ed), 2003, Transition : sosial Change in Ukraine in Western Perspective, (Toronto: Canadian Scholars' Press Inc), p. 25

Penyerangan Mongol menjadikan kerajaan Kyiv Rus terpecah dan menyebabkan perkembangannya melamban. Ukraina mengalami perkembangan lagi ketika berada di bawah Uni Soviet pada tahun 1917. Meskipun pada tahun 1920 bahasa Ukraina ditetapkan sebagai secara umum sebagai bagian dari pemberantasan buta huruf, namun pada tahun 1930 sampai 1980 kebijakan Russifikasi telah menggeser penggunaan bahasa Ukraina menjadi bahasa Rusia.¹⁶ Kebijakan Russifikasi ini bukan hanya berdampak pada bahasa, namun juga pada banyak hal termasuk seni, budaya, nilai dan kepercayaan. Dampak dari Russifikasi inilah yang secara umum menjadi masalah konflik internal pada negara-negara eks Uni Soviet termasuk Ukraina. Hal ini karena proses asimilasi tidak berjalan dengan sempurna dalam entitas masyarakat karena dipaksakan dari atas.

Tersendatnya fungsi sistem politik di Ukraina terjadi salah satunya disebabkan oleh dampak Russifikasi tersebut. Ada tarik menarik antara kelompok reformis yang pro barat dan kelompok yang pro Rusia. Terpilihnya presiden Kravchuk pasca independen (1991 – 1994) meskipun bertekad mengembangkan pemerintahan yang lebih demokratis, namun pada implementasinya pemerintahan masih terpusat pada eksekutif,¹⁷ sehingga entitas sistem politik lainnya tidak berjalan dengan maksimal. Bahkan dapat dikatakan tidak terjadi reformasi politik dan ekonomi. Pada masa kepemimpinan Leonid Kuchma (1994 – 2004) terjadi reformasi politik dan ekonomi dengan memberlakukan konstitusi baru. Konstitusi ini memuat tentang pemisahan kekuasaan antara presiden dan parlemen.¹⁸ Dengan adanya pemisahan ini, maka diangkatlah perdana menteri. Reformasi memang terjadi dengan adanya keterbukaan pada berbagai bidang, namun keterbukaan ini pula yang menyebabkan maraknya tindak korupsi yang berdampak pada hiperinflasi. Keterbukaan ini pula yang menjadi kekhawatiran penguasa dalam hal ini presiden terhadap *status quo*-nya yang kemudian memberlakukan penekanan terhadap pers.¹⁹

Sejarah dan Perkembangan Budaya Politik Republik Otonom Krimea

Berbicara mengenai sosial budaya berkaitan erat dengan aspek yang lain termasuk pembangunan dalam kerangka *nation building* dan *state building*. Kondisi sosial budaya Krimea berkaitan erat dengan sejarah Krimea. Berdasarkan letak geografis, Krimea berada diujung timur Ukraina yang berbatasan dengan laut Hitam. Letak geografis yang cukup penting (*frontier area*) sebagai penghubung Ukraina dengan beberapa wilayah di

¹⁶ *Ibid*

¹⁷ Andrey A. Meleshevich, 2007, "Party Systems in Post-Soviet Countries: A Comparative Study of Political Institutionalization in the Baltic States, Russia, and Ukraine. Plgrave Macmillan

¹⁸ *Ibid*.

¹⁹ Otfinoski, Steven. (2005). "Nation in Transitions: Ukraine. Part II: Ukraine Today – Government." 2nd edition. New York: Library of Congress Cataloging-in-Publication Data

Eropa dan Asia. Posisi ini pula yang menjadikan Krimea lebih beragam dibandingkan dengan wilayah lain di Ukraina. Interaksi dengan berbagai budaya dan kepentingan dari luar (Mongol, Ottoman, Jerman, dan Rusia) di sisi lain dianggap merugikan, namun disisi lainnya menjadikan Krimea sebagai target penting.

Rusia sejatinya telah dikenal menjadi kekuatan dominan di Krimea sejak menguasai kota itu tahun 1783, meski akhirnya menjadi milik Ukraina sejak pecahnya Soviet.²⁰ Kebijakan semacam Rusifikasi dijalankan pada masa Tsar Rusia dengan elemen kristenisasi serta penerapan bahasa Rusia sebagai bahasa administratif. Kebijakan Rusifikasi adalah me-Rusia-kan segala sesuatu hasil peradaban manusia ke dalam bentuk yang diterima oleh bangsa Rusia melalui asimilasi budaya dan proses-proses budaya lainnya²¹. Dampak dari kebijakan ini adalah memunculkan *ethnonationalism* di kalangan masyarakat. Langkah ini juga dianggap memarjinalkan bangsa non-Rusia. Karena nasionalisme yang terbentuk berasal dari atas dan bukan berakar dari masyarakat, karena nasionalisme bisa menjadi faktor yang rumit dalam perkembangan negara dan menjadi pendorong pada perkembangan yang lain.²² Sebagaimana yang disampaikan Nodia, bahwa nasionalisme ibarat mata uang dengan dua sisi. Sisi pertama adalah politik dan kedua adalah etnik. Tidak ada nasionalisme tanpa adanya etnisitas/sentimen etnis sebagai bagian pembentuk substansi politik.²³

Beberapa ahli membedakan antara Rusianisasi dengan Rusifikasi. Rusianisasi lebih condong pada penyebaran bahasa, budaya dan bangsa Rusia ke dalam wilayah dan budaya bangsa non Rusia. Sedangkan Rusifikasi menitikberatkan pada proses perubahan label dan identitas suatu etnis atau bangsa non-Rusia menjadi Rusia. Sebenarnya antara Rusia dan non-Rusia yang berada di wilayah Eropa tengah dan timur berasal dari rumpun yang sama yaitu bangsa Slavia Awalnya mereka bermukim di sisi timur Pegunungan Carpathia (wilayah Slowakia, Hungaria dan Ukraina), kemudian berpencar ke arah timur, barat dan selatan. Bangsa Slavia yang berpindah ke timur menurunkan etnis Rusia, Ukraina dan Belarus. Sedangkan yang berpindah ke arah selatan, melahirkan etnis Slovenia, Kroasia, Bosniak, Serbia, Macedonia dan Bulgaria. Kemudian yang tinggal di barat melahirkan bangsa Polandia, Ceko dan Slowakia. Meskipun mereka berbeda suku dan budaya karena keterisolasian dan perpindahan tadi, namun secara umum kelompok-kelompok Slavia tadi tetap mempunyai kesamaan dalam bahasa dan unsur budaya dasarnya. Kelompok terbanyak adalah etnis Russia yang

²⁰ Sarah Whitmore, 2004, *State-Building in Ukraine (The Ukrainian Parliament, 1990-2003)*, New York: RoutledgeCurzon, Taylor for French Group.

²¹ Nikolai Berdyaev, 1947, *Russian Idea*, terj. R.M. French, (London: Geoffrey Bless, Ltd) p. 23

²² E.J Hobsbawn, 2000, second edition, *Nations and Nationalism since 1780: Programme, Myth and Reality*, (UK:Cambridge University Press) p. 8

²³ Ghia Nodia, *Nationalism and democracy*, dalam jurnal *Democracy*, vol. 3 No.4 1992, p. 14-15

mencapai jumlah sekitar 100 juta jiwa dan tersebar dari Kaliningrad di Laut Baltik hingga Yukaghir di Asia Timur Jauh. Umumnya kaum Slavia menganut agama Nasrani, terutama Ortodoks dan Katolik Roma.²⁴

Maka dapat dikatakan di sini bahwa sosial budaya yang berkembang di Krimea merupakan pengaruh dari berbagai etnis. Pengaruh ini menjadi cukup signifikan dalam pencapaian integrasi/kristalisasi masyarakat Krimea dan pembentukan identitasnya. Krimea mendapatkan pengaruh dari sosial budaya Slavia, Mongol, Turki (Islam) dan Rusia. Mongol berpengaruh di Krimea karena penguasaannya secara administratif yang menjadikan wilayah ini sebagai penopang dan pintu gerbang Mongol ke Eropa. Selain itu Islam dalam hal ini identitas Muslim mempunyai pengaruh penting karena menjadi agama negara di bawah Khanate ketika semenanjung ini secara keseluruhan di bawah satu pemerintahan. Islam berkembang bukan hanya sebagai agama karena ajaran Islam juga mendasari aturan hukum Khanat, Islam dan ajarannya menjadi kekhawatiran tersendiri bagi Kekaisaran Rusia yang mengembangkan Kristen. Kondisi ini juga yang berpengaruh terhadap deportasi yang dilakukan Stalin atas dukungan negara-negara Muslim terhadap Krimea.²⁵

Selama di bawah kekaisaran Rusia, Krimea mengalami perang saudara yang kemudian mendapatkan kemerdekaannya pada tahun 1917 berkaitan dengan kejatuhan Tsar. Namun kemerdekaan tersebut bersifat sementara karena pada tahun 1918 Krimea dikuasai oleh rezim Bolshevik. Krimea mendapatkan status sebagai wilayah otonom namun pada saat perang dunia II, rakyat Krimea dituduh berkomplot dengan Jerman, sehingga pada tahun 1944, Stalin mendeportasi penduduk Krimea Tatar sebagai bentuk hukuman pengasingan. Mereka dideportasi ke wilayah Ural, Siberia dan Asia Tengah.²⁶ Kebijakan Stalin dalam mendeportasi ini juga merubah status Crimean Tatar dari Republik Otonomi (ASSR) menjadi provinsi (*oblast*).²⁷

Pada tahun 1954, Krimea telah diberikan ke Ukraina sebagai isyarat baik dari Khrushchev.²⁸ Dalam dokumen yang tertulis, Khrushchev tidak pernah membayangkan bahwa Ukraina akan berhenti menjadi bagian dari Uni Soviet dan bahkan dapat memiliki Krimea sendiri. Begitupun dengan etnis Rusia yang tinggal di Krimea yang melihat diri mereka sebagai orang Rusia pertama. Ketika Ukraina merdeka pada 1991, Parlemen

²⁴ Greta Lynn Ueling, 2004, *Beyond Memory: The Crimean Tatars' deportation and Return*, (New York: Palgravw MacMillan) p. 34

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Siapakah Orang Tatar diambil dari <http://nationalgeographic.com/berita/2014/03/siapakah-orang/tatar> diakses pada 10 Januari 2015

²⁷ Gwendolyn Saase, 2007, *The Crimea Question: Identity, Transition and Conflict* (Harvard College) p.4

²⁸ Otfinoski, Steven. (2005). "Nation in Transitions: Ukraine. Part II: Ukraine Today – Government." 2nd edition. New York: Library of Congress Cataloging-in-Publication Data

Krimea menuntut untuk menjadikan mereka sebagai sebuah Republik Otonom. Republik Ukraina menerima tuntutan tersebut akan tetapi menolak suara Krimea untuk memerdekakan diri pada 1992. Krimea terus bertahan dengan melakukan hal-hal berikut: pada 1992, Parlemen Krimea mengembalikan konstitusi yang ditangguhkan; pada Agustus 1994, Krimea mendeklarasikan sebagai Kota Rusia. Di balik pemberontakan tersebut, Pemerintah Ukraina selalu berusaha untuk membawa Krimea kembali pada lingkup dan pengaruh Ukraina, salah satunya ialah dengan menyetujui konstitusi baru bahwa Krimea mendapatkan otonomi lebih.

Sejarah tersebut telah membuktikan bahwa Rusia telah sejak lama menguasai Krimea, hal ini ditunjukkan dengan berdirinya pangkalan angkatan laut utama (Armada Laut Hitam) di Kota Krimea bernama Sevastopol. Kebijakan Rusia terhadap Ukraina memang seringkali menyulitkan Ukraina. Hal ini membenarkan bahwa Krimea sering kali disebut menjadi sebagai salah satu pemicu konflik internal negara tersebut.

Peningkatan Eskalasi Konflik di Ukraina

Memasuki abad ke-21, Ukraina semakin menghadapi banyak masalah terutamanya persoalan internal. Meski telah merdeka, Ukraina dinilai masih sangat tergantung pada negara lain untuk banyak hal, yakni energi, modal, dan perdagangan. Persoalan ini semakin didorong oleh adanya dualitas kepemimpinan Yanukovych dengan berpihak kepada Barat (Uni Eropa) dan Timur (Rusia). Dualitas ini menyebabkan sekelompok organisasi menuntut penurunan Yanukovych dan menyerukan pembebasan mantan Perdana Menteri Yulia Tymoshenko. Eskalasi krisis ini terus bergulir dengan melibatkan tiga aktor besar: AS, Uni Eropa (Barat), dan Rusia (Timur).

Krisis Ukraina didahului oleh persaingan antara Barat dan Rusia dalam orientasi *geoeconomic* masa depan Ukraina. Akar krisis terletak pada perang energi yang terjadi tahun 2008 antara Rusia dan Georgia, yang kemudian diakhiri dengan prospek perluasan keanggotaan Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) ke Georgia dan Ukraina.²⁹ Melihat perluasan yang dilakukan NATO tersebut, maka pada 2009, Rusia membuat proyek andalannya yakni *customs union* bersama dengan sebagian besar negara eks-Soviet, termasuk Ukraina. Proyek tersebut ditandai dengan penandatanganan perjanjian pembangunan Uni Ekonomi Eurasia (*Eurasian Economic Union*) pada Mei 2014.³⁰ Barat menduga bahwa Moskow mulai membangun Komunitas Rusia yang dipimpin di Eurasia yang akan memberikan manfaat ekonomi tertentu pada Rusia serta posisi tawar kepada

²⁹ Dmitri Trenin, 2014, *the Ukraine Crisis and the Resumption of Great-Power Rivalry*. Russia: Carnegie-Moscow Centre

³⁰ *Ibid.* hlm.4.

benua-tetangga yakni ke Barat-Uni Eropa dan ke-Timur-China. Sementara itu bagi Uni Eropa, Ukraina merupakan salah satu negara yang menjadi tujuan perluasan yang dilakukan mereka. Baik Barat dan Moskow melihat Ukraina sebagai elemen penting dari proyek geopolitik mereka sendiri. Ketiga entitas tersebut melihat Ukraina sebagai *zero-sum game* dan bekerja keras untuk mempengaruhi hasil yang akan didapatkan mereka.³¹

Meskipun memperkuat hubungan dengan Rusia, banyak masyarakat Ukraina mempertimbangkan keamanan bangsa mereka dengan negara-negara Eropa Barat dan Amerika Serikat. Sikap ini ditunjukkan dengan memulai proses panjang yakni mengajukan permohonan keanggotaan NATO. Akan tetapi, situasi tentatif Ukraina dalam keanggotaan NATO dan permasalahannya dengan AS telah membuat hubungan negara tersebut lebih dekat dengan Rusia. Saat itu, Vladimir Putin seringkali membantu Ukraina dengan bantuan keuangan dan perdagangan. Hingga tahun 2004 Rusia memasok 70 persen energi dan Ukraina adalah mitra ekspor terbesar Rusia. Ukraina telah mentransformasikan dirinya menjadi negara transit Rusia. Dalam hal ini, Putin membuat kebijakan menggunakan kelemahan Ukraina dengan kekuatan sendiri. Sementara AS masih tidak terganggu oleh hubungan kedua negara tersebut. Bahkan AS melihat Ukraina akan menjadi pemimpin dalam Gerakan Eropa Timur (*Eastern Europe's Movement*) menuju demokrasi.³²

Ukraina di bawah kepemimpinan Presiden Viktor Yanukovych dan pendukungnya dari wilayah timur Donetsk memang terbiasa melakukan manuver terhadap Uni Eropa dan Rusia, dengan tujuan selalu mencari hubungan yang lebih baik.³³ Yanukovych, untuk alasan politik luar negeri memberi harapan tinggi bagi Uni Eropa. Namun di satu sisi, Presiden Ukraina tidak pernah bisa mengamankan bantuan keuangan yang wajar dari Brussels untuk mengkompensasi pukulan telak bagi industri Ukraina yang akan dihasilkan dari hubungan ekonomi yang lebih erat dengan Uni Eropa. Pada saat yang sama, Yanukovych harus menghadapi tekanan yang dilakukan oleh Rusia. Melihat kedekatan Ukraina dengan Uni Eropa, maka Moskow menunjukkannya dalam bentuk hambatan perdagangan dan paket bantuan serta sengketa pasokan gas alam. Sebagai akibatnya, pada November 2013, Yanukovych tiba-tiba menghentikan pembicaraan politik dan perjanjian AA (*Association Agreement*) dengan Uni Eropa dan lebih menerima paket keuangan dan ekonomi dari Rusia.³⁴ Pada 17 Desember tepatnya, Vladimir Putin sepakat untuk membeli 15\$ milyar utang Ukraina dan memberikan harga pasokan gas Rusia yang

³¹ *Ibid.*

³² Dmitri Trenin, 2014, *the Ukraine Crisis and the Resumption of Great-Power Rivalry*. Russia: Carnegie-Moscow Centre

³³ *Ibid.*

³⁴ *Ukraine: Running out of Time*. Crisis Group (Working to prevent conflict worldwide), 2014.

lebih rendah dengan sekitar harga sepertiga. Kesepakatan ini dinilai sebagai hadiah dari Rusia karena Ukraina tidak menandatangani AA.³⁵

Keputusan Yanukovich tersebut akhirnya disambut oleh protes massal di pusat kota Kiev, yang segera berubah menjadi kebuntuan permanen di ibukota, tepatnya di *Independence Square*. Sebanyak 800.000 orang menduduki gedung kota Kiev. Kebanyakan demonstran adalah orang-orang biasa yang menderita kemiskinan dan sangat marah pada koruptor Ukraina, termasuk keluarga Yanukovich.³⁶ Protes sipil ini dikenal sebagai Maidan, yakni kelompok nasionalis yang terutamanya berasal dari Ukraina Barat, yang selalu bersikeras pada identitas nasional Ukraina yang jelas terpisah dan bertentangan dengan Rusia. Selanjutnya, pada pertengahan Februari 2014, situasi di pusat Kiev berubah menjadi kekerasan. Ini pertama kali Yanukovich muncul dan langsung menggunakan kekerasan untuk membubarkan para Maidan, yang pada saat itu telah membentuk kekuatan tempur yang dibangun di sekitar sebuah organisasi nasionalis disebut Sektor Kanan.³⁷ Organisasi ini memiliki sifat ultra-radikal dan sifat 'Nazi'. Maidan diketahui didorong oleh kelas menengah yang menolak Yanukovich sebagai simbol dari aturan main pemerintah.

Bentrokan ini dinilai sebagai kekerasan terburuk selama hampir 70 tahun.³⁸ Mendengar korban meningkat pada aksi protes tersebut, Polandia, Jerman dan Prancis (bertindak atas nama Uni Eropa), menengahi urusan antara Presiden Yanukovich dan pihak oposisi. Negosiasi dimediasi oleh para Menteri Luar Negeri Prancis, Jerman, Polandia dan perwakilan Uni Eropa. Mereka membuat perjanjian dengan para pemimpin pemerintah dan oposisi Ukraina. Akan tetapi, kesepakatan tersebut ditolak oleh Maidan yang lebih radikal dan menuntut penguduran diri langsung presiden.³⁹ Pada tanggal yang sama, ketika Pemerintah Yanukovich runtuh, para demonstran yang terdiri dari mahasiswa, seniman, intelektual dan beberapa aktivis bergabung dengan anggota oposisi menyerukan pembebasan mantan Perdana Menteri Yulia Tymoshenko.

Dorongan Pembuatan Referendum sebagai Opsi

Perbedaan pendapat internal masyarakat Ukraina terbagi ke dalam pro dan kontra Yanukovich. Sebagian pengunjung rasa pro-Yanukovich menolak gagasan perluasan yang dilakukan Uni Eropa dengan alasan takut bahwa kesepakatan tersebut akan lebih

³⁵ Lehne, 2014: 7-8

³⁶ Ukraine: Running out of Time. Crisis Group (Working to prevent conflict worldwide), 2014.

³⁷ *Ibid.* hlm. 15

³⁸ *Ibid.* hlm. 18

³⁹ "The Ukraine Crisis and the End of the Post-Cold War European Order: Options for NATO and the EU". Centre for Military Studies. University of Copenhagen.

berbahaya bagi perekonomian Ukraina dan mata pencaharian mereka.⁴⁰ Sementara menurut kelompok Maidan, Yanukovich adalah orang timur yang sedang memperkuat kekuasaannya di Ukraina. Krimea sebagai bagian dari Timur Ukraina merupakan basis pendukung Yanukovich terbesar. Pecahnya kepercayaan masyarakat Ukraina ini memang telah berlangsung sejak negara tersebut merdeka. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, faktor sosial-budaya yang terjalin antara Krimea dengan Rusia dalam sejarahnya membentuk masyarakat Krimea erat dengan Rusia. Dengan 70% populasi orang Rusia di Krimea, kenyataan yang harus diterima Ukraina ialah bahwa mereka lebih memilih kembali ke era Soviet atas alasan hidup mereka lebih baik sebelumnya daripada setelah bergabung dengan Ukraina.⁴¹

Krimea merupakan tujuan destinasi nomor satu, dengan pantai dan resort Laut Hitam. Selain itu Krimea merupakan salah satu dari tiga kawasan industri terbesar di Ukraina. Namun masalah yang paling diperebutkan adalah Armada Laut Hitam di Sevastopol, ibukota Krimea. Rusia menyatakan bahwa armada angkatan laut dan kota tersebut adalah properti mereka. Ukraina menjawab bahwa armada tersebut adalah wilayah kedaulatannya dan Ukraina menolak menyerahkan Krimea. Ukraina merasa bahwa jika Rusia mengambil alih armada tersebut maka akan digunakan untuk mengambil seluruh wilayah Krimea.⁴² Pada tahun 1997, kedua negara telah menandatangani kesepakatan yang membagi armada Laut Hitam diantara mereka. Sementara Krimea tetap menjadi bagian dari kedaulatan Ukraina. Sementara Rusia diizinkan untuk menyewa pelabuhan sekitar Sevastopol selama 20 tahun untuk hampir 100\$ per tahun.⁴³

Dengan kompleksitas dorongan tersebut, masyarakat Krimea akhirnya memutuskan untuk melaksanakan referendum pada 16 Maret 2014, berdasarkan legislasi dari Republik Otonomi Krimea maupun Pemerintah Daerah Sevastopol. Surat suara disediakan dalam bahasa Rusia, Ukraina dan Krimea Tatar. Dua pilihan yang terdapat pada surat suara tersebut dalam bahasa Inggris berbunyi seperti ini:

Choice 1: Do you support the reunification of Crimea with Russia with all the rights of the federal subject of the Russian Federation?

Choice 2: Do you support the restoration of the Constitution of the Republic of Crimea in 1992 and the status of the Crimea as part of Ukraine?⁴⁴

⁴⁰ "Unrest in Ukraine" diambil dari Watson Institute For International Studies - Brown University, diakses pada 27 Desember 2014

⁴¹ Otfinoski, Steven. (2005). "Nation in Transitions: Ukraine. Part II: The Crimean Question." 2nd edition. New York: Library of Congress Cataloging-in-Publication Data.

⁴² *Ibid.*

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ "Crimean parliament votes to join Russia, hold referendum in 10 days on ratifying". RT. 6 March 2014. Retrieved 6 March 2014.

Perlu ditekankan bahwa pertanyaan surat suara tersebut ialah: *apakah mereka ingin bergabung dengan Rusia sebagai subjek federal? Atau, mereka ingin mengembalikan Konstitusi 1992 Krimea dan status Krimea merupakan bagian dari Ukraina?* Hasilnya ialah masuknya Krimea menjadi bagian dalam Federal Rusia. Bergabungnya Krimea ke dalam Federasi Rusia ini didukung oleh 97% masyarakat Krimea. Hasil referendum tersebut langsung disambut pasukan elite Rusia pada 22 Maret 2014 merebut pangkalan udara militer Ukraina di Belbek, Krimea.⁴⁵ Serangan Rusia terhadap pasukan Ukraina ini dinilai melanggar perjanjian internasional dan ancaman isolasi global. Akan tetapi Rusia tidak peduli hal tersebut dan tetap tangguh dengan rencananya. Bersama pasukan Rusia, otoritas Krimea mengendalikan setidaknya setengah wilayah Pangkalan Udara Belbek di semenanjung Laut Hitam tersebut dan sepertiga kapal angkatan laut Ukraina yang masih berfungsi. Beberapa ratus demonstran juga mengibarkan bendera Rusia setelah menyerbu sebuah pangkalan Angkatan Udara Ukraina di Novofedorivka, Krimea Barat, sementara pasukan pro Kremlin mengawasi. Aneksasi Rusia terhadap Krimea ditegaskan oleh Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu dengan menyatakan bahwa negara tersebut berupaya melakukan langkah-langkah demi mengamankan keselamatan fasilitas, infrastruktur, dan persenjataan armada mereka.⁴⁶

Rusia secara resmi mengakui hasil referendum Krimea dan mengklaim bahwa negaranya terlibat dalam pembuatan referendum tersebut. Setelah hasil referendum didapatkan, Parlemen Krimea meminta Federasi Rusia untuk mengakui Republik Krimea sebagai subjek dari/dengan status republik. Kemudian pada hari yang sama yakni tanggal 17 Maret 2014, Putin mengeluarkan dekrit secara resmi mengakui bahwa Krimea sebagai negara merdeka. Pada tanggal 18 Maret, pemimpin Rusia, Krimea dan Sevastopolian menandatangani perjanjian mengenai adopsi Republik Krimea ke Rusia yang telah diratifikasi oleh Majelis Federal Rusia pada 21 Maret. Masa transisi berlaku untuk mengintegrasikan lembaga pemerintah Krimea yang berakhir pada 1 Januari 2025.⁴⁷

Mengutip perkataan Klineberg⁴⁸, bahwa budaya sebagai keutuhan jalan hidup yang ditentukan oleh lingkungan sosialnya, maka demikian pula yang terjadi pada keterkaitan antara Krimea dan Rusia. Letak geografis Krimea yang berdekatan dengan Rusia secara tidak langsung berpengaruh terhadap lingkungan sosial. Terlebih dengan adanya aset

⁴⁵ "Ukraine orders Krimea troop withdrawal as Russia seizes naval base" diambil dari <http://www.cnn.com/2014/03/24/world/europe/ukraine-crisis/index.html?iref=allsearch> diakses pada 9 April 2014

⁴⁶ "Putin's Q&A Session 2014: Krimea, Ukraine, Gas, Foreign Policy and Mass Surveillance" diambil dari <http://en.ria.ru/politics/20140417/189252781/Putins-QA-Session-2014-Krimea-Ukraine-Gas-Foreign-Policy-and.html> diakses pada 9 April 2014

⁴⁷ Ukraine: Running out of Time. Crisis Group (Working to prevent conflict worldwide), 2014.

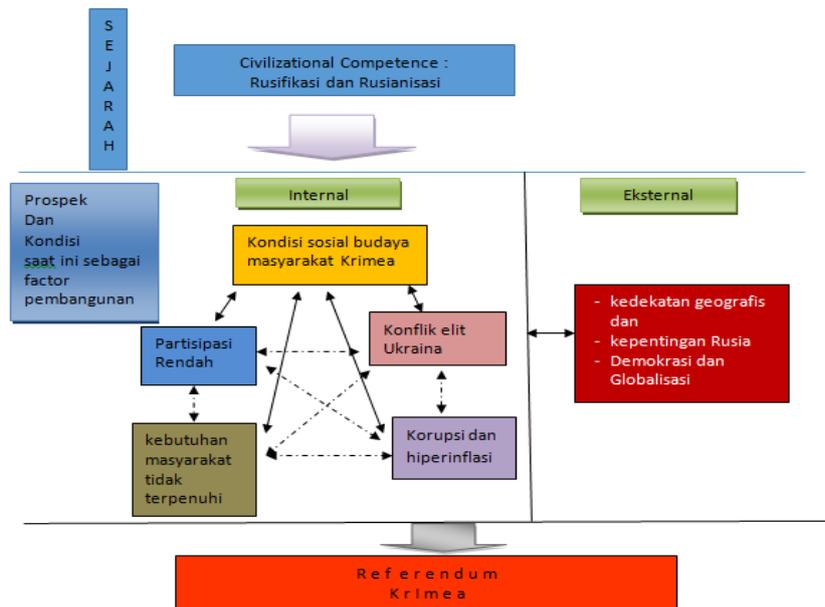
⁴⁸ Ronald H. Chilchote, 2007, *Teori Perbandingan Politik: Penelusuran Paradigma*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada) hal.295

Rusia di wilayah tersebut menjadikan keterkaitan antara kepentingan dan lingkungan sosial saling melengkapi. Kelengkapan inilah yang merupakan bagian dari keutuhan jalan hidup sebagai mana yang dimaksudkan oleh Klineberg. Hal ini juga didukung dengan pendapat CS Ford⁴⁹ bahwa budaya dalam hal ini adalah sosial budaya berimplikasi psikologis sebagai cara pemuasan kebutuhan dan pemecahan masalah. Kemerdekaan Ukraina sebagai negara berdaulat bukanlah tanpa kendala. Krisis internal Ukraina menyebabkan sistem politik tidak mampu berjalan sebagaimana mestinya. Kondisi ini bukan hanya menyebabkan tidak terpenuhinya kebutuhan masyarakat, tetapi juga memicu ketidakpercayaan masyarakat kepada pemerintah, termasuk disini adalah ketidakpercayaan Krimea terhadap pemerintahan pusat, Ukraina. Adanya aset Rusia di Krimea, kedekatan geografis, pengalaman sejarah, kesamaan sosial budaya yang berakhir dengan referendum menunjukkan bahwa dengan bergabung ke Rusia ada harapan untuk menyelesaikan masalah dan memenuhi kebutuhan masyarakat Krimea.

Analisis ini didasarkan pada pemikiran yang dikutip dari Frane Adam et.al, bahwa faktor sosial budaya merupakan bagian dari tantangan pembangunan, termasuk terjadi di Ukraina dalam hal ini adalah Krimea. Dikatakan pembangunan, sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa suatu negara bangsa yang dalam hal ini bisa diartikan juga sebagai sistem politik atau komunitas kelompok yang telah berdaulat (menyatakan diri kemerdekaannya) akan melanjutkan ke tahap berikutnya dalam hal ini adalah pembangunan. Pada istilah negara-bangsa disebutkan sebagai *nation building* dan *state building*. Apa yang dilakukan dalam pembangunan ini merupakan bagian dari eksistensi diri bahwa aktor tersebut ada. Fenomena separatism, konflik etnis dan domestik yang terjadi di dunia ini merupakan bentuk ketidakpuasan akan pemenuhan kebutuhan dan pemecahan masalah yang terjadi oleh pemerintah yang ditunjukkan dengan tidak efektifnya sistem politik. Demikian halnya yang terjadi di Krimea, bahwa referendum berikut opsinya didorong oleh adanya faktor sosial budaya masyarakat Krimea yang melihat pemerintah Ukraina tidak efektif dalam menyelesaikan masalah dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Ketidakpercayaan ini menunjukkan bagaimana kualitas pemerintah yang ada.⁵⁰ Apa yang terjadi di Ukraina dan mendorong terjadinya referendum di Krimea menjelaskan hal tersebut, sebagaimana skema berikut:

⁴⁹ *Ibid*

⁵⁰ Frane Adam et.all, (2005), *The Challenges of Sustained Development : The Role of Socio-Cultural Faktors in East-Central Europe*, (Hungary: Central European University Press) p.8



Adanya *civilizational competence* yakni sejarah sebagai pembentuk sosial budaya masyarakat Krimea dari masa Krimea Tatar yang berkembang yang menghadapi Rusifikasi dan Rusianisasi masa Tsar, kemudian menjadi kelompok terbuang, kemudian terjadi Rusifikasi dan Rusianisasi kembali masa Stalin menjelaskan bagaimana peradaban dengan sistem sosial budayanya terbentuk di Krimea. Rusifikasi dan Rusianisasi telah cukup berperan dalam membentuk peradaban baru di Krimea setelah Krimea Tatar. Kedekatan geografis, adanya asset Rusia di Krimea sebagai bentuk kepentingannya secara tidak langsung berpengaruh terhadap cara pandang masyarakat Krimea tentang pemerintahan yang efektif. Pada faktor internal dan eksternal sebagai kondisi dan prospek pembangunan terlihat bahwa pada faktor internal, pemerintah Ukraina tidak mampu menciptakan pemerintahan yang berkualitas terbukti dengan adanya konflik antar elit, korupsi, hiperinflasi. Tidak berkualitasnya pemerintah ini juga memicu dan dipicu rendahnya kohesifitas sosial, kekuatan sosial masyarakat Ukraina terutama kelas menengah dan masyarakat sipil yang tidak solid, ketidakmampuan warga memenuhi kebutuhan ekonominya, dan peran serta positif warga negara terhadap pemerintahannya. Sedangkan pada faktor eksternal, selain kedekatan geografis dan sosial budaya dengan Rusia, kecenderungan global terhadap nilai demokrasi berkaitan dengan kebebasan berpendapat turut berperan pada kasus referendum Krimea. Pada akhirnya referendum sebagai *developmental performance* yang dapat diartikan bahwa referendum merupakan jawaban untuk menyelesaikan masalah dan pemenuhan kebutuhan masyarakat Krimea. Sehingga demikian analisis mengenai faktor sosial budaya sebagai pendorong terjadinya referendum di Krimea.

Selain itu, perbedaan sistem politik yang diterima oleh orang Krimea pada kekuasaan Tsar Rusia, Uni Soviet dan Ukraina sangatlah berbeda. Perbedaan ini merupakan bentuk kedekatan psikologis masyarakat Krimea dengan Rusia sebagai induk budaya yang ada. Adanya perkembangan budaya politik kontemporer yang dialami Ukraina membawa proses pengembangan serta perubahan bahkan mutasi sistem. Fenomena ini berhubungan langsung dengan sikap masyarakat tempat politik itu berlangsung. Perubahan sistem tradisi inilah yang tidak diterima Krimea.

Kesimpulan

Tujuan dari penelitian ini ialah untuk menganalisis pertanyaan penelitian yang diajukan yaitu bagaimana faktor sosial budaya mendorong pembuatan referendum Krimea. Analisis yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan sosial-budaya akhirnya menjawab bahwa pertama, pembuatan referendum Krimea dilakukan untuk menjaga keamanan masyarakatnya yang memiliki ikatan erat dengan Rusia. Pada akhirnya referendum sebagai *developmental performance* merupakan jawaban untuk menyelesaikan masalah dan pemenuhan kebutuhan masyarakat Krimea. Fakta berbicara bahwa konflik di Ukraina terjadi disebabkan atas kompleksitas sejarah kemerdekaan serta perkembangan sistem politik negara tersebut yang membagi dua kelompok masyarakat: pro-Uni Eropa dan pro-Rusia. Sebagai negara yang memiliki kedaulatan tentu Ukraina memiliki konsekuensi untuk tetap mempertahankan negaranya secara politik, ekonomi dan keamanan. Akan tetapi ketergantungan yang melekat menambahkan dilema negara ini. Referendum ini juga menyimpulkan bahwa akhirnya Krimea telah menentukan nasibnya sendiri.

Kedua, faktor sosial-budaya yang menjadi sejarah yakni ditandai adanya Rusifikasi dan Rusianisasi telah cukup berperan dalam membentuk peradaban baru di Krimea setelah Krimea Tatar. Kedekatan geografis, adanya asset Rusia di Krimea sebagai bentuk kepentingannya secara tidak langsung berpengaruh terhadap cara pandang masyarakat Krimea tentang pemerintahan yang efektif. Hal ini menunjukkan bahwa pengaruhh sosial budaya berimplikasi psikologis sebagai cara pemuasan kebutuhan dan pemecahan masalah.

Ketiga, Faktor sosial-budaya juga mempengaruhi motif yang berbeda antara Krimea dan Ukraina. Hal ini menjadi tantangan pembangunan yang disebut sebagai *nation-building* dan *state-building*. Ketidakpercayaan Krimea terhadap pemerintahan Ukraina akhirnya menekankan kembali bahwa mereka memiliki kesamaan sosial budaya dengan Rusia, maka dengan referendum inilah ada harapan untuk menyelesaikan masalah dan memenuhi kebutuhan masyarakat Krimea. Terbukti bahwa pemerintah Ukraina tidak

mampu menciptakan pemerintahan yang berkualitas terbukti dengan adanya konflik antarelit, korupsi, hiperinflasi. Tidak berkualitasnya pemerintah ini juga memicu dan dipicu rendahnya kohesivitas sosial, kekuatan sosial masyarakat Ukraina terutama kelas menengah dan masyarakat sipil yang tidak solid, ketidakmampuan warga memenuhi kebutuhan ekonominya, dan peran serta positif warga negara terhadap pemerintahannya.

Hasil dari analisis penelitian ini akhirnya menjelaskan bahwa pembuatan referendum sebagai opsi menentukan nasib sendiri dapat terjadi di wilayah Indonesia. Apabila bagian dari wilayah Indonesia mengalami ketidakpercayaan pada pemerintah pusat, maka salah satu wilayah tersebut yang dapat menuntut otonomi daerah. Hal ini memiliki implikasi dan dapat memicu konflik yang sangat besar. Oleh karena itu saran penulis tentu saja diperlukan upaya diplomasi yang baik. Konteks diplomasi sebaiknya dijalankan untuk menciptakan konteks perdamaian. Diplomasi dapat dicapai sesuai dengan subjektif Krimea melalui diskusi dan perundingan.

Daftar Pustaka

- Adam, Frane et.all. 2005. *The Challenges of Sustained Development: The Role of Socio-Cultural Faktors in East-Central Europe*. Hungary: Central European University Press.
- Berdyaeu, Nikolai. 1947. *Russian Idea*, terj. R.M. French. London: Geoffrey Bless, Ltd.
- Chilchote, Ronald H. 2007. *Teori Perbandingan Politik:Penelusuran Paradigma*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Hobsbawn, E.J. 2000. Second edition, *Nations and Nationalism since 1780: Programme, Myth and Reality*. UK: Cambridge University Press.
- Isajiw, Wsevolod W. (Ed). 2003. *Transition: sosial Change in Ukraine in Western Perspective*. Toronto: Canadian Scholars' Press Inc.
- Klingemann, Hans-Dieter (ed). 2006. *Democracy and Political Culture in Eastern Europe*. Canada: Routledge.
- Kubicek, Paul. 2008. *The History of Ukraine*. USA: Greenwood Publishing Group.
- Lynn Ueling, Greta. 2004. *Beyond Memory: The Crimean Tatars' deportation and Return*. New York: Palgravw MacMillan.
- Meleshevich, Andrey A. 2007. *Party Systems in Post-Soviet Countries: A Comparative Study of Political Institutionalization in the Baltic States, Russia, and Ukraine*. Plgrave Macmillan.
- Otfinoski, Steven. 2005. *Nation in Transitions: Ukraine. Part II: Ukraine Today – Government.* 2nd edition. New York: Library of Congress Cataloging-in-Publication Data.

- Saase, Gwendolyn. 2007. *The Crimea Question: Identity, Transition and Conflict*. Harvard College.
- Trenin, Dmitri. 2014. *The Ukraine Crisis and the Resumption of Great-Power Rivalry*. Russia: Carnegie-Moscow Centre.
- Whitmore, Sarah. 2004. *State-Building in Ukraine (The Ukrainian Parliament, 1990 – 2003)*. New York: RoutledgeCurzon, Taylor for French Group.
- Christian Le Miere. 2014. *Evaluating Russia's Black Sea Fleet*. International Institute of Strategic Studies. February 26
- Ghia Nodia, *Nationalism and democracy*, dalam Jurnal Democracy, vol. 3 No.4 1992, p. 14-15
- Ukraine's political upheaval boosts some while others just get the boot" diambil dari <http://www.cnn.com/2014/02/24/world/europe/ukraine-winners-and-losers/index.html?iref=allsearch> diakses pada 8 April 2014
- Exit polls show Yanukovich leads Ukraine presidential election" diambil dari <http://www.cnn.com/2010/WORLD/europe/02/07/ukraine.elections/index.html?iref=allsearch> diakses pada 8 April 2014
- .Putin's Q&A Session 2014: Krimea, Ukraine, Gas, Foreign Policy and Mass Surveillance diambil dari <http://en.ria.ru/politics/20140417/189252781/Putins-QA-Session-2014-Krimea-Ukraine-Gas-Foreign-Policy-and.html> diakses pada 9 April 2014
- Ukraine orders Krimea troop withdrawal as Russia seizes naval base" diambil dari <http://www.cnn.com/2014/03/24/world/europe/ukraine-crisis/index.html?iref=allsearch> diakses pada 9 April 2014
- Siapakah Orang Tatar diambil dari <http://nationalgeographic.com/berita/2014/03/siapakah-orang/tatar> diakses pada 10 Januari 2015
- Ukraine: Running out of Time. Crisis Group (Working to prevent conflict worldwide), 2014.
- The Ukraine Crisis and the End of the Post-Cold War European Order: Options for NATO and the EU". Centre for Military Studies. University of Copenhagen.
- Unrest in Ukraine" diambil dari Watson Institute for International Studies - Brown University, diakses pada 27 Desember 2014

PENULIS

- Ludiro Madu** Dosen Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta. Saat ini, penulis sedang menyelesaikan S3 di *Institute of Asian Studies*, Universitas Melbourne, Australia.
- Denik Iswardani Witarti** Dosen Program Studi Ilmu Hubungan Internasional FISIP Universitas Budi Luhur, Jakarta.
- Budi Hartono** Alumnus Program Studi Hubungan Internasional FISIP Universitas Budi Luhur Jakarta. Kandidat Magister Sains Pertahanan Program Studi Diplomasi Pertahanan, Universitas Pertahanan, Sentul, Jawa Barat.
- Denada Faraswacyen L. Gaol** Dosen Program Studi Ilmu Hubungan Internasional FISIP Universitas Budi Luhur, Jakarta.
- Tulus Yuniasih** Dosen Program Studi Ilmu Hubungan Internasional FISIP Universitas Budi Luhur, Jakarta.
- Andrea Abdul Rahman A.** Dosen Tidak Tetap Program Studi Ilmu Hubungan Internasional dan Tenaga Ahli Komisi I DPR RI.
- Tubagus E. Faturahman** Dosen Tidak Tetap Program Studi Ilmu Hubungan Internasional FISIP Universitas Budi Luhur, Jakarta.
- Arin Fitriana** Dosen Program Studi Ilmu Hubungan Internasional FISIP Universitas Budi Luhur, Jakarta.
- Elistania** Alumnus Program Studi Ilmu Hubungan Internasional FISIP Universitas Budi Luhur, Jakarta. Saat ini sedang studi lanjut pada Kajian Eropa di Universitas Indonesia Jakarta.

PEDOMAN PENULISAN JURNAL

1. Artikel harus orisinal tidak pernah dimuat di media lain termasuk *blog*, tidak bersamaan dikirim ke media lain dan merupakan penelitian dalam lingkup kajian Ilmu Hubungan Internasional.
2. Naskah diketik satu kolom menggunakan font Arial 11, 1.5 spasi 3000 – 5000 kata atau setara dengan 10 – 20 halaman.
3. Artikel dapat ditulis dengan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris dengan format esai.
4. Pengiriman file naskah dapat di-*email* ke alamat: *transnasional_bl@yahoo.co.id*
5. Sistematika artikel adalah: Judul, Nama penulis (tanpa gelar akademik), lembaga/instansi, abstrak (jika naskah berbahasa Indonesia, maka abstrak berbahasa Inggris dan sebaliknya), kata kunci, Pendahuluan (latar belakang masalah, masalah), hasil dan pembahasan, kesimpulan, daftar pustaka, lampiran (jika ada).
6. Judul artikel berupa suatu ungkapan dalam bentuk kalimat pendek mencerminkan isi dari karangan. Nama lembaga/Instansi pengarang harus jelas dicantumkan pada halaman pertama. Bila Penulis terdiri dari empat orang atau lebih, maka hanya penulis utama yang dicantumkan dibawah judul artikel. Nama penulis lainnya dicantumkan pada catatan kaki halaman pertama naskah.
7. Penulis dianjurkan mencantumkan alamat *email* untuk memudahkan komunikasi
8. Sumber rujukan sebaiknya terbitan 10 tahun terakhir.
9. Teknis perujukan dan pengutipan menggunakan catatan perut dan catatan kaki untuk informasi pelengkap, dengan format sebagai berikut: ([nama belakang], [tahun]: [halaman jika ada]). Contoh: (Stiglitz, 2009:28).
10. Tabel dan gambar diberi judul yang singkat dan jelas maksudnya. Judul tabel berada di atas, sedangkan judul pada gambar berada di bawah. Setiap tabel dan gambar diberi nomor urut (1, 2, dst).
11. Penulisan daftar pustaka disusun menurut abjad nama penulis dan diketik 1 spasi untuk setiap pustaka dan berjarak 2 spasi untuk pustaka yang satu dengan yang lain.
12. Semua naskah ditelaah oleh *reviewer* yang ditunjuk oleh penyunting sesuai bidang kompetensinya. Penulis artikel diberi kesempatan untuk melakukan perbaikan naskah atas rekomendasi dari *reviewer*.
13. Artikel dapat dibatalkan pemuatannya jika diketahui bermasalah. Kepastian pemuatan dan penolakan naskah akan diberitahukan secara tertulis atau melalui *email* kepada penulis.
14. Segala sesuatu yang menyangkut perijinan atau pengutipan dari berbagai sumber untuk pembuatan naskah yang dilakukan oleh penulis, menjadi tanggung jawab penulis yang bersangkutan berikut konsekuensi yang timbul karenanya.